

Takdir Geopolitik Indonesia / KPK "Purna" Tugas

AKTUAL

Edisi 37 | 25 Juni - 9 Juli 2015



THE PRESIDENT "OFF SIDE" POWER

Rini dan Ari Soemarno menjadi kekuatan politik yang paling berpengaruh di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kedua mengendalikan arah kebijakan Presiden sejak awal pemerintahan. Bagaimana sepak terjangnya?

Rp. 30.000

ISSN 2337-8395



9 772337 839509

WWW.AKTUAL.COM

AKTUAL

Berani
Beda
Karena
Benar



Info Dan Pemasaran :

☎ 0812 1882 9528 (Marketing)

✉ iklan@aktual.co
marketing@aktual.co

www.aktual.com

PENDIRI M Danial Nafis

KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief

SEKRETARIS REDAKSI Hanny Haniffa

REDAKTUR SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi, Nia S Amira

SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Dhia Prekasha Yoedha, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony

DIREKTUR MAJALAH Wahyu Romadhony

REDAKTUR Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), Sukardjito, Ismed Eka Kusuma

ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Ferro Maulana, Tri Harningsih

STAF REDAKSI Soemitro-Deddy Kusnaedi-Moh Sahlan (Majalah), Fahrul Anwar, Fadlan Syam Butho, Maulana Khamal Macharani, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Nicha Muslimawati, Munzir (Foto), Junaidi Mahbub (Foto), Warnoto (TV)

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis

HEAD IT DIVISION: Yudhi Astira

NETWORK: Tri Wahyudi (Hd), Dewanta, Rendra

SMC: Resya Muhammad Irgi (Hd), Imelda, Taufik, Helmy Aziz, Iqbal Maulana

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Achmadi Parandangi (Makassar), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Bobby Andalan (Denpasar), Joko Pramono (Lumajang Jatim)

DIREKTUR OPERASIONAL Rinrin Sukmariana

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah

STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka

SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji

MARKETING OFFICER Ranie Anggoro, Rhiza Aditya

ALAMAT REDAKSI

PT Caprof Media Negeri
Cawang Kencana Building
1st Floor Suite 101
Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang
DKI Jakarta 13630 Indonesia
No Telp : (021) 8005520
Fax : (021) 80886466
Email : majalah@aktual.co
iklan@aktual.co

aktual.com
TERHANCAT TERPERCAYA

aktual
2015

Pesona Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mulai Meredup

Pertikaian antara KPK dan Polri di kasus dugaan rekening gendut calon Kapolri Budi Gunawan merembet ke ranah yang tidak pernah diperhitungkan KPK sebelumnya: soal kinerja KPK.

Luka KPK bertambah pedih ketika orang penting KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, terseret dalam kasus hukum. KPK yang dulu jadi pusat pemberitaan media kini mulai bergeser ke Polri dan Kejaksaan Agung.

Apakah ini tanda kehancuran KPK? Jawabannya: tidak! Ini adalah momen penting KPK untuk berubah. KPK, Polri dan Kejagung harus mulai bersatu padu melawan korupsi. Kewenangan yang cukup besar yang diberikan negara untuk KPK harus dijawab dengan kerja profesional dan independen oleh KPK.

Laporan Utama yang disajikan Aktual kali ini adalah sebuah kritik membangun buat KPK. Intinya, KPK harus mampu meyakinkan publik bahwa tidak lagi ada politisasi hukum yang dilakukan KPK dibalik setiap langkah-langkah pemberantasan korupsinya ke depan. Tidak ada lagi kepentingan asing dibalik semua langkah KPK.

Soal KPK ini penting untuk dicermati. Karena dalam kajian geopolitik, isu pemberantasan korupsi menjadi isu penting dalam perang asimetrik. Di rubrik geopolitik, Aktual berusaha menyajikan kembali sejarah isu pemberantasan korupsi di tahun 1998 lalu yang

mampu membuat Indonesia kembali terjajah. Bahkan isu-isu geopolitik perang asimetrik penting di Timur Tengah saat ini harus jadi pelajaran penting buat Indonesia. Bahwa, seperti itulah agenda dan cara asing akan menguasai dan menjajah Indonesia lagi.

Di samping isu korupsi, agenda perang asimetrik juga menyerang jantung kedaulatan pangan dan energi. Jadi jangan salah kalau isu TPPI yang saat ini memanas terus mendapat perhatian Aktual di rubrik Energi. Negara harus bisa memutuskan rantai kepentingan asing yang masih ada di susunan kabinet Jokowi. Ini penting untuk terus diperhatikan.

Soal isu Reklamasi juga menjadi topik penting yang disajikan Aktual. Sekarang sudah terbuka, reklamasi di laut China Selatan ternyata jadi isu penting perang asimetrik antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa wilayah perairan Indonesia dianggap gadis cantik yang harus dipinang oleh mereka. Konflik kepentingan di isu reklamasi di Jakarta dan Bali adalah salah satu contohnya. itu belum tercatat isu reklamasi di Makassar dan beberapa tempat lainnya.

Pembaca juga bisa membaca sajian-sajian penting dan strategis lain yang kami sajikan. Mudah-mudahan sajian Aktual kali ini bisa menambah referensi buat Anda.

Selamat membaca... ■



Laporan Utama

20 KPK Melemah Karena “KITA”

Lembaga *ad hoc* yang berkantor di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan itu sudah saatnya melakukan introspeksi.



24 Polisi Lebih Bernyali

Acungan jempol layak diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) khususnya kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) atas kinerja yang ditunjukkannya belakangan ini.



28 Saatnya KPK Purna Tugas

Ketika kinerja KPK menurun dan Bareskrim Polri semakin garang menumpas korupsi, maka perdebatan lama apakah KPK lembaga permanen atau lembaga adhoc kembali muncul.



10 NASIONAL

Ribut-Ribut Skema Penjualan Mitratel

KementerianBUMN kabarnya menyetujui penjualan saham Mitratel melalui mekanisme IPO atau melepas saham ke bursa saham.

16 POLITIK

Waktumu Sudah Habis, Pengkhianat Berwajah Santun

Lirik lagu berjudul 'Pengkhianat' yang digawangi Muhammad Prananda Prabowo menyengat publik.

30 HUKUM

Korespondensi Ari Soemarno di TPPI

Bareskrim Polri mengamati dokumen dan surat-surat penting untuk mendalami kasus korupsi penjualan kondesat PT TPPI yang merugikan negara sebesar Rp 6 triliun.

36 EKONOMI

Siasat Pengembang di Pesisir Jakarta

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta memang sangat fantastis dengan keuntungan yang melimpah. Jika proyek ini jalan, keuntungan berlipat-lipat bakal diraup Agung Podomoro.

42 ENERGI

Saling Cela Iringi Proses Ganti Casing 'Mafia' Energi

Peralihan rezim pengelolaan energi nasional dari SBY ke Jokowi-JK dilumuri perang statement tanpa substansi pembenahan. Atraksi saling menjatuhkan untuk memuluskan proses ganti casing para mafia.

46 GEOPOLITIK

Mengapa Air Harus dikuasai Negara?

Teorinya sederhana: kelangkaan akan meningkatkan nilai atau harga.

48 GEOPOLITIK

Kenali Takdir Geopolitik Indonesia dan Aneka Corak Perang Asimetris

Indonesia punya satu senjata ampuh, yaitu takdir geopolitik yang akan tumbuh sebagai pusat perebutan pengaruh geopolitik para adidaya

54 INTERNASIONAL

Meredam Eskalasi Konflik di Laut China Selatan

Langkah asertif China membuat pulau-pulau buatan di Laut China Selatan dan menghadirkan militernya di sana telah meningkatkan ketegangan. Indonesia pun berinisiatif mengusulkan patroli bersama, untuk meredakan ketegangan.

56 INTERNASIONAL

Rohingya dan Soal Menekan Myanmar

Menampung pengungsi Muslim Rohingya hanya mengobati gejala, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Komunitas internasional harus mendesak rezim Myanmar, agar mengakui etnis minoritas Rohingya sebagai warga negara yang sah dengan segala hak-haknya.

3 Tatap Redaksi

5 Terkini

6 Kaki Hari

8 Lensa Aktual

14 Kilas Nasional

18 Kilas Politik

34 Kilas Hukum

40 Kilas Ekonomi

44 Kilas Energi

60 Kilas Nusantara

KPK Cokok Kader PDIP dan Gerindra Muba

PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tercoreng. Jumat (19/6) malam, dua kader partai besar yang mendapatkan amanat rakyat duduk di kursi DPRD Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK, keduanya kemudian digelandang ke Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Guntur.

Mereka adalah Bambang Karyanto (PDI Perjuangan) dan Adam Munandar (Gerindra). Bambang diketahui duduk sebagai Ketua Komisi III DPRD Muba, sedangkan Adam duduk sebagai anggota Komisi III. Komisi III di DPRD Muba ini menangani bidang infrastruktur.

Selain keduanya, penyidik juga mencokok Syamsudin Fei (SF) yang merupakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Fasyar selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"OTT berkaitan dengan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 2015," ungkap Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jln. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

Penyidik sebenarnya sebenarnya menangkap 8

orang. Dari supir, pihak keamanan, kepala dinas hingga anggota DPRD Muba. Namun keempat lainnya tidak dilakukan penahanan.

"Lokasi (operasi) di rumah Pak BK, anggota DPR. Yang ditangkap total delapan orang, ada *driver*, *security*, Kepala Dinas dan anggota DPRD," tandasnya.

Penyidik, disampaikan Johan, mengamankan uang sebesar Rp 2,5 miliar dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu dalam OTT tersebut. Uang ini bukan setoran (suap) pertama, sebab sebelumnya telah disetorkan dalam jumlah miliaran rupiah.

"Ini kita duga pemberian yang kedua. Sebelumnya kita dapat info Januari ada pemberian juga. Nilainya juga miliar," ucapnya.

Dua anggota DPRD dijerat pasal 12 huruf a atau huruf b Pasal 11 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1. Dengan ancaman penjara 4-20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Adapun dua kepala dinas dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 UU Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1. Dengan ancaman penjara 1-5 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

"BK dan ADM ditahan di Guntur. SYF dan F ditahan di Cipinang," tutup Johan. / Soemtro

Hadang Kekuatan Siluman Pemerintahan Jokowi, Umat Islam Harus Bersatu

Umat Islam diingatkan agar bersatu. Hal ini penting dilakukan untuk mengimbangi dominasi anti-Islam yang saat ini menguasai pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat memberikan tausiyah dalam Tarawih Bersama Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di rumah tokoh senior HMI, Akbar Tanjung, Jumat (19/6) malam.

"Kita semua harus tahu, ada kekuatan siluman yang kuat mendukung pemerintahan Jokowi saat ini," tegasnya.

Menurut dia, kekuatan 'siluman' yang ada pada pemerintahan Jokowi-JK saat ini merupakan ancaman nyata bagi umat Islam. Sebab itu basis-basis umat Islam di berbagai daerah harus menghadangnya. Caranya dengan bersatu dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Tidak ada jalan lain selain bersatu. Sebagai kelompok mayoritas di negeri ini, umat Islam turut memegang tanggungjawab jalannya pemerintahan. Terutama bagi kebijakan-kebijakan yang melenceng dari nilai-nilai Islam.

"Agar nggak semakin gawat, perlu agar lingkaran-lingkaran Islam ini dikumpulkan lagi. Kita harus menyatukan kelompok-kelompok Islam ini untuk menentukan arah pemerintahan," lanjut Amin.

Mantan Ketum PP Muhammadiyah ini meminta KAHMI yang anggota tokoh-tokoh besar umat Islam berada di garda depan. Yakni dengan menggandeng semua pihak yang berbasiskan Islam agar bersatu.

"Kalau Muhammadiyah, biar saya sajalah. NU (Nahdatul Ulama), MUI, ICMI, dan semua organ Islam, saya usulkan agar saling terkoneksi membuat peta mengenai keadaan saat ini," tutupnya. / Soemtro





Puasa Penyelamatan

Bulan puasa kembali menjemput di tengah krisis keteladanan politik dan kemunduran bangsa di berbagai segi.

Apa artinya berpuasa bagi komunitas bangsa dengan mentalitas pecundang? Bukankah sejak awal puasa merupakan tanda kemenangan/keselamatan yang menarik garis pemisah antara yang adil dan yang batil (furqan)?

Ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, Ia menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Belakangan ia tahu bahwa puasa Yom Kippur itu merupakan cara orang Yahudi memperingati furqan-nya; bertepatan dengan hari ketika Tuhan menenggelamkan pasukan Fir'aun di Laut Merah yang memberikan keselamatan bagi Nabi Musa dan para pengikutnya. Nabi Muhammad pun lantas mengajak para pengikutnya untuk berpuasa pada hari itu.

Beberapa hari setelah kemenangan pasukan Muslim (yang kecil) atas pasukan Quraisy (yang besar) pada perang Badar (9 Ramadhan 624 M), Nabi pun mewajibkan kaum Muslim berpuasa di Bulan Ramadan—yang berlaku efektif setahun kemudian. Hal ini bisa diartikan sebagai tanda kaum Muslim memperingati furqan Badar yang monumental.

Jika tradisi berpuasa merupakan tanda furqan, penyelamatan dan kemenangan apakah yang telah kita capai selama ini yang membuat ibadah puasa itu punya kesan dan relevansi yang kuat dalam kehidupan sekarang dan di sini? Inilah pertanyaan yang selama bulan Ramadan nanti patut direnungkan. Agar setiap bulan Ramadan tiba, kita tidak terus-

menerus dipermalukan oleh defisit amal dan pencapaian, yang membuat ibadah puasa itu sekadar ritual komemoratif yang hampa makna.

"Pandanglah wajahmu setiap waktu di cermin," ujar Imam Ali. "Jika wajahmu bagus, anggaplah ia buruk karena engkau mencorengnya dengan perbuatan buruk. Dan jika wajahmu buruk, anggaplah memang buruk karena engkau menggabungkan ke dua keburukan (buruk rupa dan amal)."

Tetapi dalam konteks kehidupan kebangsaan kita hari ini, terdapat tanda-tanda bahwa orang-orang yang penampilan lahiriyahnya tampak buruk justru lebih bisa dibanggakan, karena kemampuannya menutupi keburukannya itu dengan kebajikan amalnya.

Penyelamatan paling heroik dari komponen bangsa selama ini adalah perjuangan kaum papa (mustadhafin) untuk tetap tabah, tolong-menolong dan giat bekerja di tengah impitan krisis dan ketidakpedulian elit pemimpin. Mereka bertahan hidup dengan menjalankan salah satu prinsip ber-zuhud: "tak terlalu berduka atas apa yang luput darimu" (QS 57: 23). Merekalah yang pantas menyambut bulan suci Ramadhan sebagai tanda kemenangan.

Terhadap kaum elit yang berpesta pora di atas penderitaan rakyat, yang tak mampu menarik batas antara yang adil dan yang batil, bermentalitas pecundang dengan menjual kehormatan negeri secara murah, puasa merupakan momen "bunuh diri". Puasa harus menjadi momen pembakaran egosentrisme dengan jalan ber-zuhud menurut caranya tersendiri: "tidak terlalu gembira atas apa yang diberikan-Nya kepadamu" (QS 57: 23).

Bagi ke dua golongan tersebut, Al-Qur'an mengajarkan teologi kemenangan lewat furqan Badar yang dirayakan oleh ibadah puasa itu. Pertama, diizinkan bela diri bagi orang-orang yang terusir dan teraniaya (QS 22: 39). Karena, sekiranya kejahatan sebagian manusia tidak dicegah oleh sebagian yang lain, "tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Tuhan" (QS 22: 40). Kedua, Tuhan hanya akan memberi kemenangan sekiranya orang-orang yang diberi kedudukan dimuka bumi mau "bershalat" (bertakwa kepada Allah) dan "berzakat" (memajukan kesejahteraan umum), mengembangkan perbuatan baik, dan mencegah perbuatan buruk dengan menegakkan hukum yang adil (QS 22: 41).

Alquran juga mengajarkan bahwa kekerasan tidaklah dikehendaki, dan jika terpaksa digunakan untuk kepentingan bela diri, hal itu haruslah diakhiri secara segera. Tujuan bela diri tak lain untuk mengembalikan harmoni dan rekonsiliasi, bukan untuk melanggengkan permusuhan. Idealnya, tak perlu bertempur untuk mempertahankan hal-hal luhur. Perjanjian damai Hudaibiyah (628 m)—dalam situasi ketika kaum Muslim berposisi kuat—mengajarkan bahwa nilai-nilai luhur bisa diaktualisasikan secara lebih produktif dalam situasi damai. Seperti dikatakan Karen Armstrong (dengan mengutip Ibnu Ishaq), dalam mengomentari "wujud kemenangan" dari perjanjian Hudaibiyah, "Situai damai menciptakan atmosfir lebih dingin, yang mendorong diskusi antara Muslim dan non-Muslim secara lebih terbuka dan produktif. Dalam situasi demikian, kemenangan bisa dirayakan bersama."

Dengan demikian, kemenangan bisa dicapai jika keadilan ditegakkan, kesejahteraan dikembangkan, ketakwaan dihidupkan, dan kedamaian disuburkan. Ibadah puasa, selain merupakan komemorasi atas momen kemenangan, harus juga menjadi momen refleksi dan pelatihan diri untuk meraih kemenangan sejati. ◻

Prof. Jimly Asshidiqqie: *Election With Integrity*

Pertama kalinya dalam sejarah negeri ini, pemilihan kepala daerah serentak dalam skala besar akan digelar akhir tahun ini. Ada 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota yang akan mengadakan pesta demokrasi lokal pada 9 Desember 2015. Selang dua tahun kemudian, Indonesia akan memilih anggota legislatif dan presiden, juga secara serentak.

Tentu, semua anak bangsa berharap pemilihan kepala daerah maupun pemilu bakal lebih berkualitas dan berintegritas. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan salah satu penentu pemilu yang berintegritas terletak pada penyelenggara pemilu itu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berikut jajarannya. "Dengan berpegangan pada kode etik, dan juga mematuhi aturan yang berlaku, para penyelenggara pemilu bisa ikut menciptakan pemilu yang berintegritas tinggi," katanya.

Malang melintang mengurus kasus pelanggaran etika penyelenggara pemilu sejak 2012, Prof Jimly, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, juga mempersiapkan lembaganya untuk membantu menjaga integritas pemilu. Berikut petikan wawancara lengkap dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama di Indonesia tersebut, yang dijumpai di kantornya Jl. MH. Thamrin 14, Lantai 5, Jakarta Pusat awal Juni lalu.

Mengapa pemilu berintegritas penting diwujudkan?

Integritas ini akan menjamin perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta dan calon, dan terhadap seluruh pemilih. Perlakuan yang sama ini sangat penting. Peserta pemilu, calon, dan para pemilih akan menerima hasil pemilihan jika penegakan aturan kompetisi diterapkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Jadi, pemilu yang berintegritas bakal mempengaruhi legitimasi pemilu itu sendiri.

Menjelang pemilihan kepala daerah serentak akhir tahun ini, seberapa penting isu integritas ini disikapi para penyelenggara pemilu?

Election with integrity ini tidak hanya berskala lokal. Justru, integritas pemilihan ini merupakan isu global. Jadi konsep besarnya adalah, integritas penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, harus dibangun sebagai satu kesatuan sistem yang independen.

Bagaimana caranya agar penyelenggara pemilu bisa membangun integritas?

Para penyelenggara pemilu kan sudah memiliki kode etik yang berlaku bagi KPU dan Bawaslu berikut jajarannya. Dengan berpegangan pada kode etik, dan juga mematuhi aturan yang berlaku, para penyelenggara pemilu bisa ikut menciptakan pemilu yang berintegritas tinggi.

Lalu apa peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan integritas pemilihan?

Dalam kerangka itu, DKPP menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga dan mengawal kode etik penyelenggara pemilu, yakni KPU dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya. Namun, perlu dicatat, tugas kami bukan untuk mencari-cari kesalahan penyelenggara pemilu, tetapi memastikan para penyelenggara melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu. Kalau kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan dengan konsisten, integritas pemilu bakal semakin kuat.



DKPP masih akan menjalankan peran sebagai pengadilan etik untuk para penyelenggara pemilu?

Kami dibentuk untuk menjaga kehormatan KPU dan Bawaslu. Peran kami justru bisa lebih besar ketimbang pengadilan biasa. Kami bisa menjadi mediator dan administrator dalam hubungan fungsi eksekutif KPU dan fungsi kontrol Bawaslu. Peran DKPP strategis untuk mendorong pemilu dapat berjalan dengan baik dan adil. Tugas DKPP lebih berat bila dibanding Dewan Kehormatan KPU pada Pemilu 2009 lalu karena harus turun hingga ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Sejauh ini sudah berapa kasus ditangani oleh DKPP?

Selama tiga tahun, kami menerima 1.658 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 521 perkara dianggap memenuhi syarat dan disidangkan. Jumlah itu sangat banyak. Dan dari semua perkara yang kami tangani, sebanyak 327 penyelenggara pemilu dipecat. Tidak semua tuduhan pelanggaran etika terhadap penyelenggara pemilu terbukti. Kadang-kadang, ada pelapor mengadu ke DKPP karena kecewa atas kekalahannya atau calon yang dijagokannya. Nah, kami memastikan benar-tidaknya tuduhan tersebut dengan melihat ada-tidaknya bukti pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilihan.

Menghadapi pemilihan kepala daerah serentak, diperkirakan laporan soal pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu meningkat?

Tak ada masalah. Dengan hanya tujuh komisioner dibantu 65 orang pegawai, kami berupaya menyelesaikan perkara yang masuk secepat mungkin. Sidang etik kami gelar tanpa bertele-tele dan semua pihak harus hadir. Cukup tiga kali sidang, lalu diputuskan. Untuk pemilihan serentak, kemungkinan kami akan menggunakan teknologi *video conference* supaya penyelesaiannya bisa cepat.

Adakah persiapan khusus?

Tidak perlu dibikin tegang. Kami sudah terbiasa menghadapi banyaknya laporan. Sekarang kami sedang mensosialisasikan pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu bersama KPU dan Bawaslu. Kami juga sudah mengangkat tim pemeriksa daerah. Tim ini ada di 33 provinsi dan terdiri dari lima orang. Komposisinya, satu orang dari KPU setempat, satu mewakili Bawaslu provinsi, satu anggota DKPP, dan dua wakil masyarakat, biasanya satu dari perguruan tinggi dan satu tokoh masyarakat. Tim ini akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik hingga tingkat kecamatan. Nah, tim ini sifatnya sementara dan tidak berwenang mengambil keputusan karena sesuai undang-undang, pengambilan keputusan tetap ada di DKPP. Tapi mereka yang diangkat senang bisa membantu negara ini.



LENSA AKTUAL

SAMBUT BULAN RAMADAN

Siluet warga melaksanakan salat di Masjid Mahkamah, Jakarta, Selasa (16/6). Bulan Ramadan 1436 H menjadi momentum bagi umat muslim untuk meningkatkan ibadah wajib dan sunnah.

Antara - M. Agung Rajasa



Ribut Telkom ala Rini Soemarno

Indonesia telah diserbu berbagai jenis alat telekomunikasi canggih dalam beberapa tahun terakhir. Bisnis menara telekomunikasi pun sangat menjanjikan untuk digeluti. Sangat aneh dalam kondisi yang sangat prospektif seperti ini, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk justru *ngebet* menjual anak usahanya PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel).

PT Dayamitra Telekomunikasi atau Mitratel adalah perusahaan provider di bisnis penyediaan menara pemancar telekomunikasi dan infrastruktur bagi beberapa operator telekomunikasi di Indonesia. Wacana penjualan Mitratel sendiri sudah lama diperbincangkan. Namun perdebatan yang mengemuka bukan soal penjualan itu, melainkan mekanisme penjualan yang berbeda.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kabarnya menyetujui penjualan saham Mitratel melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO) atau melepas saham ke bursa saham. Skema IPO ini berbeda dengan rencana penjualan Mitratel yang sudah disepakati sebelumnya, yakni memakai sistem barter atau tukar guling saham antara PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) kepada PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG). Dalam pembelian ini, TBIG akan memanggul puluhan ribu unit menara milik Mitratel selaku anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk.

PT Telkom selaku induk usaha Mitratel sendiri sudah meneken Conditional Sales Purchase



Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) didampingi Direktur Komersial Pelindo II Saptono Irianto (kedua kiri) serta Direktur Telkom Indra Utoyo (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat pertemuan dengan pimpinan BUMN di Jakarta, Sabtu (20/5).

Agreement (CSPA) dengan TBIG pada 2014. Dalam kesepakatan itu, Telkom dan TBIG akan menukar 100 persen saham Mitratel dengan 13,7 persen saham TBIG.

Proses tukar guling saham ini direncanakan terlaksana dalam dua tahap. Pertama, Telkom akan menukar 49 persen saham Mitratel dengan 6,15 persen saham TBIG. Untuk keperluan itu, baru TBIG mengumumkan akan menggelar aksi pembelian kembali (*buyback*) senilai Rp2,2 triliun. Saham hasil *buyback* itu akan diserahkan ke Telkom sebagai pelaksana skenario transaksi tahap pertama.

Tahap kedua, tahun 2017 sebanyak 51 persen saham Mitratel ditukar dengan 7,55 persen saham TBIG. Sebagai bonus tambahan, Telkom akan mendapat pembayaran Rp1,74 triliun jika bisnis Mitratel bisa memenuhi target yang ditetapkan TBIG.

Rencana penjualan Mitratel dengan skema CSPA inilah yang ditolak oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Komisi VI DPR. Namun belakangan isu penjualan ini kembali mengemuka, karena Menteri Rini lebih memilih penjualan dengan skema IPO.

Kebijakan ini pun langsung dikritik. Yang paling kencang memprotes adalah Lembaga Kajian dan Pembangunan Sosial Ekonomi (LKPSE) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menganggap rencana penjualan Mitratel secara IPO berpotensi merugikan negara hingga Rp33 triliun. "Kami ada temuan-temuan indikasi aksi korporasi IPO yang menyebabkan kerugian negara," ujar Direktur LKPSE, Richard Achmad.

Richard membeberkan, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Nomor. 10/S/IX-XX.2/01/2015 menyatakan bahwa aksi korporasi IPO menyebabkan potensi kerugian negara.

Berbeda dengan skema *share swap*, di mana BPK menyatakan tidak menemukan adanya kerugian negara serta pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan transaksi tersebut, karena bukan penjualan aset.

Berdasarkan hasil *review* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: LR-5/D502/2/2015 yang menyatakan bahwa proses *share swap* telah mengalami proses kajian aturan hukum, kajian bisnis dan potensi keuntungan keuangan Telkom. "Sedangkan IPO tidak memberikan nilai lebih untuk keuangan Telkom, yang ada justru Telkom akan merugi," terang Richrad.

Pendapat Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia bidang Perdatadan Tata Usaha Nomor.B-003/G/Gph.1/01/2015 menyatakan bahwa aksi korporasi Mitratel saat ini merupakan pilihan terbaik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam memutuskan hal ini, jelas Richard, Telkom tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR. Terkait dengan laporan ini, LKSE dan FITRA berharap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima dan menindaklanjuti laporannya.

"Harapan kami, KPK juga dapat memberikan keterangan tertulis kepada Direksi dan Dewan Komisaris Telkom mendukung kajian BPK, BPKP dan Kejaksaan," harapnya.

Sementara itu, Manager Advocacy dan Investigation FITRA, Apung Widadi menilai rencana penjualan Mitratel secara IPO kepada investor dapat menjadi bancakan politisi, pengusaha, dan elite. "Potensi kerugian negara jika proses aksi korporasi Mitratel berlarut-larut maka nilai saham akan turun dari Rp2.900 perlembar saham menjadi Rp2.600 perlembar. Ini setara dengan penurunan nilai sebesar Rp33 Triliun. Seperti penjualan Indosat era Rini juga," kata Apung.

Menteri BUMN Rini Soemarno sendiri dikatakan Apung, telah menjual empat BUMN strategis, yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Aneka Tambang

(Persero) Tbk (ANTM), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Padahal keempat BUMN itu telah mendapat penambahan PNM dalam APBN-P 2015 senilai Rp68 Triliun.

Ketua Komisi VI DPR RI Hafizs Tohir berjanji mempertanyakan penjualan saham Mitratel dengan skema IPO yang disinyalir akan merugikan keuangan negara. Sasaran kritik itu akan ditujukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menjadi pengendali terakhir penjualan Mitratel tersebut.

"Tentu saja kita akan kritisi, bagaimana duduk perkara sehingga keputusan itu diambil. Kita akan pemanggilan ke DPR," kata Hafizs.

Politikus PAN ini menambahkan, masalah Mitratel ini sebenarnya sudah pernah dibahas dan Komisi VI sepakat menolak penjualan tersebut. Namun ketika kabar penjualan itu muncul lagi, maka pihaknya akan meminta penjelasan. "Sekalian kita akan tanya juga masalah membangun pusat data pemerintah di Singapura," jelasnya.

Bangun Pusat Data di Singapura

Selain penjualan Mitratel, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, juga disorot terkait pembangunan pusat data di Singapura. Kebijakan ini dinilai sangat berisiko bagi bangsa Indonesia karena data milik negara akan mudah dikontrol pihak asing.

"Jelas berisiko. Sebab kalau akses itu terbuka begitu saja, nanti siapa saja bisa melakukan apapun terhadap isi server atau jaringan yang ada," ujar Pakar teknologi dan komunikasi Pratama Persadha.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber CISSRe ini khawatir data negara akan mudah dibobol jika server itu benar dibangun di Singapura. Kemudian lalu lintas data Indonesia akan di-*monitoring*, dan yang paling membahayakan adalah potensi dilakukan perusakan terhadap semua data dan sistem jaringan milik negara. "Kedaulatan negara kita bisa dibobol. Ini lebih

berbahaya dibanding penjualan Indosat dulu," tegasnya.

VP Komunikasi Korporat Telkom Arif Prabowo dalam keterangan tertulis membenarkan bahwa di negeri Singa itu ada pusat data milik Indonesia, namun pusat data itu hanya ditujukan untuk menyasar perusahaan-perusahaan regional dan global yang berbasis di Singapura. Pusat data semacam ini dinilai tidak berbahaya karena bukan melayani sektor pemerintahan Indonesia.

Pusat data yang dibangun di Singapura dikelola oleh Telekomunikasi Indonesia International Limited Singapore (Telin Singapore) yang mengoperasikan pusat data di Changi dan Tai Seng. Telin juga sudah memulai pembangunan pusat data ketiga di daerah Jurong, Singapura.

"Fasilitas yang akan dinamakan Telin-3 itu dirancang untuk melayani kebutuhan pusat data premium para korporasi Singapura dan perusahaan multinasional. Pusat data itu ditargetkan beroperasi pada kuartal III/2016 dan diharapkan dapat memperkuat posisi Telin Singapore sebagai hub strategis bagi Telkom Group ke belahan dunia lain," beber Arif.

Kebijakan Telkom ini sebenarnya sudah dilaporkan lembaga swadaya masyarakat ke kepolisian dengan tuduhan akan menggunakan pusat data di Singapura untuk menyimpan data-data pemerintah. Telkom dan Singapore Telecommunication Limited (Sing Tel) juga bakal membuat perusahaan patungan yang bergerak di bidang penyediaan aplikasi untuk perusahaan komersial dan pemerintahan.

Arif memastikan perusahaan patungan itu akan menggunakan pusat data milik entitas usaha Telkom lain, PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), yang sepenuhnya berlokasi di Indonesia. Perusahaan patungan itu sendiri direncanakan mulai beroperasi tahun depan.

"Jadi perusahaan patungan dengan Sing Tel ini adalah proyek yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan pusat data di Jurong," tuntas Arif. ■ Moh Sahlan



Richard Achmad

SATU SUARA ULAMA UNTUK PEMIMPIN INGKAR JANJI

MAKLUMAT MUHAMMADIYAH PEMERINTAH JOKOWI-JK LANGGAR KONSTITUSI

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memaklumkan kepada seluruh masyarakat bahwa kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan atau menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri berdasarkan harga jual minyak di pasar dunia adalah bertentangan dengan UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai keputusan MK Junto nomor 36/PUU/2012.

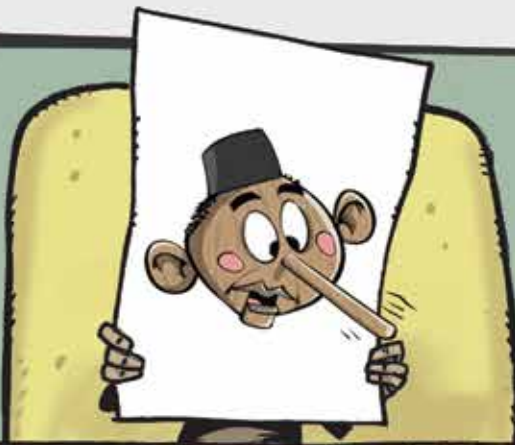
Maklumat ini disampaikan sebagai tanggung jawab kebangsaan Muhammadiyah dan untuk menjadi perhatian semua pihak yang berkomitmen terhadap penegakan hukum dan konstitusi serta tegaknya kedaulatan negara.

Maklumat tertanggal 22 Mei 2015 dan bernomor: 218/MLM/L.0/I/2015 tentang Kebijakan Pemerintah Menaikkan dan Menurunkan Harga Bahan Bakar Minyak ini ditandatangani Ketua dan Sekretaris PP Muhammadiyah, Prof Dr H M Din Syamsuddin MA dan Sekretaris Dr H Abdul mu'ti M.Ed.

PEMIMPIN INGKAR JANJI HINGGA KUDETA DI MUKTAMAR NU

Ketum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siraj MA mengatakan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 yang digelar di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015 mendatang, akan membahas berbagai permasalahan terkini. Salah satunya menyangkut kepemimpinan nasional.

"Janji pemimpin pemerintahan yang tidak ditepati, apakah rakyat wajib mentaati atau tidak, itu bagaimana? Kemudian bagaimana kudeta terhadap terhadap pemimpin dan masih banyak yang lainnya," tegas Kyai Said didampingi Rois Syuriah, Ahmad Ishomuddin, di Jakarta, Selasa (19/5).



FATWA MUI

TENTANG MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN

Pada dasarnya, jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Meminta dan/atau merebut jabatan merupakan hal yang tercela, apalagi bagi orang yang tidak mempunyai kapabilitas yang memadai dan/atau diketahui ada orang yang lebih kompeten. Dalam hal seseorang memiliki kompetensi, maka ia boleh mengusulkan diri dan berjuang untuk hal tersebut.

Setiap calon pemimpin publik, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif harus memiliki kompetensi (ahliyyah) dan kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut.

Dalam mencapai tujuannya, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya.

Calon pemimpin yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu kebijakan yang tidak dilarang oleh syariah, dan terdapat kemaslahatan, maka ia wajib menunaikannya. Mengingkari janji tersebut hukumnya haram.

Calon pemimpin publik dilarang berjanji untuk menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Dan jika calon pemimpin tersebut berjanji yang menyalahi ketentuan agama maka haram dipilih, dan bila ternyata terpilih, maka janji tersebut untuk tidak ditunaikan.

Calon pemimpin publik yang menjanjikan memberi sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan untuk memilihnya maka hukumnya haram karena termasuk dalam kategori risywah (suap).

Pemimpin publik yang melakukan kebijakan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama maka kebijakannya itu tidak boleh ditaati.

Pemimpin publik yang melanggar sumpah dan/atau tidak melakukan tugas-tugasnya harus dimintai pertanggungjawaban melalui lembaga DPR dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa, dan tidak boleh dipilih kembali.

MUI memberikan taushiyah bagi pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya.

Jual BUMN, Tindakan Rini Soemarno Dinilai Berbahaya



Anggota DPR Komisi VI Bambang Haryo mengatakan bahwa tindakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyetujui perjanjian kerjasama bantuan pendanaan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia senilai USD40 miliar atau sekitar Rp520 triliun, dinilai sangat membahayakan.

“Jika hanya sebatas investasi, mungkin masyarakat tidak akan terlalu kena dampaknya. Akan tetapi jika seluruh mega proyek mengharuskan tenaga kerjanya juga didatangkan dari Cina, hal ini sudah terlihat dari kesepakatan pertukaran warga negara hingga mencapai 10 juta penduduk,” kata Bambang, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6).

Namun, yang menjadi masalah sekarang ini adalah kondisi perekonomian Indonesia yang hingga saat ini belum menunjukkan perubahan yang positif secara signifikan. Jika nantinya Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan BUMN tersebut akan jatuh kepada tangan asing.

“Inilah bukti bahwa Pemerintahan Jokowi tidak memberikan solusi terbaik untuk rakyat Indonesia, tetapi malah menjerumuskan untuk terus menjual aset-aset BUMN yang kita punya kepada pihak asing,”

“Kami dari Partai Gerindra secara tegas akan menentang sekeras mungkin tindakan arogan ini bila aset BUMN nantinya dikuasai oleh asing,”

/Karel Stefanus Ratulang

Tiongkok Larang Warganya Puasa Ramadhan

Pemerintah Tiongkok melarang warga muslim Uighur di Xinjiang berpuasa. Terutama bagi anggota partai, pegawai negeri, siswa, mahasiswa, serta para guru. Selama ini Ramadhan memang selalu menjadi momen yang sangat sensitif di Xinjiang.

“Tiongkok meningkatkan pengawasan dan larangan begitu mendekati Ramadhan. Keyakinan penduduk Uighur dipolitisasi,” ujar juru bicara kelompok Kongres Uighur Dunia (WUC) Dilxat Raxit.

Dia menegaskan, tindakan pemerintah Tiongkok itu bertujuan mengontrol agama yang dianut warganya. Padahal, tindakan tersebut dapat berakibat fatal. Sebab, penduduk Uighur bisa jadi melawan aturan-aturan itu dengan sengit. Sudah tidak terhitung banyaknya perlawanan berujung maut oleh penduduk Uighur karena tekanan pemerintah Tiongkok tersebut.

Sejatinya setiap Ramadhan datang, pemerintah Tiongkok memang memperketat aturan puasa di wilayah Xinjiang. Namun, tahun ini aturan itu jauh lebih ketat.

“Mereka meminta jaminan dari para orang tua yang menjanjikan bahwa anak-anak mereka tidak akan berpuasa selama Ramadhan,” ujarnya saat diwawancarai Radio Free Asia.

Berdasar website milik pemerintah, petugas keamanan pangan Tiongkok meminta restoran-restoran yang menyajikan makanan halal di Jinghe County untuk tetap buka sepanjang siang selama bulan puasa. Restoran yang menuruti perintah akan menerima imbalan. Mereka tidak bakal diinspeksi terlalu sering oleh petugas keamanan pangan.

Media milik pemerintah juga melaporkan, para pegawai muslim di Maralbexi County diminta untuk mengucapkan secara verbal maupun



tertulis. Yakni, mereka tidak memiliki keyakinan agama, tidak akan menghadiri kegiatan yang bernuansa religi, dan tidak berpuasa selama Ramadhan.

Bukan hanya itu, toko-toko dan restoran milik penduduk muslim juga diharuskan menjual rokok dan alkohol. Jika mereka menolak, tempat usahanya akan ditutup.

Pemerintah Tiongkok terus melakukan kampanye melawan kegiatan religius yang ekstrem. Mereka menyalahkan muslim Uighur yang dituding melakukan serangan-serangan dan mengakibatkan kematian ratusan orang dalam beberapa tahun belakangan ini.

Para pengamat menilai bahwa serangan dan kericuhan yang terjadi disebabkan tekanan pemerintah Tiongkok yang menghalangi kebebasan mereka dalam beragama.

Tindakan pemerintah Tiongkok itu telah ditentang berbagai pihak dan pengamat HAM di berbagai belahan dunia. Mereka menyebut tindakan pemerintah Tiongkok tersebut sebagai penindasan agama. Pada Desember 2014, pemerintah Tiongkok bahkan melarang penggunaan kerudung di tempat umum bagi warga muslim di Urumqi, Xinjiang. Padahal, di kota itulah, mayoritas penduduk muslim Uighur berada.

Sejak 1955, Xinjiang sejatinya menjadi wilayah otonomi khusus. Meski begitu, pemerintah pusat tetap mengawasi ketat dan terus menindas penduduk. Berbagai larangan pun dikeluarkan. Di wilayah yang biasa disebut para aktivis sebagai Turki dari Timur tersebut, ada 8 juta warga Uighur. Reuters/Shanghaiist

Di Istana, Jokowi Kenakan Seragam Militer

Presiden Joko Widodo kembali menuai kritik. Kali ini tentang pakaian yang digunakannya saat menemui Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Istana Negara, Selasa (16/6). Jokowi menemui Din dengan menggunakan seragam tentara lengkap dengan baret hijau yang dikenakan di kepala.

Jokowi memang baru saja tiba di Jakarta setelah menghadiri acara pelatihan tempur TNI Angkatan Darat di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Anggota Tim Komunikasi Kepresidenan, Teten Masduki, mengatakan Presiden Jokowi terpaksa mengenakan seragam militer dalam pertemuan tersebut. "Setelah memberi arahan, Presiden dengan tetap naik (tank) Anoa diantar ke mobil. Presiden langsung menuju Lanud Gatot Subroto di Lampung dan berangkat ke Jakarta," kata Teten

Jokowi pernah mengenakan seragam yang sama saat meresmikan RS Muhammad Ridwan Meuraksa Kodam Jaya di Pinang Ranti,

Jakarta Timur, pada 13 Mei lalu. Tindakan Jokowi tersebut dikritik oleh pengamat militer Universitas Pertahanan, Salim Said. Seusai bertemu Jokowi pada 4 Juni lalu, Salim dengan keras mengingatkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahwa dirinya berasal dari warga sipil. "Saya ingatkan Pak Jokowi dengan hormat dan rendah hati, jangan membiasakan menggunakan pakaian militer. Beliau (Jokowi) itu kan sipil," kata Salim.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang mengenakan seragam militer dalam menjalankan aktivitasnya di Istana. "Saat Jokowi berbaju militer di Istana dan menerima tamu, ia bukan cuma menggelikan. Ia secara memalukan memamerkan keterbatasan pengetahuannya," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6).

Di Indonesia, lanjut Rachland, demokrasi itu diwujudkan dengan darah, air mata, bahkan nyawa rakyat, termasuk mahasiswa dan



buruh. Oleh karena itu, dengan menggunakan seragam militer, Presiden menunjukkan betapa rendahnya penghargaan pada sejarah perjuangan demokrasi kita. "Sepanjang sejarah RI, agaknya baru kali ini ada presiden memakai seragam militer ketika menjalankan tugas sehari-harinya di Istana, padahal dia sipil. Padahal presiden yang berlatar belakang militer saja tidak pernah," ucap Rachland. /Sumitro

Wapres JK: Dana Aspirasi Tak Lagi Diperlukan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak semua daerah memiliki kebutuhan sama, sehingga dana aspirasi Rp20 miliar untuk anggota DPR tidak mewakili keperluan daerah asal.

"Karena tidak semua daerah punya kekurangan dan kebutuhan yang sama, sehingga ketika semua anggota DPR nanti dapat Rp20 miliar (masing-masing, red.), nanti bisa berbeda-beda keinginannya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, kemarin, Rabu (17/6).

Wapres mengatakan sesungguhnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah termasuk dana aspirasi anggota DPR. Sehingga, dana aspirasi di luar APBN tidak lagi diperlukan.

"Semua anggaran (APBN) itu kan DPR yang menentukan, bersama

dengan Pemerintah. Berarti 100 persen anggaran itu aspirasi DPR juga kan," ujar Wapres.

Sehingga, lanjutnya, ketika sebuah daerah memerlukan dana untuk pembangunan infrastruktur maka itu seharusnya diusulkan sejak pembahasan APBN.

"Jadi kalau memang aspirasi disetujui, tentu dalam pembahasan (APBN) sudah ada bahwa di provinsi ini perlu pembangunan jalan. Itu aspirasi," ucapnya. /Ant-Sukardjo



Jusuf Kalla : TPPI Ingkar Janji

Wapres Jusuf Kalla mengatakan PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (PT TPPI) telah melanggar perjanjian dengan tidak menjual kondensat hasil olahannya kepada Pertamina.

Petinggi TPPI menurutnya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondensat antara BP Migas (kini SKK Migas) dengan PT TPPI.

"Ya tentu tanggungjawab yang berbuat pidana atau berbuat ingkar, ya TPPI yang berbuat ingkar, begitu kan. Karena itu dalam rapat diputuskan hasil pengolahan kondensat di TPPI itu kemudian harus diberikan, dijual kembali ke Pertamina," kata JK di Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/6). /Muhammad Dasuki



Waktumu Sudah Habis, Pengkhianat Berwajah Santun

Lirik lagu berjudul 'Pengkhianat' yang digawangi Muhammad Prananda Prabowo menyengat publik. Prananda, putra Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, mengunggah videoklip 'Pengkhianat' di Youtube melalui akun Rodinda Musik Indonesia (RMI). Video diunggah 8 Juni 2015.

Uweng atau Nanan, sapaan Prananda, merupakan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPP PDI Perjuangan. Ia terlahir dari pernikahan pertama Megawati dengan Letnan Satu Penerbang Surindro Supjarso.

Rully Worotikan, vokalis Rodinda, menyatakan lagu 'Pengkhianat' tidak ditujukan untuk menelanjangi

ataupun mengkritik keras kepemimpinan seseorang. Bait-bait dalam liriknya lebih ditujukan untuk menelusuri jejak atau teori revolusi. Yang mana sesuai hukum alam, revolusi kerap melahirkan pengkhianatan.

"Dalam revolusi itu, langkah pertama (men)ciptakan siapa lawan dan siapa kawan. Nah, pengkhianat

itu yang paling bahaya karena muncul di garis belakang, menikam perjuangan," kata dia di Jakarta, Senin pekan lalu.

Artikel *megawati.org* menjelaskan bagaimana keterkaitan Rodinda dengan Revolusi melalui dialog imajiner antara Jokowi dengan Presiden Soekarno. Dialog yang disebutkan beredar pada masa kampanye Pilpres 2014.

Kata Bung Karno kepada Jokowi, sebuah revolusi itu harus digerakkan dalam basis Rodinda. Mantan Walikota Solo bertanya balik mengenai arti dari "Rodinda". Lalu dijelaskan bahwa Rodinda adalah Romantika, Dinamika dan Dialektika.

Romantika adalah bagaimana membangun rasa cinta, kegembiraan dan membentuk hubungan rasa antara pemimpin dan rakyat. Dalam romantika rakyat dibawa pada kegembiraan. Ada unsur *passion* (gairah) sehingga rakyat terbuka kesadarannya akan apa yang terjadi dalam diri mereka.

Dinamika sebagai keadaan dimana rakyat bergelora dan kemudian diarahkan pada gerakan-gerakan besar menuju satu cita-cita pembebasan. Jokowi diingatkan bahwa pada gilirannya akan menemui kegelisahan karena rakyatnya ditipu oleh para birokrat.

"Kamu jalankan bagaimana rakyat harusnya bergerak dan berdinamika, bangun sebuah sistem yang partisipatif, rakyat harus punya cara menentukan nasibnya sendiri," kata BK.

Terakhir, Sang Proklamator dalam dialog imajinernya menjelaskan mengenai Dialektika. Keadaan dimana rakyat mulai sadar setelah bergerak dari keadaan-keadaan yang melingkupinya. Pergerakan inilah yang akan menghidupkan nyawa sebuah revolusi.

Rully mengakui bait demi bait lirik lagu Pengkhianat memberikan pencerahan dan pembelajaran politik. Hanya saja, ia menekankan pembelajaran politik dimaksud tidak diarahkan kepada Joko Widodo. Sosok sederhana nan santun yang

kini menjabat sebagai Presiden RI. Meski begitu, ia memaklumi jika ada penilaian publik demikian.

Salah satu penilaian itu datang dari pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ia menyatakan bahwa yang disebut pengkhianat dalam lagu Rodinda adalah Jokowi.

Bahkan, bukan hanya dari punggawangnya Nanan, apa yang hendak disampaikan menurutnya membawa pesan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Yakni mengingatkan Jokowi agar tidak lupa diri.

"Jokowi tidak boleh menganggap enteng permasalahan ini. Dan Jokowi juga akan menyalahkan PDIP karena kegagalannya dalam memimpin negara," kata Ubedillah kepada Aktual.

Kekecewaan partai berlambang banteng moncong putih pada penyusunan kabinet lalu, berimbas pada manuver-manuver politik kader. Ada yang secara blak-blakan mengkritik pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, ada pula yang memendam kekecewaan.

Pilihan kedua dipilih karena khawatir bersinggungan dan atau berujung pada teguran dari Lenteng Agung, Markas PDI Perjuangan. Mereka lebih memilih diam sambil menunggu momentum yang pas.

"Jika tren masyarakat menggulingkan Jokowi deras maka PDIP akan berada di belakang masyarakat," kata Ubedillah.

Ketua DPP Partai NasDem, Johny G Plate, mengatakan lirik lagu Pengkhianat adalah *mirror* atau refleksi dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Apa yang dilakukan Nanan melalui seni adalah cara kritis demi perbaikan bangsa. Hal yang sah-sah saja dilakukan pekerja seni di berbagai belahan dunia.

Mengenai kata 'pengkhianat berwajah santun' dan 'senyummu

bulus membius', anggota Komisi III DPR ini enggan berandai-andai kepada siapa diarahkan. Akan tetapi, ia mengungkapkan bahwa dalam dunia politik kita memang ada sikap hipokrit atau munafik dan atau berpura-pura.

"Kritik terhadap sikap hipokrit itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial, itu kan tidak salah, itu juga termasuk dalam sikap politik," ucap dia saat ditemui Aktual, Senin pekan lalu.

Sikap politik sudah seharusnya diposisikan pada tempatnya. Yakni semata-mata untuk kepentingan bangsa dan bernegara di berbagai bidang. Baik di kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya hingga tatanan hukum.

Pada diri Prananda, kata Johny, mengalir darah seni dan politik ayahnya. Sikap yang diambilnya dengan mengkritik tentu harus dihormati dan dilihat sebagai hal yang positif.

"Kalau orang mengkritik kan tidak semuanya bermuara jelek, mengkritik itu kan supaya hal-hal yang kurang diperbaiki. Dan itu baik. Kebiasaan otokritik itu juga tantangan tersendiri dalam masyarakat paternalistik kita," tandasnya. [Scornito](#)



Fatwa MUI: Berdosa Pemimpin Ingkari Janji Kampanye

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menerbitkan fatwa tentang hukum "berdosa bagi pemimpin yang tidak menepati janjinya saat kampanye". Hal tersebut didasarkan pada kesepakatan ulama MUI dalam acara ijtima Komisi Fatwa MUI V di Tegal, 7-10 Juni 2015, fatwa ini ditujukan kepada pemimpin dan calon pemimpin publik, baik itu di legislatif, yudikatif maupun eksekutif, Jumat (12/6).

"MUI meminta para calon pemimpin, baik dari legislatif, yudikatif, maupun eksekutif agar tidak mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya," ujar Ketua Tim Perumus Komisi A Muh. Zaitun Rasmin.

Menurut Zaitun seorang pemimpin berkewajiban menunaikan janjinya apabila saat kampanye dia berjanji untuk melaksanakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengandung unsur kemaslahatan. Sebaliknya, mengingkari janji tersebut hukumnya haram.

Tak hanya itu saja Ulama di MUI kata dia juga sepakat bahwa calon pemimpin dilarang berjanji menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Apabila dia menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan syariah, maka calon pemimpin tersebut haram dipilih. Dan apabila terpilih, maka janji tersebut sah untuk tidak ditunaikan.

Terhadap pemimpin yang ingkar janji, sambungnya MUI mengimbau umat untuk tidak memilihnya kembali jika yang bersangkutan kembali mencalonkan diri pada pemilihan umum periode selanjutnya.

Dia menambahkan Fatwa yang telah disetujui oleh mayoritas ulama MUI itu juga menyoroti masalah suap di saat kampanye. MUI memutuskan calon pemimpin yang menjanjikan sesuatu kepada orang lain sebagai

imbalan untuk memilihnya, maka hukumnya haram karena termasuk dalam kategori risywah atau suap.

Berikut adalah dasar MUI menetapkan hukum dosa bagi pemimpin ingkar janji, di antaranya

Pertama, dari nash atau sumber hukum Islam menyuruh agar setiap muslim menepati janji dan melarang mengingkarinya. Kedua, setiap janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketiga, pemimpin harus menunaikan janjinya saat kampanye demi kemaslahatan umat.

Tidak hanya itu saja, Fatwa ulama itu juga mendorong agar para pemimpin yang muncul ke hadapan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut.

Karena itu, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya dalam mencapai tujuannya.

Menurut Zaitun jabatan adalah amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Meminta atau merebut jabatan merupakan hal yang tercela terlebih bagi orang yang tidak memiliki kemampuan yang memadai.

Selain masalah pemimpin ingkar janji, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang kriteria pemimpin yang tidak perlu ditaati.

MUI juga telah mengeluarkan fatwa terkait tidak perlunya masyarakat untuk menaati pemimpin yang melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama.

Fatwa itu sendiri telah disepakati oleh para ulama MUI dari

berbagai ormas Islam. Poin tentang pemimpin yang tidak boleh ditaati itu diharapkan dapat menjadi panduan masyarakat yang mengalami keraguan dalam beragama.

Terdapat beberapa alasan tidak perlunya masyarakat menaati pemimpin yang bertentangan dengan agama.

Pertama, terdapat sumber hukum Islam yang menyuruh umat Islam agar mendengar dan taat terhadap pemimpin yang membuat kebijakan sesuai syariah, tetapi jika pemimpin menyuruh kepada kemaksiatan maka tidak boleh untuk didengar dan ditaati.

Kedua, terdapat larangan bagi pemerintah untuk agar tidak mengeluarkan apapun, termasuk peraturan, kecuali dengan cara yang baik. Ketiga, siapapun yang berkuasa harus membawa sesuatu kepada kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Secara umum, Ijtima' Ulama edisi kelima itu membahas tiga bagian besar fatwa yaitu soal kebangsaan, fikih kontemporer dan perundang-undangan.

Sejumlah fatwa yang telah disepakati para ulama akan dipublikasikan kepada masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan. @Deddy



DPR Prihatin dengan Kasus Engeline



Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djunjunan mengaku dirinya merasa prihatin atas nasib yang menimpa Engeline, seorang bocah perempuan berusia delapan tahun asal Bali yang sebelumnya dinyatakan hilang tetapi tiga minggu kemudian, tepatnya pada Rabu (10/6) ditemukan telah tewas terbunuh dan dikubur di halaman kediaman ibu angkatnya.

"Itu adalah tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan, pelakunya harus dijatuhi hukum yang setimpal," cetus Popong, Kamis (11/6).

Menurut Popong anak seusia Engeline tidak mungkin melakukan kesalahan besar yang kemudian dijadikan alasan untuk dilakukan tindakan kekerasan terhadapnya sebagai hukuman, apalagi sampai penghilangan nyawa kepadanya. Kenakalan anak seusia seharusnya dapat dimaklumi dan dimaafkan.

Popong berharap agar keluarga lain agar dapat memberi perhatian serius pada anak-anak. "Anak-anak harus diberi ruang yang cukup untuk belajar dan bermain."

Popong juga mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil mengungkap kematian Engeline. Dirinya mendesak agar polisi segera menetapkan pelaku kekerasan dan pembunuhan tersebut dan menuntutnya sesuai hukum yang berlaku. ©Deddy

Politisi Golkar : DPR Perlu Jelaskan Keuntungan dari Dana Aspirasi Pada Masyarakat

Politisi Golkar Priyo Budi Santoso menilai dana aspirasi daerah pemilihan yang kini tengah dibahas DPR sebesar Rp 20 miliar per anggota setiap tahunnya memicu polemik di masyarakat.

"Langkah ini memang akan ada banyak pertanyaan yang menimbulkan polemik karena pasti anggota DPR punya keuntungan politis dengan langsung aspirasi ke konstituen," ucap Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Pada periode lalu, kata dia dana aspirasi juga sempat diusulkan. Tetapi pro-kontra tidak dapat dihindari, kemudian pengadaan dana aspirasi ini dibatalkan.

"Karena dikritik keras publik, saat itu kami pimpinan DPR dan fraksi-fraksi periode itu memutuskan untuk tidak melanjutkan," jelas Priyo

Priyo mengakui kala itu memang belum ada payung hukum yang mengatur mengenai dana aspirasi. Tetapi kini, dana aspirasi sudah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru direvisi.

Intinya lanjut Priyo, adalah bagaimana DPR dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengadaan dana aspirasi ini memiliki tujuan yang baik. ©Deddy



Gus Dur Tak Restui Pemutaran Kaset Pengajian Keras-keras Di Masjid



Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, mengatakan apa yang dianjurkan JK agar masjid tidak lagi memutar kaset pengajian keras-keras sama seperti apa yang pernah disampaikan oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Sejak tahun 1982, Gus Dur sudah melarang pengajian dengan kaset suara keras di masjid di luar waktunya. Apa yang dianjurkan Pak JK sama dengan anjuran mendiang Gus Dur," ucap dia, Kamis (11/6) malam.

Menurut dia, JK menilai pengajian

sedianya dilakukan secara langsung dan bukan melalui kaset. Tidak hanya itu, perlu juga diatur kapan pengajian di masjid bisa digelar dan berapa lama durasinya, dengan harapan agar suara pengajian di masjid tidak mengganggu warga sekitar.

"Kalau kaitan dengan waktu shalat subuh, *timing* dan durasinya perlu diatur agar tidak mengganggu tidur saudara-saudara kita yang pulang tengah malam habis kerja hingga dini hari. Waktu istirahat beberapa menit sangat penting," kilah Husain.

Sebaiknya, sambung dia pengajian berlangsung selama lima hingga tujuh menit persis sebelum masuk waktu subuh.

Dengan demikian menurut Husain anjuran JK untuk mengatur pengajian di masjid ini jangan disalahtafsirkan. Pasalnya JK hanya berniat untuk mengingatkan agar umat Islam tidak meninggalkan kebiasaan mengaji dengan hanya menyyetel kaset pengajian. ©Deddy



KPK MELEMAH KARENA “KITA”

Kekecewaan tidak dapat disembunyikan oleh Yudi Kristiana, Anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5). Sore itu KPK kembali kalah dalam praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan korupsi mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Hebatnya, Hadi menang tanpa didampingi penasehat hukum.

ANTARA



Mantan Ketua BPK Hadi Poernomo (tengah) berjalan meninggalkan ruang pengadilan usai mengikuti sidang putusan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5). Hakim memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan permohonan keberatan pajak oleh PT. BCA pada tahun 1999.

Haswandi dalam putusannya menyatakan legalitas penyidik yang diangkat oleh KPK. Hakim menyatakan bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan Dadi Mulyadi dan penyidikan yang dilakukan Ambarita Damanik tidak sah. Pasalnya, Dadi tidak menyangsang status penyidik pegawai negeri sipil di instansi asalnya di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Status Dadi hanya sebatas sebagai auditor.

Ambarita, kata Haswandi, telah diberhentikan secara terhormat dari Polri sejak 25 November 2014. Dengan demikian, status penyidik yang sebelumnya melekat kepadanya telah hilang sejak ia diberhentikan. "Pengadilan tidak sependapat dengan pernyataan ahli termohon yang menyatakan KPK dapat mengangkat penyidik independen. Bahwa dalam hal tidak memberikan peluang kepada KPK untuk mengangkat penyidik dan penyidik sendiri, maka pengangkatan penyidik dan penyidik independen batal demi hukum," ujarnya.

Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga merugikan keuangan negara saat mengabulkan permohonan keberatan bayar pajak PT Bank Central Asia. Bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan itu diyakini KPK membuat negara kehilangan pajak penghasilan dari koreksi penghasilan BCA senilai Rp 5,5 triliun. Menurut perhitungan KPK, negara merugi Rp 375 miliar.

KPK menjerat Hadi dengan Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Pasal-pasal itu mengatur soal penyalahgunaan

wewenang yang dilakukan secara bersama-sama dan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Namun putusan Haswandi menggugurkan sangkaan KPK.

Mantan anggota Dewan Analisa Strategis pada Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut menyambut dengan sederhana kemenangan tersebut. Peci hitam yang disimpan di bawah meja dipakai sesaat sebelum menghampiri para pendukung. "Ini suatu proses hukum saat saya ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21 April 2014 bahwa saya akan ikuti hukum yang berlaku," ujar Hadi seusa sidang.

Ini kekalahan ketiga KPK dalam proses praperadilan. Kekalahan beruntun KPK di pengadilan merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Putusan pengadilan terhadap empat pihak berperkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan merupakan bentuk 'koreksi' atas proses hukum di KPK.

Lembaga *ad hoc* yang berkantor di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan itu sudah saatnya melakukan introspeksi. Selanjutnya melakukan perenungan untuk kemudian membenahi diri guna menghadapi kompleksitas permasalahan hukum ke depan.

"Itu kemenangan rakyat," tegas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, akhir bulan lalu.

Berkaca pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK sebenarnya bisa membaca lebih dini kekalahan demi kekalahan yang bakal menimpa. Sayang, hasil audit itu hanya dijadikan pepesan kosong tak berarti. Hasil audit menjadi tumpukan data tak berarti. KPK terus-terusan khilaf melakukan proses penanganan perkara.

Padaahal, audit kinerja BPK terhadap KPK dengan jelas menunjukkan bagaimana kurang ketatnya SOP dibidang penindakan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam prosesnya, ada prosedur yang seharusnya dilalui namun dilangkahi. Dan, proses itu terus berulang. Fahri

Tak menunggu lama Yudi langsung mewacanakan maratorium semua proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK. "Secara pribadi, tidak ada urgensinya lagi KPK melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi kalau berdasarkan konstruksi berpikir seperti ini, sampai UU KPK diubah, kami usulkan untuk moratorium," kata Yudi.

Terlebih lagi hakim tunggal



dengan jelas menyebutkan bagaimana seluruh proses penetapan tersangka oleh KPK bermasalah.

Sebab itu ia merasa kasihan terhadap sejumlah mantan tersangka KPK. Dari Komjen Pol Budi Gunawan (BG), mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sampai Hadi.

Ketiganya tercatat 'menjungkalkan' KPK di PN Jaksel. Dimulai dari BG yang putusannya oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi dinyatakan bahwa penetapan tersangka BG oleh KPK tidak sah secara hukum, 16 Februari 2015. BG sebelumnya dijadikan tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut.

Selanjutnya pada 12 Mei 2015, penetapan tersangka mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin juga dianulir hakim tunggal Yuningtyas Upiek. Ilham sebelumnya ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.

Terbaru adalah putusan gugatan praperadilan penyidik KPK Novel Baswedan, 9 Juni 2015. Dalam putusannya, hakim tunggal PN Jaksel Zuhari menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh penyidik KPK Novel Baswedan terkait penangkapan dan penahanannya oleh Bareskrim Polri.

Dalam catatan *Aktual*, sebenarnya masih ada satu lagi penanganan perkara KPK yang dimentahkan di pengadilan. Pada 19 April 2012 silam, mantan hakim Syarifuddin Umar mempraperadilan KPK secara perdata atas penyitaan dan pengeledahan di luar barang bukti di rumah Syarifuddin.

Hakim Matheus Samiadji yang memimpin jalannya persidangan saat itu, dalam putusannya menyatakan bahwa penyitaan di luar barang bukti dianggap sebagai tindakan yang melebihi kewenangan. Putusan meminta KPK membayar ganti rugi sebesar Rp100 juta dan mengembalikan uang Rp2 miliar milik Syarifuddin yang sebelumnya disita KPK.



Plt Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki mengikuti rapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/5).

Namun tidak dapat dipungkiri menurunnya kinerja KPK tidak lepas dari pergantian rezim dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo. Jokowi presiden yang terpilih dengan slogan "Jokowi-JK adalah Kita" tersebut merubah pola komunikasi KPK dengan lembaga Kepresidenan. Sejak awal pemerintahan Jokowi, hubungan antara lembaga Kepresidenan dengan KPK sering memanas. puncaknya saat KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka usai diusulkan sebagai calon Kapolri oleh Presiden. Namun kemudian pengadilan memutuskan Budi tidak bersalah dalam gugatan praperadilan.

Dengan adanya beberapa putusan itu secara langsung menunjukkan bagaimana proses hukum di KPK kerap dilakukan dengan melanggar Undang-Undang dan KUHP. Hal demikian sebenarnya sudah lama diperhatikan Fahri. Hanya saja, popularitas KPK menenggelamkan kritik yang dilayangkan ke lembaga anti rasuah.

"Sekarang sudah terbongkar dan terbukti, KPK sering melakukan tindakan hukum *projusticia* yang melanggar undang-undang dan KUHP," ucap Fahri.

"Ini harus kita anggap sebagai masalah besar di dalam tata kelola penegakan hukum. Selama ini, banyak orang protes termasuk saya, tetapi karena popularitas KPK tinggi tidak pernah didengarkan," lanjutnya.

KPK disebut politisi PKS itu juga kerap berjalan sendiri dalam proses



AKBP Hendi F Kurniawan memberikan kesaksian dalam sidang praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Februari lalu.

penegakan hukum. Kesan yang muncul ke permukaan KPK berlomba dengan Polri dan Kejaksaan dalam penegakan hukum. Padahal, keberadaan KPK seharusnya melakukan supervisi ke Kejaksaan dan Polri.

Dampak dari itu semua, KPK bukan saja kelelahan dalam memberantas korupsi. Akan tetapi juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan Polri dan Kejaksaan. Bahkan, hubungan yang kurang baik terjadi dengan legislatif.

“Seharusnya kerja sama dengan kita, jangan bilang ada mafia jika tak bisa menunjukkan. Buktinya juga polisi dan jaksa tidak dekat dengan mereka,” jelasnya.

Kekalahan demi kekalahan KPK,

selain telah 'diperingatkan' BPK, sebelumnya juga telah disampaikan mantan penyidik yang telah ditarik Polri, Hendy F Kurniawan. Bagaimana pimpinan KPK dengan gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa melalui prosedur yang benar.

Bahkan, suatu ketika pimpinan KPK pernah menetapkan seseorang menjadi tersangka dengan mengacung-acungkan map kosong. Padahal tidak ada dua alat bukti yang kuat yang ditemukan penyidik menjerat orang dimaksud. Ia tidak membual dan siap membuktikan ucapannya.

“Ada juga tersangka yang diumumkan hanya diacung-acungkan map kosong. Saya berani bicara begini saya punya fakta, punya rekaman dan dokumen,” ungkap Hendy, pertengahan Februari lalu.

Disampaikan dia, dalam proses penyelidikan di KPK kerap dilakukan dengan tidak melalui prosedur yang ada. Standar Operasional Prosedur (SOP) terus-terusan ditabrak. Disebutkan bagaimana surat perintah penyidikan (Sprindik) acapkali hanya ditandatangani oleh satu pimpinan namun langsung diumumkan ke media.

Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki mengatakan paska dikabulkannya gugatan

praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan pertengahan Februari lalu, kondisi KPK tidak menentu. Putusan praperadilan BG menjadi muara terhadap lambannya penanganan perkara di Kuningan.

“Ada dinamika organisasi sejak Januari sampai hari ini. Tentunya hal itu menyebabkan pelambatan kerja. Saya mengakui itu. Saya tidak mau munafik,” ucap Ruki di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6) pekan lalu.

Ia tidak menginginkan kondisi demikian terus berlanjut. Sebab itu ke depan Ruki berjanji melakukan pembenahan internal KPK dalam menangani suatu perkara korupsi. Salah satunya dengan harapan tidak lagi menelan kekalahan setelah digugat sejumlah tersangka korupsi.

Proses penyelidikan tetap berjalan dengan penekanan pada penajaman proses dan prosedur penanganan. Apabila nantinya ditemukan perkara yang menurut pimpinan belum sesuai ketentuan maka ia tidak segan menghentikan terlebih dulu.

“Saya tetap menggunakan istilah kalah. Saya tidak mau lagi pengadilan bilang tidak cukup bukti. Intinya saya mau *proper* dalam bekerja. Kalau matang dijalankan, kalau masih ada keraguan dan kurang kita tambahkan, kurang dalam kita runcingkan,” tambah Ruki. Scimitro-Saifan



POLISI LEBIH BERNYALI

Acungan jempol layak diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) khususnya kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) atas kinerja yang ditunjukkannya belakangan ini. Dengan unjuk taring Bareskrim Polri berhasil mengungkap beberapa kasus yang dinilai membawa kerugian negara hingga triliunan Rupiah.

Apresiasi tersebut diberikan langsung oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Neta menyatakan Polri khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri selangkah lebih maju dari aparat penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam persoalan pengungkapan kasus-kasus besar dugaan korupsi di tanah air.

"Banyak pihak berpendapat bahwa saat ini Bareskrim tampaknya selangkah lebih depan daripada penegakan hukum lainnya seperti KPK dan Kejagung. Dan ini kami apresiasi," kata Neta, di Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Lebih lanjut Neta berharap agar posisi Bareskrim Polri yang kini berada pada posisi *on the track* ini tetap terus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang mengusung motto mengayomi dan melayani masyarakat terus meningkat.

"Kondisi ini harus tetap dipertahankan agar Polri kian dipercaya masyarakat. Dan Polri juga diwajibkan harus bisa secepatnya berkoordinasi dengan ke Kejaksaan Agung ataupun KPK agar masyarakat tidak menuding Polri hanya gertak sambal dan membangun citra belaka dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum yang ada di Indonesia," tandas Neta.

Bedah Kasus Perkaso
Yang menjadi

pertanyaan kemudian, kasus apa saja yang kini tengah diusut oleh pihak Bareskrim Polri? Menurut Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak, penyidik kini tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Kasus-kasus yang kini ditangani tersebut diantaranya yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada Tahun 2009, dimana SKK Migas melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI, tetapi tidak lewat ketentuan.

Adapun ketentuan yang dimaksud oleh Victor adalah Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Konsensat Bagian Negara.

Tindakan tersebut kata Victor kemudian dinilai telah melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor



20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menimbulkan kerugian negara sekitar USD156 juta (sekitar Rp2 triliun).

Selain kasus TPPI, pengungkapan kasus besar dugaan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Bareskrim, menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Polri

Budi Waseso





Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Dahlan Iskan keluar usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (4/6). Pemeriksaan Dahlan Iskan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait korupsi proyek pembangunan 21 Gardu Listrik Jawa-Bali-Nusa Tenggara.

Komisaris Jenderal Budi Waseso telah dikordinasikan terlebih dahulu dengan KPK dengan bertujuan untuk mengetahui apakah KPK pernah melakukan penyidikan kasus tersebut, atau belum.

"Saya ingin melakukan sinergi apakah kasus ini sudah pernah ditangani KPK atau belum. Jika nanti belum, maka saya juga berharap agar KPK ikut mengawasi penanganan kasus yang akan saya tangani," ujar Budi di Bareskrim Polri, beberapa waktu lalu.

Budi kemudian memastikan, jika timnya telah melakukan beberapa

kali pemeriksaan dan menemukan alat bukti terkait kasus besar tersebut yang hasilnya akan dikordinasikan dengan KPK. Dan jika Bareskrim telah menetapkan satu tersangka, KPK juga akan mengetahui hasilnya.

Kasus Bos Media

Kasus besar kedua yang tengah disidik oleh Bareskrim Polri, diduga melibatkan Mantan Menteri BUMN dan Bos Media Nasional, Dahlan Iskan. Pada kasus ini, penyidik tengah melakukan pengusutan dugaan korupsi dalam pelaksanaan jasa konsultan dan konstruksi

percepatan sawah yang terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2014 lalu oleh Kementerian BUMN di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Menurut Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso, pihaknya berencana akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Dahlan Iskan.

Budi mengatakan keterangan dari Dahlan dibutuhkan pihaknya untuk keperluan pengungkapan kasus yang menelan biaya total pembangunan proyek sebesar Rp317 miliar itu.

"Iyalah. Pastilah. Beliau pasti dipanggil untuk dimintai keterangan.



Karena salah satu penanggung jawabnya beliau pada saat itu," ungkap Budi di Bareskrim Mabes Polri, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, Budi mengaku hingga kini pihaknya belum mengetahui peran Dahlan Iskan dalam kasus dugaan korupsi itu.

"Nanti kita lihat ya hasil keterangan pemeriksaan saksi-saksi. Beliau (Dahlan) posisinya seperti apa," ucap Budi.

Budi menambahkan, pada kasus cetak sawah ini tidak sekedar pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan dan saksi lainnya, penyidik juga segera melakukan penyitaan sejumlah barang bukti terkait dokumen pembangunan proyek pencetakan sawah tersebut. Tak sekedar itu saja, penyidik juga akan meminta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait nilai kerugian negara atas dugaan korupsi itu. "Saya belum tahu persis karena kita belum memintakan auditnya dari BPK. Nanti kita baru selidiki. Untuk mengungkap benar tidaknya nanti kita lihat prosesnya," elak Budi.

Sebelumnya diberitakan, sampai Kamis 28 Mei 2015, sebanyak 20 saksi telah diperiksa penyidik atas kasus dugaan korupsi itu. Pemanggilan oleh Bareskrim ditujukan kepada mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Karen Agustiawan, Dirut PT PGN Upik Hendi Priyosantoso, dan Dirut PT Sanghyang Raslina Wasrin sebagai saksi atas kasus itu. Namun demikian, ketiganya tidak juga menampakkan batang hidungnya di Bareskrim Polri guna keperluan pemeriksaan.

Berdasarkan data yang dimiliki Majalah Aktual, proyek cetak sawah bernilai Rp317 miliar itu pengerjaannya dipercayakan pada PT Sang Hyang Seri. Selanjutnya perusahaan tersebut melempar proyek kepada PT Utama Karya, PT Indra Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Yodya Karya.

Proyek tersebut diduga fiktif, hal tersebut didapat dari keterangan



Vice President Integrated Supply Chain (VP) Daniel Syahputra Purba (tengah) saat mengisi diskusi di media center, Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Kasubdit I Tipidkor Bareskrim Polri, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ade Deriyana.

Ade mengatakan proyek tersebut diduga fiktif. Hal tersebut didapati berdasarkan informasi dari penyidik.

"Mereka berkesimpulan sawah-sawah itu fiktif. Fiktif itu begini ada sawah 3.000 hektare. Yang ada itu 1.000 hektare, bukan 3.000 hektare," ungkap Ade di Jakarta, Kamis (28/5).

Berdasarkan penyidikan sementara kata Ade, penyidik telah mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek yang digagas Kementerian BUMN kala itu. Tentu saja hasil atas temuan tersebut kemudian ditingkatkan ke proses penyidikan.

Proyek cetak sawah yang diprakasai oleh Kementerian BUMN dibiayai dengan dana patungan sejumlah Badan Usaha Milik Negara seperti Bank Negara Indonesia, Askes, Pertamina, Pelabuhan Indonesia, Utama Karya, Bank Rakyat Indonesia, dan Perusahaan Gas Negara.

Dahlan Iskan sendiri pernah meresmikan proyek perdana cetak sawah dengan penanaman padi perdana skala besar di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Senin (17/12/2012) silam.

Di Kabupaten Ketapang disediakan lahan seluas 3000 hektare

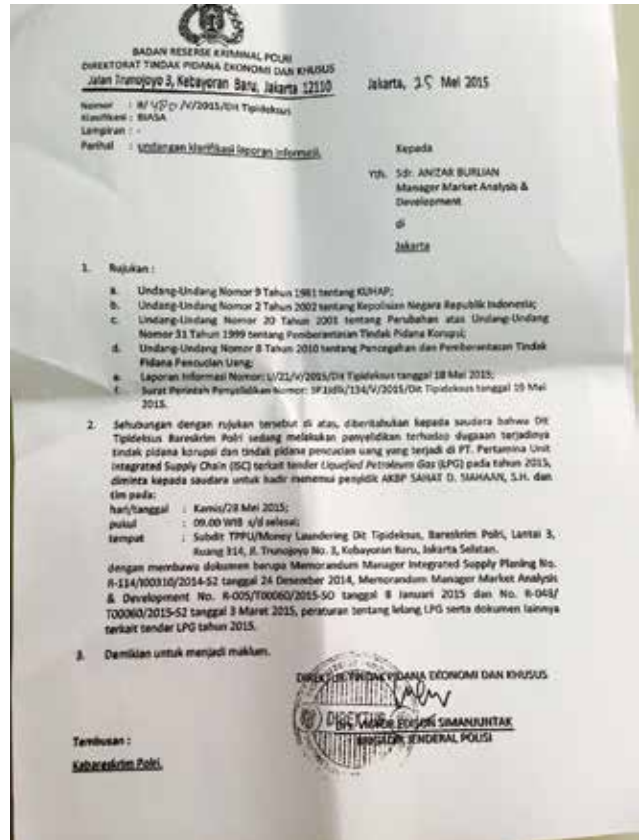
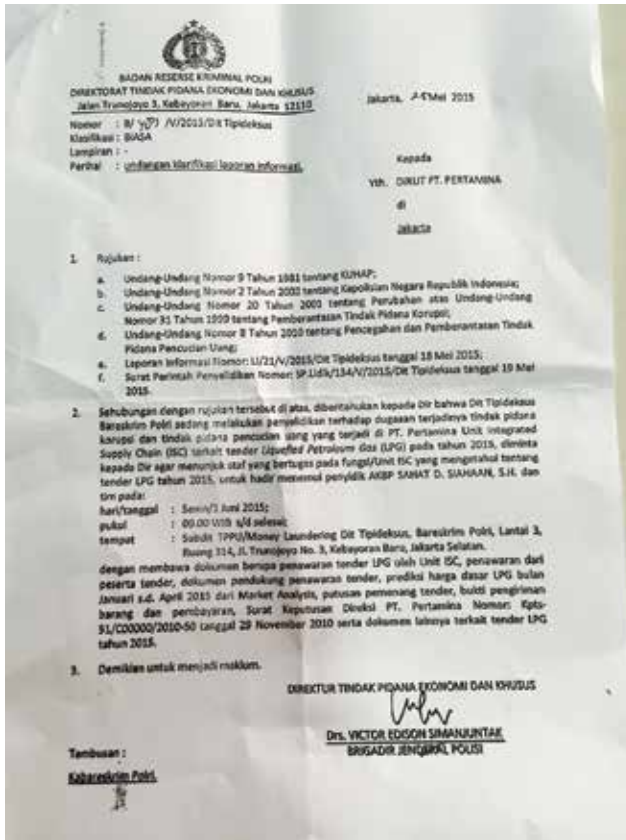
tahap pertama., sementara lahan yang tersedia mencapai 30 ribu hektare.

Tahap selanjutnya ditargetkan berkembang menjadi 30 ribu kemudian 50 ribu dan menjadi 100 ribu hektare. 3.000 lahan adalah milik petani, tetapi pengelolaannya diperbantukan kepada BUMN. Pengembangan sawah berskala besar ini ditargetkan menghasilkan 5 ton padi per hektar.

Pada kasus cetak sawah fiktif ini ditemukan dugaan tindak pidana korupsi atas proyek tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1.

Penyidikan Kasus Gedebage

Sementara itu, penyidik Bareskrim Polri juga melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api (SUGBLA) di Gedebage, Bandung, Jawa Barat. "Sudah diperiksa 84 orang saksi," jelas Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus di Jakarta, Sabtu (30/5/2015).



Pihaknya, aku Ahmad Wiyagus telah menetapkan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, YAS sebagai tersangka dalam kasus tersebut. "Modus operandinya penyalahgunaan wewenang dengan cara melawan hukum," jelas dia.

Penyidik sambung dia juga telah melakukan penggeledahan kantor salah satu kontraktor pelaksana pembangunan Stadion SUGBLA, yakni kantor PT Adhi Karya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, rumah tersangka YAS, dan kantor konsultan perencana, PT PR di Setrasari Mall Bandung.

Mabes Polri dan Polda Jawa Barat hingga kini terus mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan stadion dengan nilai proyek Rp 545.53 miliar itu.

YAS sendiri dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Proyek ISC Pertamina Juga Disasar Bareskrim

Bareskrim juga terus mendalami kasus dugaan kecurangan tender LPG yang diadakan oleh PT Pertamina (Persero), termasuk Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.

Bareskrim Polri kini tengah melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tender tersebut. Pada penyelidikan itu, Bareskrim diketahui telah melayangkan pemeriksaan terhadap Manager Market Analysis dan Development ISC Pertamina, Anizar Burlian pada 28 Mei 2015 lalu. Bahkan, Bareskrim juga memanggil Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto.

Berdasarkan data Majalah Aktual, PT Pertamina (persero) melalui unit usahanya ISC pada 23 Februari

2015 lalu mengadakan tender LPG yang terdiri dari 22.000 MT butane dan 22.000 MT propane. Namun ISC-Pertamina menabrak aturan yang mereka buat sendiri. Pasalnya, dalam penawaran tender ke peserta disebutkan untuk *pricing* dan *loading* bulan April 2015.

Tetapi kemudian, ISC-Pertamina justru memenangkan Total dengan *pricing* Maret 2015. Dari data yang diterima Aktual, terdapat kerugian perusahaan dan negara mencapai USD400.000 atau sekitar Rp5,2 miliar. Perhitungan kerugian berdasarkan atas perbedaan harga CP Aramco pada bulan Maret 2015 di harga USD480/MT dan bulan April 2015 di harga USD465/MT.

Pekan lalu Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dimintai keterangan dalam proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri. Namun Dwi tidak bersedia hadir. Keterangan yang dihimpun Aktual, Dwi mengutus bawahannya untuk menjawab pertanyaan penyidik. [@ Sahlan, Dedy K](#)



SAATNYA **KPK** PURNA TUGAS

Pamor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penumpas kejahatan korupsi mulai pudar. Selain minim prestasi, kinerja lembaga anti rasuah ini pun ternoda oleh kekalahan dalam prapradilan, yang menunjukkan bahwa KPK melakukan tindakan hukum yang tak sesuai dengan peraturan perundangan.

Kemunduran kinerja KPK ini sebenarnya dibarengi dengan

keberhasilan menjalankan fungsinya sebagai penobar virus anti korupsi di Indonesia. KPK pun sudah sukses men-*trigger* Polri yang saat ini sedang *on-fire* dalam menumpas kejahatan rasuah.

Ketika kinerja KPK menurun dan Bareskrim Polri semakin garang menumpas korupsi, maka perdebatan lama apakah KPK lembaga permanen atau lembaga *ad hoc* kembali muncul. Sejumlah kalangan menilai masalah ini akan menghangat, khususnya saat pembahasan revisi UU KPK dan UU Tipikor yang sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR 2015-2019.

Revisi UU KPK ini sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019 dalam urutan nomor 63. Selain itu, RUU pemberantasan Tipikor juga masuk prolegnas dengan urutan 37.

Pondasi pembentukan KPK pada dasarnya dapat di-*otak-atik*. Istilah KPK sebagai lembaga *ad hoc*

memang sempat dibantah oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai KPK adalah lembaga permanen karena dibentuk oleh UU, bukan dengan Peraturan Presiden. Namun sebuah UU dapat direvisi oleh DPR dan pemerintah sehingga keberadaan KPK ini pun dapat saja dipertimbangkan kembali.

“Revisi terhadap UU KPK itu diajukan DPR dan masuk dalam prolegnas 2015-2019. Naskah akademiknya juga sudah ada,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR, Firman Subagyo.

Politikus Golkar ini meminta semua pihak berkepal dingin

menyikapi kondisi KPK saat ini yang kerap berseteru dengan Kepolisian. Revisi UU KPK pun jangan dipandang negatif karena revisi itu harus dilakukan karena terdapat beberapa pasal yang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Malah bukan KPK saja yang direvisi. UU Kepolisian dan Kejaksaan juga kita masukan untuk dievaluasi kembali bagaimana menata penegakan hukum jangan sampai satu sama lain saling membunuh. Itu semangat yang kita bangun,” tukas Firman.

Pembahasan revisi UU KPK tersebut, lanjut Firman, rencananya akan dimulai tahun 2016. Sebab komisi III DPR yang membidangi masalah hukum masih fokus pada pembahasan revisi KUH



yang menjadi prioritas. Setelah pembahasan RKUHP selesai akan dilanjutkan dengan revisi KUHAP. Baru setelah KUHAP dan KUAHP selesai, Komisi III akan melakukan pembahasan terhadap RUU KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. "RKUHAP dan RKUHP menjadi pintu masuk dalam pembahasan RUU KPK," tegas Firman

Secara terpisah, Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengaku sangat sering menerima usulan agar UU KPK dan UU Pemberantasan Tipikor segera direvisi. Namun usulan itu jangan dipandang negatif karena justru yang ditonjolkan adalah penguatan upaya memberantas korupsi. UU KPK dinilai memiliki banyak kelemahan, misalnya adanya sengkabut persetujuan KPK-Polri munculnya wacana hak imunitas bagi pimpinan KPK yang belum diatur dalam UU No.30 Tahun 2002.

Masalah lain yang belum diatur dalam UU KPK terkait adanya pimpinan KPK yang tersandung kasus hukum agar non aktif, dan bagaimana dengan sisa jabatannya. Termasuk bagaimana dengan sisa pimpinan KPK yang kurang dari lima orang dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kolektif kolegial. "Ini semua kan belum diatur secara jelas dalam UU KPK. Makanya revisi itu harus dilakukan," ucapnya.

Revisi UU KPK, lanjut Sudding, harus dilihat sebagai upaya menguatkan *integrated criminal justice system* dalam penegakan hukum dengan kejaksaan, kepolisian dan peradilan. UU KPK nantinya akan disinkronkan dengan UU lembaga penegak hukum lainnya agar saling bersinergi.

"Kalau sekarang banyak permasalahan yang muncul KPK dan Polri selalu terjadi. Untuk menghindari itu harus ada pemikiran bagaimana saling

bersinergi satu sama lain, nah ini yang mau disempurnakan," jelas Sudding.

Politikus Hanura ini menilai KPK selama ini memang sukses menanamkan opini di masyarakat. Bahkan DPR kerap dituding melakukan upaya pelemahan KPK, padahal semangat yang dibangun DPR justru untuk memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi. Karena itu dia meminta agar KPK tidak menjejali masyarakat dengan opini negatif terhadap lembaga lain.

"Jangan masyarakat dijejali stigma-stigma yang menggerus intitusi penegakan hukum itu sendiri. Misalnya stigma ada kriminalisasi, politisasi, penzaliman dan sebagainya. Masyarakat jangan diberi suatu informasi yang menyesatkan," tandas Sudding.

KPK sendiri selama ini menjadi lembaga *superbody* dengan kewenangan yang kuat. Lembaga yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan ini memiliki kewenangan lebih dibanding Kepolisian, terutama kewenangan menyadap dan kewenangan menyidik sekaligus menuntut dalam satu paket. Sayangnya kewenangan yang kuat ini belakangan tidak diimbangi dengan prestasi yang memadai dalam beberapa bulan terakhir. Alih-alih memberantas korupsi, KPK justru dinilai melanggar aturan hukum karena menetapkan tersangka dengan memakai penyidik yang tidak sah alias ilegal.

Gerakan Manusia Pancasila (GEMPA) menyebut KPK lebih sering menjadi sebagai sumber kegaduhan politik dibanding menjalankan fungsi memberantas korupsi. Ketua GEMPA Willy Prakarsa mengatakan bahkan menilai lembaga KPK hanya pintar menggalang opini dan kerap dijadikan alat politik

tertentu.

"Jika KPK dijadikan alat sebagai komoditas politik, maka segera bubarkan KPK karena sebagai sumber kegaduhan," ujar Willy Prakarsa.

Lebih jauh Willy mengingatkan bahwa KPK adalah lembaga *ad hoc*. Instruksi UUD 1945 untuk berantas para koruptor yang merongrong keuangan negara secara konstitusi diberikan kepada institusi Polri dan Kejaksaan. "Beda dengan KPK, OJK, atau pun PPAT yang dibentuk atas dasar UU. Jadi posisi KPK ini tentu bisa dibahas lagi," cetusnya.

Mlempe-nya KPK menambah keyakinan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menyuarakan pendapatnya tentang kebobrokan lembaga tersebut. *Hattrick* kekalahan KPK dalam gugatan praperadilan menjadi bukti mutakhir, bahwa KPK sudah melakukan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Sekarang sudah terbongkar dan terbukti, KPK sering melakukan tindakan hukum *projusticia* yang melanggar undang-undang dan KUHAP. Praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo itu bukti mutakhirnya," kata Fahri.

Fahri juga menegaskan bahwa publik akan mulai sadar bahwa selama ini mereka termakan oleh opini yang digalang KPK tentang pemberantasan korupsi. Kekalahan dalam praperadilan adalah masalah besar, apalagi dalam gugatan praperadilan itu terkait dengan keabsahan penyidik yang dipakai KPK untuk menjerat seseorang menjadi tersangka.

"Ini harus kita anggap sebagai masalah besar di dalam tata kelola penegakan hukum. Kinerja KPK selama ini perlu diaudit. Kalau tidak, penyidik bisa seenaknya menetapkan orang tersangka seperti membuat judul berita. Kemudian selama ini banyak orang protes, termasuk saya. Tetapi karena popularitas KPK tinggi maka tidak pernah didengarkan," tuntas Fahri. Moh Sahlan

Sarifuddin Sudding



Korespondensi Ari Soemarno di TPPI

Tumpukan file dokumen dari PT Pertamina (Persero) secara seksama diamati para Penyidik Bareskrim Polri. Mereka memilah-milah dokumen dan surat-surat penting untuk mendalami kasus korupsi penjualan kondesat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang merugikan negara sebesar Rp 6 triliun.

Sebuah surat dan proposal penting pun ditemukan, yakni dokumen dari TPPI tertanggal 28 Agustus 2007 yang ditandatangani langsung oleh President Director & CEO TPPI Honggo Wendratno. Surat itu ditujukan kepada Ari Soemarno selaku Presiden Direktur PT Pertamina (Persero). Melalui surat inilah, Honggo mengajukan proposal pengantaran Senipah dan pembayaran Kerosene untuk mendukung perdagangan TPPI.

Pertamina dan TPPI setidaknya sudah lebih dari 12 kali saling menyurati. Kerjasama erat antara TPPI dengan Pertamina muncul setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 2007-1998, atau kurang dari dua tahun setelah TPPI didirikan pada 9 Oktober 1995. Ide pendirian TPPI ini sebenarnya sangat strategis, yakni agar Indonesia memiliki sebuah kompleks kilang penghasil aromatics (Phase I) dan Olefins (Phase II) terpadu yang besar dan memadai.

Kilang TPPI diharap dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produk hulu petrokimia yang banyak dibutuhkan oleh industri dalam negeri, selain untuk memberikan tambahan pasokan produk petroleum seperti gasoline, kerosene, dan diesel untuk kebutuhan dalam negeri.

Pendirian TPPI saat itu memakai skema patungan, masing-masing PT Tirtamas Majutama Group (TMG) dengan saham 70%, kemudian Siam

Cement 20%, Nissho Iwai 5%, serta Itochu 5%. Konstruksi pembangunan kilang petrokimia dimulai pada 1996 dengan lokasi di Tanjung Awar-Awar, Tuban, Jatim. Kilang petrokimia terpadu ini direncanakan memiliki kapasitas produksi aromatic dan olefins sebesar 3,5 juta metric ton per onnum (MTPA) dengan total nilai proyek sebesar USD2,5 miliar.

Ketika proses konstruksi kilang itu baru setengah jalan, badai krisis ekonomi Asia tahun 1997 menerpa. Konstruksi akhirnya dihentikan dan menyisakan banyak utang. Ketika dihentikan, pembangunan kilang aromatic (Phase I) sudah mencapai 64% dengan

biaya yang sudah dikeluarkan sebesar USD600 juta dan dengan utang yang sudah digali sebesar USD30 juta. Ada pun pembangunan kilang ofelins (Phase II) baru 43% dengan biaya yang sudah dikeluarkan sebesar USD290 juta dan utang yang sudah digali sebesar USD120 juta.

TPPI saat itu mengkalkulasi, pembangunan kilang aromatic baru bisa dituntaskan jika ada dana tambahan sebesar USD400 juta plus modal kerja USD75 juta. Sedangkan kebutuhan dana tambahan untuk pembangunan kilang ofelins akan dikaji bila kilang aromatic sudah selesai.

Alih-alih melanjutkan pembangunan, PT Tirtamas Majutama Group (TMG) selaku induk TPPI justru memiliki sejumlah kewajiban substansial kepada Badan Penyelihat

Ari Soemarno

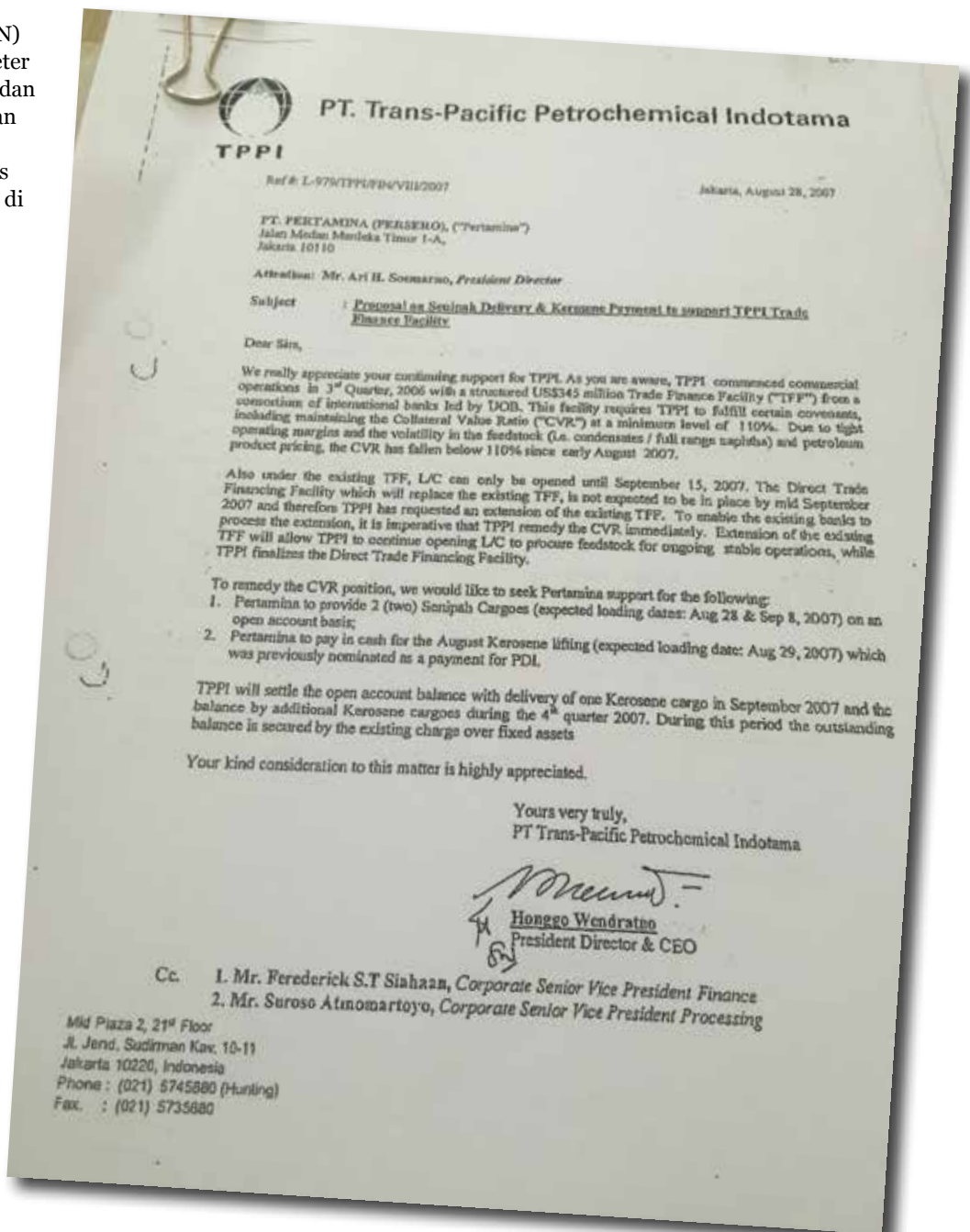


Perbankan Nasional (BPPN) akibat terpaan krisis moneter 1997. Untuk itulah, BPPN dan TMB bersepakat melakukan restrukturisasi kewajiban membayar utang, sekaligus melakukan restrukturisasi di TPPI.

Dari sinilah jalinan kerjasama antara TPPI dan Pertamina semakin erat. Perusahaan TPPI yang dipimpin Honggo Wendratno menggandeng Pertamina yang dipimpin Ari Soemarno untuk menggalang pendanaan. Kemudian dalam sebuah rapat tanggal 29 Juni 2001, dicapai empat kesepakatan yang kemudian menambah rumit masalah.

Kesepakatan itu meliputi skema penyelesaian proyek; penyelesaian proyek memakai mekanisme product swap antara Pertamina dan TPPI; mobilisasi pendanaan dari lenders sebesar USD400 juta yang dijamin Pertamina untuk penyelesaian proyek; dan sebagai insentif Pertamina mendapat bagian saham TPPI sebesar 10% tanpa dikenakan biaya apa pun.

Sejak saat itu, lebih dari 12 kali Honggo Wendratno saling berkiriman surat dengan Pertamina yang ditembuskan kepada Ari Soemarno. Melalui sebuah surat pada tahun 2007 pula, Honggo atas nama CEO TPPI memberikan apresiasi kepada PT Pertamina atas kerjasamanya bisa mendapatkan Trade Finance Facility (TFF) senilai USD345 juta dari konsorsium perbankan yang dipimpin UOB. Fasilitas tersebut untuk memenuhi perjanjian Collateral Value Ratio



Dokumen dari TPPI tertanggal 28 Agustus 2007 yang ditandatangani langsung oleh President Director & CEO TPPI Honggo Wendratno

(CVR) atau rasio nilai agunan pada level minimum 110 persen. Namun pada pelaksanaannya, di pasar terjadi perubahan harga kondensat dan petroleum yang mengakibatkan CVR jatuh di bawah 110 persen sejak Agustus 2007.

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa untuk menolong jatuhnya CVR, TPPI meminta bantuan Ari Soemarno selaku orang nomor satu di Pertamina agar melakukan berbagai kebijakan. Misalnya Pertamina diminta menyediakan dua kargo senipah (loading 28 Agustus dan 8 September 2007) dengan basis terbuka. Kemudian Pertamina diminta

membayar tunai lifting kerosene bulan Agustus yang sebelumnya disepakati pada Product Delivery Instrument (PDI).

Pertamina kemudian membuat surat balasan tentang persetujuan untuk mengirim dua kargo senipah dengan 60 hari akun basis terbuka. Disampaikan pula beberapa permintaan Pertamina, diantaranya kondensat senipah di harga ICP+USD3,20 plus alpha. Alpha yang dimaksud adalah USD0,5. Kemudian TPPI akan menyediakan 5.000 ton benzene setiap dua bulan untuk Pertamina dan petral. Permintaan lainnya adalah agar TPPI memberikan prioritas kepada Pertamina atau Petral untuk pembelian paraxylene.

Melihat kedekatan antara TPPI dan Pertamina ini, banyak kalangan menilai sangat tidak masuk akal jika pengusutan kasus TPPI dengan tersangka Honggo Wendratno tidak dikaitkan dengan Ari Soemarno yang saat itu menjabat Dirut Pertamina. Padahal penyidik sudah memeriksa 30 saksi, baik dari pihak SKK Migas, TPPI, maupun Kementerian ESDM. Penyidik juga telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni DH, RP dan HW. Namun khusus HW alias Honggo Wendratno belum diperiksa karena mengaku sakit di Singapura.

Deputi Advokasi dan Kebijakan LBH Solidaritas Indonesia, Ahmad Suryono mengatakan, Ari Soemarno memang harus dipanggil jika memang Bareskrim Polri ingin mengusut tuntas kasus TPPI. Jika Ari Soemarno tidak diusut, jelas akan muncul kecurigaan bahwa Bareskrim Polri terbang pilih sehingga citra Polri pun bisa luntur ketika menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi.

"Bareskrim jangan pilih kasih. Semua yang terkait wajib diperiksa termasuk mantan Dirut Pertamina Ari Soemarno dan Karen Agustiawan. Mereka harus menjelaskan posisi kondensat tersebut supaya jelas alur pertanggungjawabannya," ujar Ahmad Suryono di Jakarta, pertengahan Juni 2015.

Analisis ekonomi politik dan

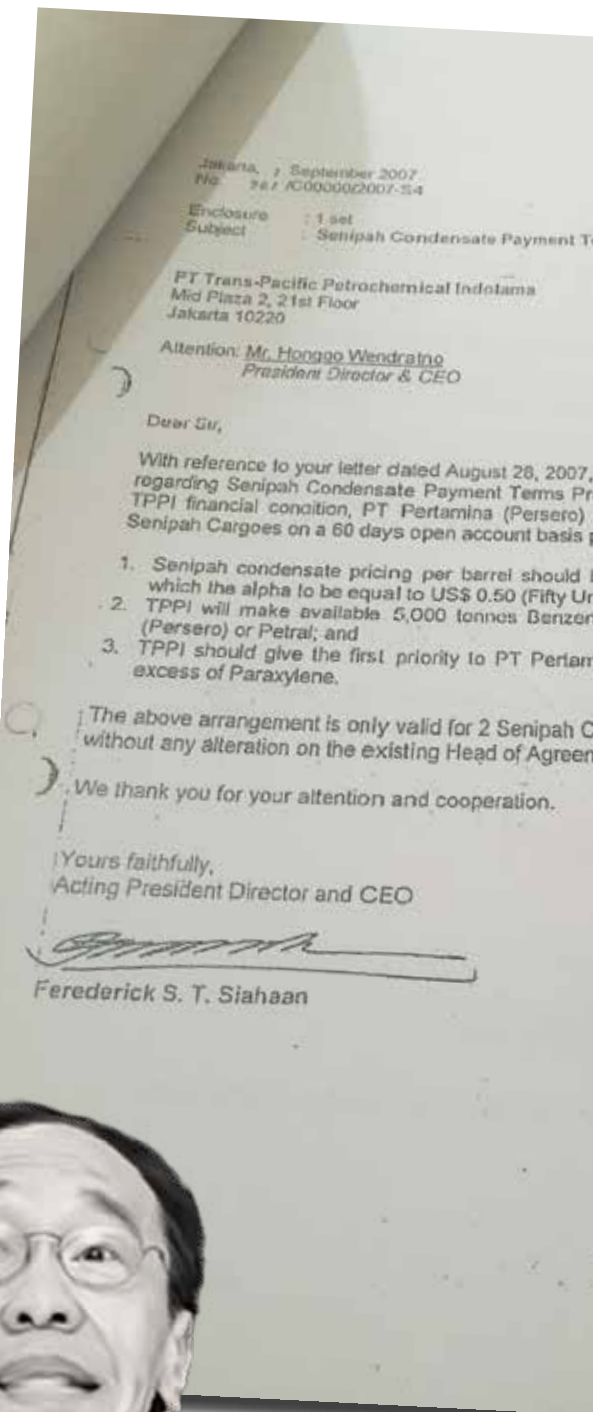
Surat balasan dari Pertamina yang ditujukan kepada Honggo Wendratno

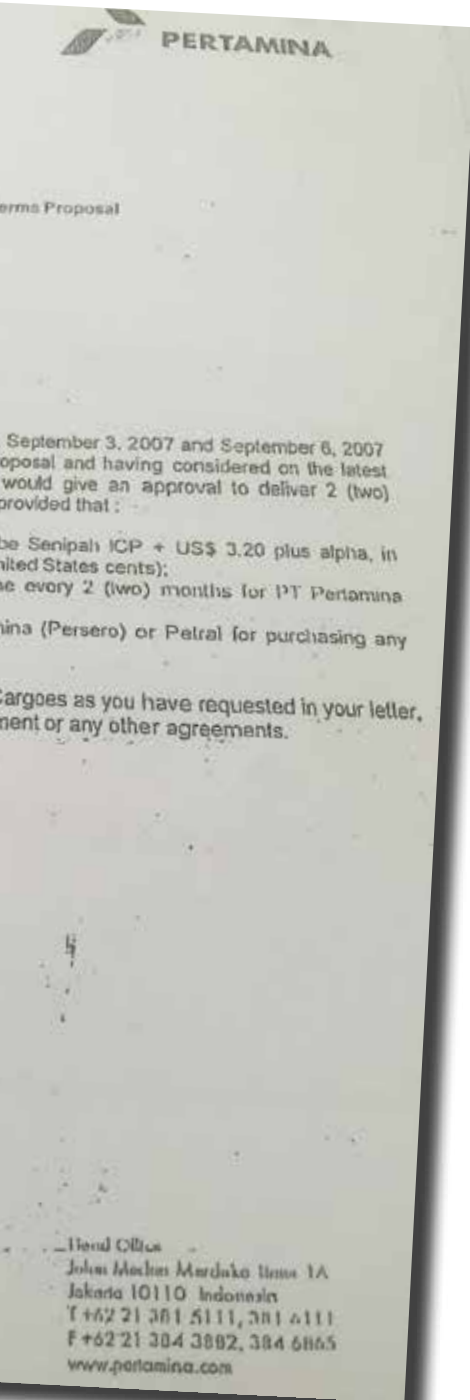
energi, Salamuddin Daeng mengatakan, penyidik harus memeriksa siapa saja pihak yang terindikasi terlibat dalam korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah itu. Pemeriksaan terhadap Ari Soemarno penting dilakukan karena TPPI pernah melayangkan surat kepada Pertamina yang ditujukan kepada Ari Soemarno.

"Usut tuntas, termasuk Ari Soemarno yang kemungkinan terlibat dalam kasus TPPI," tandasnya.

Kekhawatiran dari para pakar hukum ini memang sangat beralasan. Sebab hingga saat ini Bareskrim Polri belum menyentuh Pertamina dalam mengusut kasus penjualan kondoset TPPI ini. Bareskrim masih menilai bahwa korupsi penjualan kondoset itu melibatkan TPPI, SKK Migas, dan Kementerian ESDM. Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana. Pertama, penunjukan langsung TPPI oleh SKK Migas untuk menjual kondensat. Kedua, TPPI telah melanggar kebijakan wakil presiden untuk menjual kondensat ke Pertamina, tetapi

Honggo Wendratno





Raden Priyono usai diperiksa di Bareskrim Polri (tengah), Jakarta, Rabu (20/5/2015).

hasil penjualan kondensat ke kas negara. Penyidik telah mengantongi kalkulasi dari Badan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara akibat dugaan korupsi itu, yakni mencapai USD139 juta.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan pihaknya terus melakukan penyempurnaan dalam audit hubungan Pertamina dan TPPI. Sementara ini kerugian negara yang diakibatkan oleh kerjama dua perusahaan ini mencapai Rp6 triliun. Kerugian ini menurut mantan politisi Partai Demokrat itu diakibatkan dari kerjasama antar keduanya sejak tahun 2002. "Jadi yang kita audit itu sejak tahun 2002 sampai 2012 untuk Pertamina," ujarnya.

Purnomo diperiksa Priyono digeledah

Bareskrim Polri terus mendalami kasus korupsi yang melibatkan PT TPPI dan BP Migas era Raden Priyono. Pekan lalu penyidik melakukan pengeledahan di sejumlah tempat. Salah satunya rumah Raden Priyono. "Ya ini mau menggeledah, geledah rumah tersangka. Dan kantor

PT TPPI juga di Midplaza Holding, Jl Jenderal Sudirman Kav 10-11, Jakpus. Saya geledah yang di Midplaza, yang ke rumah tersangka anak buah saya," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Victor E, Simanjuntak, Kamis (18/6).

Pengeledahan tersebut berbarengan dengan pemeriksaan dua tersangka yakni Raden dan bekas Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono.

Victor menjelaskan, terkait materi pemeriksaan para tersangka adalah seputar pasal yang disangkakan karena menyangkut perkara korupsi dan pencucian uang. "Karena ini sudah tersangka, tentu ditujukan kepada unsur-unsur pasal yang dituduhkan yaitu pasal korupsi. Unsur pasal 2 pasal 3, yang ditanyakan kepada tersangka dan tentu juga ditambah dengan kita menuduh TPPU juga. Maka tentu unsur pasal itu yang ditanyakan pada tersangka," tegasnya.

Selain itu penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Victor mengatakan, hasil pemeriksaan Purnomo sama dengan pemeriksaan Evita Legowo, mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ■ Moh Sahlan

justru dijual ke perusahaan lain.

Penyidik juga menemukan bahwa meski kontrak kerja sama SKK Migas dengan TPPI ditandatangani Maret 2009, namun TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual. Selain itu, TPPI juga dijual tidak menyerahkan

Yusril: DI Belum Putuskan Ajukan Gugatan Praperadilan



Kuasa hukum Dahlan Iskan (DI) Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pihaknya belum memutuskan apakah akan mengajukan gugatan praperadilan atau tidak, karena masih menunggu salinan surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dahlan sendiri sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk PT PLN di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara senilai Rp 1,06 triliun.

"Kami akan pelajari dengan saksama surat perintah penyidikan yang berisi penetapan tersangka Pak Dahlan

Iskan," jelas Yusril, Kamis (11/6).

Menurut Yusril, sebelumnya dalam surat panggilan yang dilayangkan Kejati DKI, tidak disebutkan pasal yang disangkakan terhadap Dahlan sehingga belum diketahui apakah penetapan Dahlan sebagai tersangka tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum atau tidak.

"Misalnya, apakah dua alat bukti permulaan ada atau tidak. Setelah kami telaah, baru kami bisa menentukan langkah apa yang harus diambil," jelas dia.

Pada kasus ini, Penyidik Kejati DKI telah menahan sembilan orang dari 15 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur. Para tersangka yang ditahan adalah Manajer Unit Pelaksana Konstruksi (UPK) Jaringan Jawa-Bali (JJB) IV Region Jabar Fauzan Yunas, Manajer UPK JJB IV Region DKI Jakarta dan Banten Syafoel Arief, serta Manajer Konstruksi dan

Operasional Induk Pembangkit dan Jaringan (Ikitring) Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara I Nyoman Sardjana, Deputy Manajer Akuntansi Ikitring JJB-Nusa Tenggara Ahmad Yendra Satriana, Asisten Engineer Teknik Elektrikal UPK JJB 2 Yushan, Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Totot Fregatanto, serta empat anggota PPHP, yaitu Yayus Rusyadi Sastra, Endi Purwanto, dan Arief Susilo Hadi. Beberapa waktu lalu, seorang lainnya, Direktur PT Hyfemerrindo Yakin Mandiri (HYM) Ferdinand Raming Dien sudah ditahan oleh penyidik.

Dua tersangka lainnya, pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus General Manager Ikitring Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yakni Yusuf Mirand dan Hengky Wibowo, belum ditahan karena menunggu berkas berita acara pemeriksaan rampung. Sementara itu, tersangka lainnya dari pihak rekanan yang belum dijebloskan kepenjara adalah Dirut PT Arya Sada Perkasa (ASP) Egon, Direksi PT ASP Tanggul Priamandaru, serta Direksi PT ABB Sakti Industri Wiratmoko Setiadji. /Deddy

Tito Karnavian Dilantik Menjadi Kapolda Metro Jaya

Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrohin Haiti secara resmi melantik Irjen (Pol) Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Tito menggantikan Irjen Unggung Cahyono yang dimutasikan sebagai Asisten Operasi Kapolri.

"Perlu saya ingatkan, sumpah yang Anda ucapkan didengar seluruh yang hadir ruangan ini dan Tuhan Yang Maha Esa. Bila melanggar sumpah yang diucapkan, konsekuensinya di dunia dan akhirat," ucap Badrohin, di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Jumat, (12/6).

Pada kesempatan itu, Kapolri juga melantik sekitar 20 perwira tinggi lain diantaranya Irjen Mochamad Iriawan yang merupakan Kapolda Jawa Barat bertukar posisi dengan

Irjen Polisi Moechgiyarto yang menjabat Kepala Divisi Hukum Polri.

Ada pula Kapolda Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Bambang Hermanu dimutasikan menjadi Perwira Tinggi Polri dalam rangka PD Wantannas. Kapolda Kalimantan Tengah Brigjen Bambang digantikan Brigjen Fakhrihal. Fakhrihal sebelumnya menjabat sebagai Karopaminal Karowabprof Divpropam Polri.

Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Machfud Arifin menjadi Kepala Divisi Teknologi Informatika Polri. Posisi Kapolda

Kalimantan Selatan diisi Brigjen Agung Budi Maryoto. Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri dalam rangka penugasan pada Kemenkopolhukam.

Kapolda Lampung dijabat Brigjen Polisi Edward Syah Pernong yang sebelumnya menjabat Karorenmin Bareskrim Polri.

Sementara Kapolda Maluku Utara Brigjen Sobri Effendy digantikan Brigjen Imam Budi Supeno. Imam sebelumnya menjabat Dirpolair Baharkam Polri. Brigjen Polisi Carlo Brix Tewu yang menjabat Karojianstra Sops Polri dipercaya sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. /Deddy



Ungkap Kematian Akseyna, Polda Metro Jaya Bikin E-mail Khusus



Kepolisian Daerah Metro Jaya secara khusus membuat alamat surat elektronik untuk menampung kesaksian orang sebagai upaya pengungkapan misteri kasus pembunuhan Akseyna Ahad Dori. Alamat e-mail itu yakni peduli.akseyna@gmail.com.

Menurut Wakil Ketua UPT PLK Universitas Indonesia Parulian, UI telah kehilangan salah satu mahasiswanya. Ia berharap ada saksi yang bisa mengungkap kematian Akseyna, yang sudah hampir tiga bulan kasusnya belum juga terungkap.

"Tolong rekan-rekan mari kita peduli dengan kematian sahabat

kita Akseyna. Bagi yang mempunyai informasi sebagai orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui tentang peristiwa kematiannya, tolong *share* infonya ke e-mail Polda Metro Jaya, peduli.akseyna@gmail.com," ucap Parulian, Rabu (10/6).

Dirinya berharap agar para saksi, baik dari teman atau siapa pun dapat memberikan informasi seputar kasus tersebut dan segera melapor ke UI. Pihaknya kata dia siap memberikan perlindungan kepada saksi bila dari kalangan mahasiswa.

Bahkan, sambung dia UI juga akan memberikan bantuan hukum bila benar Akseyna dibunuh. "Kami siap memberikan bantuan hukum bagi pembunuhnya," jelas dia.

UI sendiri telah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bila ada mahasiswa merasa terintimidasi saat memberikan keterangan atau mendapat tekanan dari luar. /Dedy

Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus "Sport Science"

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony T Spontana mengatakan tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan Sarana Olahraga Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Tahun Anggaran 2011 senilai Rp 76 miliar. Penyelidikan kasus ini berdasarkan laporan hasil penyelidikan KPK yang kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada 18 Februari 2015.

"Hasil penyelidikan adanya penyalahgunaan dalam kegiatan P3SON berupa peralatan *sport science* di Kemenpora telah ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga akhirnya meningkatkannya ke tahap penyidikan," kata dia, Jumat (12/6).

Dia menjelaskan kedua tersangka yang dimaksud adalah Rino Lade dan Brahmantory. Rino merupakan Direktur Utama PT Artha Putra Arjuna dan mantan Direktur Utama PT Suramadu Angkasa Indonesia. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print - 49/F.2/Fd.1/06/2015 tertanggal 3 Juni 2015.

Sedangkan Brahmantory adalah mantan Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Kemenpora. Ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-50/F.2/Fd.1/06/2015 tertanggal 3 Juni 2015.

Menurut Tony, diduga ada penyimpangan pada proses lelang dalam pelaksanaan pengadaan peralatan *sport science* di Kemenpora. Pembayaran atas pengadaan proses itu telah dilakukan 100 persen meski pekerjaan pengadaan belum selesai dilaksanakan.

"Tim penyidik saat ini sedang menyusun dan mempersiapkan rencana pelaksanaan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti," kata Tony. /Dedy

Kabareskrim: Masih Memungkinkan Ada Tersangka Baru di Korupsi Kondensat

Badan Reserse Kriminal Mabes Polri masih terus mengembangkan kasus dugaan korupsi penjualan kondensat bagian negara, yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi ke PT TPPI.

Sejauh ini Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus penjualan kondensat itu. Ketiga tersangka itu yakni RP (Raden Priono), DH (Djoko Harsono) dan HW (Honggo Wendratmo).

Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, tak menutup kemungkinan pihaknya bakal menetapkan tersangka baru atas kasus tersebut.

"Sangat mungkin ada tersangka lain, tunggu saat ini masih dikembangkan," kata Budi Waseso di Mabes Polri, Kamis (18/6).

Menurut dia, sejauh ini, pihaknya masih menghitung jumlah total

kerugian negara. Terlebih pihaknya masih menunggu penghitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk diketahui, dari ketiga tersangka hanya dua yang sudah diperiksa yakni RP dan DH. Sedangkan HW belum diperiksa karena akan menjalani operasi jantung di Singapura. /Wisnu



I ming-iming keuntungan berlimpah kerap membuat orang gelap mata dan menghalalkan segala cara.

Pemeo ini sangat pas untuk menggambarkan proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang getol diperjuangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) bersama sejumlah pengembang properti. Khususnya Agung Podomoro Group yang mulai menggarap reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta melalui anak usahanya PT Muara Wisesa Samudera.

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta memang sangat fantastis dengan keuntungan yang melimpah. Jika proyek ini jalan, keuntungan berlipat-lipat bakal diraup para pengembang. Tak peduli seberapa besar risiko yang mengancam lingkungan, kalau keuntungan berlimpah sudah didepan mata maka segala cara dapat diupayakan.

Agung Podomoro Group sudah membuat *brand* untuk proyek reklamasi Teluk Jakarta dengan sebutan Pluit City. Proyek ini akan menjadi lumbung harta bagi perusahaan yang dipimpin Trihatma Kusuma Haliman itu.

Bayangkan, dalam hitungan kasar saja, harga tanah di pulau yang sedang dibuat itu kabarnya sudah menembus kisaran Rp50-70 juta per meter persegi. Sekitar enam sampai tujuh kali lipat lebih besar dibanding ongkos urug yang mesti dikeluarkan Podomoro sekitar Rp10 juta per meter persegi.

Ini baru keuntungan dari harga tanah, belum lagi jika menghitung keuntungan dari properti yang akan dipasarkan. Dalam rencana proyek ini, Podomoro akan menciptakan superblok elite seluas 161 hektare di bibir pantai Jakarta yang ditarget sudah selesai hingga tahun 2018. Meliputi rumah hunian, rumah toko, apartemen, dan pusat belanja. Sangat mencengangkan, Podomoro kabarnya memasarkan rumah hunian dengan harga Rp3-6 miliar per unit sedangkan rumah toko Rp7-9 miliar per unit.

Siasat Pengembang di Pesisir Jakarta



Pengunjung melihat maket bangunan Pluit City yang di pajang di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta.

Proyek Pluit City atau Pulau G yang digarap PT Muara Wisesa Samudera ini baru satu bagian dari mega proyek tanggul laut raksasa (*giant sea wall*) yang terus disosialisasikan Pemprof DKI Jakarta dan mitra pengembang. Ada 17 calon pulau yang menjadi bagian dari proyek tanggul raksasa sepanjang 32 kilometer ini. Tanggul raksasa itu akan dibangun membentang pesisir Bekasi di timur Jakarta hingga pesisir

Tangerang di barat.

Proyek sebesar ini tentu tidak hanya melibatkan Agung Podomoro. Masih ada Salim Group Co, PT Agung Sedayu Group, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Intiland Development, PT Kapuk Naga Indah, PT Taman Harapan Indah, PT Jakarta Propertindo, PT Pelindo, PT Jaladri Eka Paksi, PT Manggala Krida Yudha, dan Fuhai Group dari China.

Total dana proyek sendiri

sedikitnya mencapai sekitar Rp300 triliun, dan untuk menjalankannya butuh 330 juta m³ bahan urugan. Kemudian luas lahan lebih dari 6.000 Ha Dalam bentuk 17 pulau. Adapun perkiraan tanah hasil reklamasi mencapai Rp40-70 juta per meter persegi, dan 70% proyek ini di kuasai oleh investor swasta.

Kerusakan Lingkungan di Depan Mata

Keuntungan ekonomi berlimpah tentu saja akan diperjuangkan sekuat tenaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tak peduli jika menabrak sejumlah aturan perijinan maupun analisis lingkungan dan sosial yang merugikan. Pakar kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Muin mengatakan, proyek reklamasi Teluk Jakarta memang hanya akan menguntungkan pihak pengembang dan sadar atau tidak sadar akan merugikan pemerintah serta masyarakat DKI.

Berjebel data dan analisa memang menunjukkan bahwa reklamasi akan berdampak besar terhadap lingkungan. Misalnya hilangnya ekosistem laut, banjir di daratan pun bisa terjadi akibat aliran air yang semakin panjang akibat pembangunan teluk. Pengurukan laut yang dilakukan dalam proyek ini pun membuat wilayah tawar makin maju, sehingga menyebabkan hilangnya kawasan mangrove.

Pakar Manajemen Sumber Daya Air dan Konservasi, Institute Teknologi Bandung (ITB) Arwin Sabar menyampaikan bahwa kerusakan lingkungan dan sosial akan terjadi bila proyek reklamasi teluk Jakarta dibangun. Dalam penelitiannya tahun 2011, diketahui bahwa perluasan wilayah pesisir yang akan direklamasi tanpa memperhitungkan naiknya muka air laut akan berakibat pada tenggelamnya Pantai Utara Jakarta.

“Apalagi jika laju penurunan muka tanah terus berlangsung akibat penyedotan air tanah secara besar-besaran. Pantai Utara Jakarta akan tenggelam,” ucap Arwin yang melakukan penelitian tentang



“Perubahan iklim, Manajemen Air dan Degradasi Infrastruktur Sumber Daya Air di Perkotaan di Zona Monsoon Indonesia: Ihwal Pantura Metropolitan Jakarta.”

Pakar dari ITB lainnya, Alan Koropitan menyatakan bahwa reklamasi Pantai Utara Jakarta akan membawa lima dampak buruk. Pertama, perubahan pola sedimentasi akibat perubahan garis pantai hidrologi dan potensi intensitas kegiatan di lokasi reklamasi; Kedua, kecepatan arus meningkat sehingga meningkatkan tekanan terhadap ekosistem di Kepulauan Seribu; ketiga ekosistem mangrove telah rusak sehingga fungsi ekologi sebagai daerah pelindung pantai telah musnah; Keempat, regulasi sedimen dan perlindungan ikan telah hilang sepanjang Pantai Utara Jakarta; dan terakhir pertumbuhan karang di Kepulauan Seribu terganggu akibat tekanan bahan pencemaran dan sedimen bahan uruk reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Selain dampak lingkungan, reklamasi teluk Jakarta juga tidak memberi keuntungan memadai bagi DKI Jakarta. Pasalnya, dengan konsekuensi kerusakan lingkungan yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat Ibu Kota, nilai ekonomis yang didapat dari proyek

ini terbilang kecil, apalagi DKI hanya mendapatkan 5% dari tanah hasil reklamasi. Belum lagi konsekuensi bahwa Pemerintah harus pindahkan pelabuhan yang butuh biaya besar namun bisa berakibat fatal.

Fakta dan analisa ini tampaknya tidak membuat Pemprov DKI Jakarta dan para pengembang mundur. Jangankan analisa para ahli, aturan perundang-undangan pun tampaknya tidak lagi diindahkan, karena pemberian izin proyek reklamasi Pulau G Pluit City melangkahi kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Maklum, kawasan pesisir Jakarta merupakan kawasan strategis nasional (KSN) yang kewenangannya dimiliki oleh KKP sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengolahan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Peraturan Presiden (Perpres) No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga ditabrak.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar juga mengakui bahwa proyek reklamasi teluk Jakarta yang dikelola Pemerintah Daerah DKI Jakarta belum memiliki ijin AMDAL. Aktual pun menganalisa dokumen tentang aturan kewajiban rencana usaha untuk mendapatkan ijin AMDAL yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Permen itu menjelaskan soal aturan reklamasi harus memperoleh ijin AMDAL, di mana reklamasi merupakan jenis rencana usaha Bidang Multisektor. Dalam Permen itu diijelaskan bahwa Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan Luas area reklamasi diatas 25 ha, dengan volume material urug, atau lebih dari 500.000 m³ dengan panjang lebih dari 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis



Edhy Prabowo



Herman Khaeron

pantai) wajib memiliki ijin AMDAL yang dikeluarkan oleh Menteri.

"Kalau belum memiliki (ijin) AMDAL kenapa kemudian jalan terus (proyek reklamasi). AMDAL itu kan prasyarat melakukan kegiatan infrastruktur, jadi saya kira ini tidak bisa kemudian dibiarkan," kata Siti Nurbaya.

Mengetahui hal ini, hampir semua anggota Komisi IV DPR tegas menolak reklamasi teluk Jakarta yang menjadi proyek Pemda DKI. Para legislator di Senayan pun berang lantaran mega proyek itu sudah mulai dilakukan meski tidak mengantongi ijin.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo tegas menyatakan tidak setuju terhadap reklamasi Teluk Jakarta. Apalagi proyek ini hanya memberi keuntungan dari sisi bisnis kaum tertentu, namun mematikan kehidupan nelayan. "Itu untuk kepentingan bisnis. Kami mendesak pemerintah untuk stop semua reklamasi (Teluk Jakarta)," kata Edhy.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, juga mengaku tidak setuju atas proyek reklamasi yang tidak memenuhi persyaratan untuk dibangun. "Kita akan awasi terus karena proyek ini belum memiliki ijin amdal, belum mengkaji aspek lingkungan. Dari sisi hukum

belum bisa," ujarnya.

Politikus Demokrat itu tidak mempersoalkan siapa yang menggarap proyek ini, asalkan semua perijinan dan prasyarat dipenuhi alias tidak ditabrak. Jangan sampai gara-gara keuntungan besar kemudian aturan dan prasyarat untuk melakukan reklamasi tidak diikuti. "Kita tentu siap mengkritisi kalau ada aturan yang dilanggar dalam proyek ini, ataupun proyek lainnya," tukas Herman.

Berdasarkan catatan majalah ini Komisi IV DPR pada tanggal 13 April 2015 sempat menggelar rapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam rapat yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Sudirman Saad tersebut mempermasalahkan tentang perijinan reklamasi. Tarik ulur kewenangan izin reklamasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta menjadi tema pembahasan utamanya.

Komisi IV DPR menilai reklamasi Teluk Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan posisi Teluk Jakarta yang masuk dalam zona kawasan strategis nasional. "Iya benar itu Teluk Jakarta harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan persetujuan dari DPR, jadi reklamasi yang sekarang itu

ilegal," ujarnya.

Informasi yang dihimpun Aktual menyebutkan menyebutkan adanya skenario untuk mengisolir kewenangan perizinan reklamasi. "Jadi ada upaya agak kewenangan izin reklamasi cukup dari Pemprov DKI Jakarta, itu disponsori oleh pengembang," ujar sumber.

Melihat adanya upaya meninggalkan peran pemerintah pusat, Komisi IV DPR tidak tinggal diam. Dalam rapat tersebut Komisi IV dan Kementian KKP menyepakati tiga hal yang salah satunya mempermasalahkan ilegalitas izin reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahajapurnama.

Dalam perkembangan saat ini Komisi IV DPR telah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan mengawasi khusus proses reklamasi Teluk Jakarta.

1. Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dalam membuat kebijakan terhadap reklamasi di Kawasan Strategis Nasional dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil untuk segera melakukan koordinasi dan penertiban terkait perizinan reklamasi di Kawasan Strategis Nasional.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membatalkan berbagai proses reklamasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk membatalkan izin reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. ■ Moh Sahlan



Dialog RUU RTRI - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Pemberitaan Setjen DPR menggelar diskusi Forum Legeslasi tentang RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) di ruang Presroom DPR Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa (17/6/2015). Tampil sebagai Pembicara Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura Arief Suditomo (kiri), Dirut LPP RRI Niken Widiastuti (dua kiri) dan Anggota Fraksi PKS Gamari Sutrisno (kanan).

Penggabungan TVRI Dan RRI, Upaya Memperkokoh Integrasi Nasional

Pada Forum Legislasi dengan tema “RUU RTRI” yang diselenggarakan di Ruang Wartawan DPR RI, Selasa (15/6/2015), Anggota Komisi I DPR Gamari Soetrisno mengatakan pemerintah bersama Komisi I DPR kini tengah menggodok RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang bertujuan untuk memperkuat integrasi, nasionalisme demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

RUU RTRI ini kata Gamari diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penggabungan TVRI dan RRI juga sebagai upaya revitalisasi dan reformasi lembaga penyiaran publik untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain Gamari, pada acara forum mingguan tersebut nampak hadir Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti, Ketua Dewan Kehormatan Pers PWI Kamsul Hasan, dan kolega Gamari di Komisi I, Arief Soeditomo, Mantan Pemred RCTI.

Senada dengan Gamari, Arief menuturkan idealnya dengan terbentuknya lembaga penyiaran publik melalui penggabungan TVRI dan RRI dapat menjadi rujukan pemberitaan nasional dan diharapkan dapat menjadi lembaga penyiaran negara yang kuat dan profesional sehingga dapat tetap menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus mengimbangi lembaga penyiaran swasta.

Sementara itu, Niken mengatakan RRI sebagai lembaga penyiaran publik

telah memberikan pelayanan informasi tentang budaya, pendidikan, hiburan yang sehat, sebagai kontrol sosial dan membangun citra positif Indonesia di mata dunia internasional.

Niken berharap, pada RUU RTRI, campur tangan negara dapat diperbesar untuk mendukung keberlangsungan lembaga penyiaran publik seperti yang dilakukan Jepang pada lembaga penyiaran yang dimilikinya yakni NHK.

Sedangkan menurut Kamsul, dengan penggabungan TVRI dan RRI dapat berpatokan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, ditunjang dengan kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan bertanggung jawab.

Bos Blue Bird Terpilih Jadi **Ketum Organda**



Direktur PT Blue Bird Tbk (BIRD) Adrianto Djokosoetono akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum DPP Organda periode 2015 – 2020. Dia meraih suara terbanyak dalam Munas Organda ke XV di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 9-10 Juni 2015.

Dalam pemilihan ketua umum yang dihadiri oleh perwakilan ketua DPD dan DPC Organda se-Indonesia itu, Adrianto mampu mengalahkan pimpinan sebelumnya (*incumbent*) Eka Sari Lorena Soerbakti. Dari total 520 suara yang diperebutkan, Adrianto meraih 318 suara,

sedangkan Eka Lorena 201 suara.

Adrianto merupakan anak ketiga dari pendiri perusahaan jasa transportasi Blue Bird Group, yaitu Purnomo Prawiro. Perusahaan yang sudah "go public" itu diketahui dekat dengan pengusaha dan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Saya akan mencoba membawa nafas baru di Organda dan melakukan program-program yang dapat mensejahterakan para anggotanya. Terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," ujar Adrianto Djokosoetono setelah ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP Organda.

Pekerjaan pertama yang akan dilakukan Adrianto adalah mengonsolidasikan formatur baru dalam struktur kepengurusan DPP Organda. Kemudian merumuskan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas DPP Organda dalam lima tahun ke depan.

Adrianto dinilai mampu memikat para pemilih yang merupakan ketua

DPC dan DPD Organda dengan janji akan meningkatkan komunikasi antara pengurus pusat, pengurus provinsi, dan kabupaten/kota. Sebab selama ini komunikasi antar pengurus Organda dinilai kurang maksimal.

Dalam pidatonya, Adrianto mengajak semua anggota ikut membesarkan Organda sebagai organisasi transportasi yang mandiri dan mampu mewujudkan kepentingan para anggota. Terutama untuk mendukung peningkatan pelayanan serta manfaat kepada masyarakat luas dalam era persaingan bebas.

"Dengan soliditas tinggi dan kesepahaman visi dan misi mendalam antar sesama pengurus dan anggota, saya yakin akan mempermudah langkah kita ke depan untuk mewujudkan apa yang tertuang dalam paparan visi misi kita dalam membangun Organda ke depan," tuntas Adrianto. /Moh Sahlan

Alfamart Ekspansi ke Bisnis Apotik

Setelah sukses berkecimpung di bisnis mini market, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) mengempalkan sayap ke bisnis apotik melalui anak usaha PT Sumber Indah Lestari dengan merek dagang Dan+Dan.

Presiden Direktur Sumber Alfaria Anggara Hans Prawira mengatakan, PT Sumber Indah Lestari tetap memakai merek Dan+Dan yang 80% berupa produk kecantikan dan 20% sisanya produk kesehatan. "Tapi ke depan kita akan ubah dengan konsep apotik sehingga kami akan pacu lebih banyak produk kesehatan," ujar Anggara di Jakarta, pertengahan Juni 2015

Belum dipastikan berapa nilai investasi yang digelontorkan untuk ekspansi tersebut. Sebab perseroan masih mengurus proses perizinan apotik, sekaligus mengkaji model pengembangan bisnis apotek yang



lebih paten.

Hingga Maret 2015, jumlah gerai Dan+Dan telah mencapai 58 titik. Selain itu, terdapat satu distribution channel (DC) yang berguna sebagai gudang untuk pasokan barang. Adapun, Sumber Alfaria tercatat memiliki 82,5% saham beauty dan health store tersebut.

Perseroan melalui anak usahanya, PT Alfamart Retail Asia Pte. Ltd (ARA) akan menambah 100-120

gerai baru di Filipina pada tahun 2015. Aksi korporasi tersebut didanai pinjaman bank lokal Filipina. Total investasi diperkirakan sekitar Rp 50 miliar, dalam mata uang Filipina.

Bisnis model yang diterapkan berupa perusahaan patungan (*joint venture/JV*) antara ARA yang bermarkas di Singapura dan SM Retail Supermarket. Masing-masing mencatatkan kepemilikan sebesar 35% dan 65%. Saat ini, total gerai Sumber Alfaria di Filipina tercatat mencapai 44 titik. Sebelumnya, perseroan menargetkan tahun lalu mampu menambah jumlah gerainya hingga 50 titik.

Sumber Alfaria sendiri akan menambah 1.200 gerai Alfamart baru hingga akhir tahun ini. Lebih dari 50% akan dibuka di luar pulau Jawa seperti di Pontianak, Banjarmasin, Manado, dan Batam. Setelah Batam, perseroan bakal menambah dua titik DC di Cianjur, Jawa Barat dan Serang, Banten. /Moh Sahlan

OJK Berlakukan Daftar Efek Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor: KEP 33/D.04/2015 tentang Daftar Efek Syariah untuk digunakan sebagai panduan bagi pengelola investasi. Surat ini sebagai respon atas pesatnya perkembangan industri pasar modal syariah saat ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, mengatakan bahwa penerbitan daftar efek syariah mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2015 yang didasari dari 'review' berkala yang dilakukan OJK atas DES yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efek-efek berbasis syariah ini, lanjut Nurhaida, termuat dalam DES meliputi 328 efek jenis saham emiten dan perusahaan publik, serta efek syariah lainnya. Ada pun sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan DES itu berasal dari laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diterima oleh OJK, serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari emiten atau perusahaan publik.

"DES itu merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna seperti Manajer Investasi pengelola reksa

dana syariah, asuransi syariah dan investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio efek syariah," tandas Nurhaida.

Nurhaida menambahkan, DES juga berfungsi sebagai panduan bagi penyedia indeks syariah, seperti PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). OJK akan melakukan "review" atas DES secara periodik berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan dari emiten.

"OJK akan melakukan 'screening' laporan keuangan emiten. Itu bisa dilihat dari nilai total utang berbasis bunga yang tidak boleh melebihi 45 persen dari aset, dan total pendapatan nonhalal tidak boleh melebihi 10 persen dari pendapatan," jelasnya.

Jika sebuah emiten memenuhi semua kriteria tersebut, Nurhaida menegaskan bahwa sahamnya akan masuk dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan OJK.

"Kegiatan usaha yang dikategorikan efek syariah salah satunya tidak melakukan kegiatan usaha di bidang perjudian, jual-beli yang tidak pasti,

memperdagangkan barang haram, transaksi suap, dan keuangan ribawi," tuntas Nurhaida. /Moh Sahlan



Investor Asing Dominasi Kepemilikan Efek Rupiah



Investor asing masih mendominasi pasar modal dengan efek berdenominasi rupiah, baik yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi. Berdasarkan

data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), porsi asing dalam komposisi kepemilikan efek rupiah per akhir Mei 2015 mencapai Rp 1.926 triliun.

Efek rupiah ini paling banyak ada di efek saham dengan total nilai Rp 1.898 triliun. Sedangkan kepemilikan investor lokal di efek rupiah sebesar Rp 1.326 triliun. Perinciannya, antara lain di efek saham, porsi pemodal domestik sebesar Rp 1.037 triliun, obligasi korporasi sebesar Rp 201,81 triliun dan obligasi pemerintah Rp 25,53 triliun. Sisanya ada di efek right, warrant, medium term notes (MTN), reksadana, dan efek beragun

aset (EBA).

Berbeda dengan efek berdenominasi rupiah yang dikuasai investor asing, efek berdenominasi dollar AS masih didominasi investor domestik dengan nilai total Rp 10,92 triliun. Sebagai perbandingan, investor asing hanya mengempit Rp 2,01 triliun.

Efek berdenominasi dollar yang dimaksud adalah obligasi korporasi, obligasi pemerintah dan MTN. Investor domestik menggenggam masing-masing efek itu sebesar Rp 1,27 triliun, Rp 132,11 miliar, dan Rp 9,51 triliun. Sementara, investor asing hanya menggenggam Rp 41,76 miliar obligasi korporasi dan Rp 1,96 triliun MTN dollar AS. /Moh Sahlan

Saling Cela Iringi Proses Ganti Casing 'Mafia' Energi

Peralihan rezim pengelolaan energi nasional dari SBY ke Jokowi-JK dilumuri perang **statement** tanpa substansi pembenahan. Atraksi saling menjatuhkan untuk memuluskan proses ganti casing para mafia.

Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa menyembunyikan kekesalannya kepada Menteri ESDM Sudirman Said. Mantan Presiden yang belum lama ini digantikan Joko Widodo tersengak oleh pernyataan Sudirman. Dimana disebut persoalan mafia migas selalu selesai jika sudah sampai di meja SBY saat menjadi penguasa.

Pernyataan Sudirman menohok SBY. Pembawaannya yang selama ini dijaga dengan wajahnya yang santun berubah. Terlebih yang disampaikan terkait dengan kebijakan pembubaran Petral. Sudirman secara tidak langsung menyatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu sengaja melindungi anak usaha PT Pertamina (Persero) yang berkedudukan di Singapura tersebut.

"Saya harap Pak Menteri ESDM melakukan klarifikasi apa yg dimaksud, karena justru saya ingin penyimpangan apapun diberantas. Saya bahkan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yg hakikatnya memberantas kejahatan & penyimpangan apa pun," ucap SBY melalui akun twitter.

Serangan pedas yang dilayangkan anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menandai alotnya proses peralihan rezim pengelolaan energi nasional, yakni dari kelompok kepentingan pimpinan SBY ke tangan golongan yang menyebut diri kaum profesional, namun diketahui adalah kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Setali tiga uang dengan Sudirman



Said, bekas Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri juga melancarkan serangan kepada rezim pemerintahan SBY. Kali ini yang menjadi sasaran tembak adalah mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan tuduhan sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional.

Faisal menilai hancurnya industri bauksit nasional adalah akibat dari kebijakan salah Hatta Rajasa yang melarang ekspor bahan mentah pembuatan alumunium sejak 12 Januari 2014. Faisal menyebut kebijakan ini *over lapping* karena UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tak menyebut pelarangan ekspor.

Faisal Basri membongkar, Hatta Rajasa melakukan kongkalikong dengan perusahaan alumunium terbesar Rusia, UC Rusal. Dia mengaku punya bukti otentik adanya kongkalikong yang dilakukan Hatta Rajasa dengan perusahaan tersebut.

"Ya kan kita bisa

konstruksi, prosesnya, perubahan-perubahan itu kemudian kita bisa tahu. Kan saya ada fotonya. Pak Menko (Hatta) dengan wakil PM Rusia kemudian sama Rusal sama Pak

Suryo Bambang Sulistio (Ketua Kamar Dagang dan Industri/ Kadin)," ucapnya.

Hatta Rajasa sendiri cenderung



Faisal Basri



defensif menghadapi serangan itu. Dia menyebut fitnah yang dilancarkan Faisal Basri jauh dari kebenaran. Hatta juga menyangkal bahwa dialah yang membuat kebijakan melarang ekspor mineral bauksit. Pelarangan ekspor tambang mentah termasuk bauksit dan kewajiban ekspor melalui proses pemurnian mineral (*smelter*) adalah perintah UU Minerba. Bahkan dalam aturan itu disebutkan bahwa kewajiban soal *smelter* harus dijalankan selambat-lambatnya 12 Januari 2014.

“Sebagai Menko, adalah kewajiban saya untuk memastikan bahwa UU tersebut dapat dijalankan. Ada pun peraturan teknisnya menjadi wewenang Kementerian ESDM,” papar Hatta.

Ruhut Sitompul yang biasa menjadi ‘loud speaker’ SBY meminta Sudirman Said tidak untuk lebih banyak introspeksi diri. Sebab faktanya saat ini pengelolaan energi nasional sangat amburadul. “Sudirman Said sebagai pembantu Presiden Jokowi tidak introspeksi diri.

Sadar enggak sih dia megang ESDM sekarang amburadul,” ucap Ruhut.

Harga BBM yang mengikuti fluktuasi harga pasar, lanjut Ruhut, telah berimbas pada gonjang-ganjing perekonomian nasional. Rakyat sangat merasakan bahwa harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi semakin mahal. “Kenapa dalam kondisi begini, Sudirman Said malah mencari kambing hitam dengan menyalahkan pemerintahan SBY?” ucap Ruhut.

Anggota Komisi III DPR ini menilai pembubaran Petral hanyalah ganti *casing*, namun mafianya tetap hidup dalam wadah lain, yakni Integrated Suplay Chain (ISC). “Jangan bangga membubarkan Petral, tapi nanti cuma ganti *casing*. Cuma ganti nama,” cetusnya.

Sebagai anak buah Jokowi, tentu naif jika menganggap Sudirman maupun Faisal Basri menyerang SBY dan Hatta Rajasa tanpa restu atau sepengetahuan dari Jokowi. Artinya, manuver Menteri ESDM itu merupakan

indikasi nyata perang dingin antara SBY–Jokowi yang mulai menghangat. Apalagi dalam pengelolaan energi, SBY dan Jokowi sudah sejak awal saling serang, bahkan sebelum Jokowi dilantik menjadi presiden.

Masih sengar dalam ingatan, ketika Jokowi menemui SBY di Bali untuk meminta agar menaikkan harga BBM sebelum lengser. Namun permintaan itu tidak diindahkan karena SBY khawatir ada noda hitam di penghujung kepemimpinannya. Keputusan ini kemudian disebut kelompok Jokowi sebagai ranjau-ranjau APBN, karena menganggap anggaran negara banyak dipakai untuk subsidi BBM.

Ketika itu SBY tidak diam. Dia meminta Jokowi untuk tidak mengomentari pemerintahan sebelumnya dan fokus bekerja untuk kebaikan Indonesia ke depan. “Pak Jokowi sebaiknya fokus saja. Tidak perlu menyalahkan pemerintahan pendahulunya, termasuk kepemimpinan saya dulu,” kata SBY suatu ketika. ■ Moh Sahlan

Kuota Impor Premium Naik Dua Juta Barel



PT Pertamina (Persero) menyatakan akan menaikkan kuota impor untuk LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium untuk mengantisipasi kelangkaan akibat tingginya konsumsi masyarakat selama Ramadhan.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, kenaikan kuota impor hanya terjadi untuk Premium dan elpiji, tidak untuk BBM Pertamina. Menurutnya kuota Pertamina saat ini telah cukup untuk 25 hari ke depan. Sementara kenaikan kuota impor LPG meningkat menjadi dua kali lipat yaitu 44 ribu metrik ton menjadi 88 ribu metrik ton.

“Kita sudah tambahkan stok impor yang semula 13 hari menjadi 16 hari. Tadi malah sudah 17 hari,” kata Bambang saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/6).

Bambang menambahkan, menjelang Ramadhan dan Lebaran, pihaknya sudah merencanakan untuk menaikkan kuota impor premium. Kenaikan kuota impor tersebut akan mencapai dua juta barel hingga Juli 2015.

“Ada yang semula premium awalnya delapan juta barel. Saya naikkan pada Mei jadi sembilan juta barel. Untuk Juni dan Juli menjadi 10 juta barel,” ucap Bambang.

Estimasi Pertamina terhadap konsumsi Premium saat Puasa dan Lebaran 2015 naik 17,8 persen dari rata-rata harian normal 76.258 kiloliter (kl) menjadi 89.817 kl. Estimasi konsumsi LPG naik 3,5 persen dari rata-rata harian normal 19.779 metrik ton menjadi 20.453 metrik ton. /Ismad Eka Kusuma

Survei Blok Garcinia, Kandungan Minyak Terbesar di Indonesia?

Operasi survei minyak di kawasan Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumut yang dikerjakan oleh anak perusahaan Pertamina diketahui ternyata merupakan bagian survei minyak terluas yang pernah dilakukan oleh pihak PT Pertamina.

Survei seismik 3 dimensi meliputi 2 Kabupaten masing-masing Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat serta 2 Kota masing-masing Kota Medan dan Kota Binjai itu disebut sebagai Blok Garcinia.

“Namanya Blok Garcinia, kita lakukan survei di empat kabupaten dan Kota. Ini (survei) yang terluas di Indonesia,” ujar Chief Humas Survey Seismik 3D Garcinia Pertamina EP, Sumatera Utara, Subarkah kepada Aktual di Medan, Rabu (17/6).

Menurut Subarkah, survei itu sudah berlangsung selama 2 tahun, sejak 2013 lalu. Kini, survei yang masih berlangsung tinggal sekitar 1 persen dari total pendataan.

“Yang kita tembak, 47.300 titik di 360 desa. Sekarang tinggal kurang satu persen lagi saja,” sebutnya.

Subarkah mengakui, dengan sebaran dan rentang waktu yang cukup panjang dalam melakukan survei, potensi kandungan minyak di kawasan Blok Garcinia cukup besar. Meski, Subarkah menyebut, besaran potensi kandungan minyak itu akan diketahui setelah melewati penelitian di SKK Migas.

“Potensi ada (besar-red), cuma dimana palungnya, itu yang sedang di survei. Tapi bisa abang bayangkan, survei seismik selama 2 tahun. Artinya potensinya sangat besar,” ungkapnya.

Menurut Subarkah, survei di Blok Garcinia merupakan misi pemerintah untuk mencari sumber minyak baru. Soal eksplorasi dan eksploitasi, Subarkah menyebut itu juga merupakan kewenangan SKK Migas.

“Masih menunggu SKK Migas



untuk memutuskan apakah akan di eksplorasi. G and G (Geologi dan Geofisika), mereka yang tahu cadangannya berapa banyak,” ujarnya.

Dengan potensi besar itu, Subarkah tak menampik, eksplorasi hingga eksploitasi akan berlangsung tidak lama lagi. Jika itu terjadi, sambungannya, maka akan dilakukan pembebasan lahan pada titik-titik dimana eksplorasi dan eksploitasi dilakukan.

“Biasanya pembebasan lahan 100 meter,” sebutnya.

Sementara itu, divisi kehumasan Farid, secara teknis menjelaskan operasi survei yang dilakukan selama ini menggunakan alat sejenis *scanner* untuk mendeteksi kandungan minyak di dalam bumi. Peledakan dan pengeboran dengan menggunakan pipa sedalam 30 meter.

Farid menyebut, alat peledak yang digunakan dalam survei minyak tersebut sudah menggunakan standar internasional yang minim dampak terhadap lingkungan.

“Aman, *low explosif*, daya jel fosfor, ramah lingkungan. Dia hanya menggetarkan saja, buatan PT. Dahana, luar negeri juga memakai itu. Kedalaman 30 meter, dia numbuk ke bawah, dan besar mata bornya 3 inci,” klaim Farid.

Terkait sejumlah penolakan dari warga di kawasan lokasi survei, Farid mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan prosedur sosialisasi. Dimulai dari Pemkab hingga kepala Dusun. /Ismad Eka Kusuma

Tol Cikopo - Palimanan Minim SPBU

Komisi VII DPR mengkhawatirkan tol Cikopo-Palimanan yang mulai beroperasi saat lebaran nanti akan menghadapi kendala terkait ketersediaan SPBU. Sebab jalan tol sepanjang 116 km hanya memiliki 2 SPBU, padahal arus mudik meningkat dapat mereka dapat kehabisan bahan bakar di tengah kemacetan.

Pimpinan Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyatakan, jarak yang sedemikian jauh akan sangat riskan bagi pemudik.

“Tol yang dibuat ini pasti akan bertumpuk di dua SPBU ini, tolong pikirkan upaya lain,” ujar Kardaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6).

Seluruh kendaraan beroda empat yang melewati Pantura, lanjut Kardaya, tentu akan melewati jalur tersebut kecuali kendaraan beroda



dua. Untuk itu, Kardaya mengusulkan dilakukan operasi pasar guna menangani masalah ini.

“Misal saja adakan mobil yang membawa BBM, jika tidak maka akan sangat beresiko,” katanya.

Selain itu, ia mengusulkan adanya *call center*, atau mobilisasi pengantaran BBM menggunakan roda dua. Sebab, menjelang arus mudik, tol sudah pasti akan padat. Bahkan bahu jalan pun akan terpakai,

jelas hal ini akan menyulitkan mobil-mobil tanki untuk menerobos macet.

Menurutnya, hal ini akan bertambah pelik saat SPBU yang hanya berjumlah dua kehabisan stok. Namun, mobil tanki tak dapat masuk lantaran jalan macet total.

“Kami minta selain ada dua SPBU, ada 2 mobil BBM. Jangan lihat perkembangan arus baru ditangani karena akan susah nantinya,” cetusnya. /Ismed Eka Kusuma

Pertamina Butuh USD400 Juta/Hari untuk Impor BBM

Kebutuhan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) meningkat menjelang ramadhan dan lebaran. PT Pertamina (persero) mengaku membutuhkan biaya importasi BBM hingga USD500 juta per hari atau sekitar Rp6,5 triliun/hari.

“Kapasitas kilang minyak kita maksimum 850.000 barel per hari. Namun kenaikan permintaan akan BBM tadi perlu diantisipasi dengan impor,” ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto Kamis (18/6).

Untuk mencukupi kebutuhan BBM di bulan ramadhan dan lebaran yang meningkat hingga dua juta barel per bulan, Pertamina membutuhkan dolar AS sekitar USD400-500 juta per hari.



“Sehari rata-rata Pertamina membutuhkan USD400-500 juta untuk importasi BBM,” tambahnya.

Padaحال, kebutuhan dolar untuk impor BBM era Karen Agustiawan ketika menjabat sebagai dirut Pertamina tidak mencapai setengahnya, bahkan dengan konsumsi sekitar 48 juta Kiloliter, Pertamina membutuhkan sekitar USD150 juta per hari.

Apabila kebutuhan dolar Pertamina terus meningkat seperti ini, dikhawatirkan kurs rupiah terhadap dolar sulit turun. Diperlukan kebijakan revolusioner dari pemerintah, khususnya di bidang energi. Sepertinya, pengalihan perdagangan Petral-PES ke ISC membuat Pertamina

membutuhkan mata uang dolar yang banyak.

Mantan Komisaris Pertamina Sugiharto mengatakan bahwa salah satu resiko terbesar bangsa Indonesia adalah kenaikan harga minyak dunia. Dengan dibubarkannya Petral-PES akan kehilangan potensi jaringan USD5,1 miliar atau Rp65 triliun. Impor minyak mentah selama ini berbentuk dolar, sedangkan Pertamina menjualnya dalam satuan rupiah, Pertamina meminta cadangan devisa nasional melalui Bank Indonesia (BI).

“Pertamina selalu meminta cadangan devisa ke BI untuk melakukan impor hingga USD200 juta per hari. Dalam berbagai kesempatan, Pertamina sering kesulitan mendapatkan devisa,” jelasnya. /Ismed Eka Kusuma

Mengapa Air Harus Dikuasai Negara?

Teorinya sederhana: kelangkaan akan meningkatkan nilai atau harga.

Ketika BBM langka maka harga BBM akan meningkat. Jadi, siapa yang menguasai atau memiliki BBM dalam jumlah besar maka dia akan diuntungkan. Bahkan, dapat mengontrol harga BBM.

Ketika CEO perusahaan multinasional Dow Chemical Company Andrew Liveris pada 2008 lalu mengatakan kepada *The Economist* bahwa "*Water is the oil of the 21st century*", ini artinya air sudah menjadi barang langka.

Secara eksplisit, Andrew Liveris saat itu ingin mengatakan bahwa sebenarnya air sudah bukan lagi barang bebas, seperti udara. Jadi untuk mendapatkan sejumlah air, manusia harus melakukan pengorbanan. Membelinya atau menukarkan dengan uang.

Ya. Kini air kini menjadi komoditas penting dan strategis bagi beberapa lembaga keuangan dan perbankan multinasional. Bahkan, air kini menjadi komoditas yang sudah diperdagangkan di *global stock exchanges*.

Sekadar catatan, lembaga keuangan global seperti Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank, Barclays Bank, Blackstone Group, Allianz, sampai HSBC Bank bahkan sudah cukup lama melakukan konsolidasi untuk penguasaan baru di bisnis global air ini.

Itu belum beberapa catatan orang kaya seperti miliuner Li Ka Shing (Hongkong) atau Manuel V Pangilinan (Philipina) di bisnis air. Atau perusahaan yang "membeli" ratusan hektar tanah yang mengandung deposit air dalam jumlah cukup besar. Di Indonesia saja, beberapa

perusahaan air mineral bahkan sudah menjadi "kuasa" atas beberapa sumber mata air.

Mengapa air menggantikan minyak?

Untuk diketahui, hanya 2,5 persen air yang ada di bumi ini berbentuk air segar (*fresh water*). Dari 2,5 persen itu, sekitar 70 persen berbentuk gleser (es salju) dan cadangan air bawah tanah (*aquifers*).

Jadi hanya sekitar 0,007 persen air segar (*fresh water*) yang bisa diakses langsung oleh manusia. Disamping untuk air minum, manusia menggunakan air itu untuk kebutuhan pertanian dan industri. Bisa dibayangkan, air yang ada dipaksa untuk memenuhi kebutuhan air sekitar 7 miliar manusia yang hidup di bumi saat ini. Itu belum peruntukan industri dan pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

PBB mengeluarkan sebuah kajian bahwa sekitar 3 miliar manusia saat ini akan berhadapan langsung dengan kelangkaan air di tahun 2025. Data dari Organization for Economic Corporation & Development (OECD) bahkan memperkirakan masalah kelangkaan air akan dihadapi sekitar 3,5 miliar 2030 nanti.

Data dari China Institute for Geo-Environment Monitoring menyatakan, sekitar 360 kota dari sekitar 600 kota yang ada di Tiongkok mengalami kelangkaan

air. Itu belum catatan negara-negara lain yang mengandalkan industrialisasi

Andrew Liveris



sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonominya.

Jadi logikanya sederhana, tanpa air, tidak ada industri dan sektor pertanian. Jika air (kualitas maupun kuantitas) berkurang terus maka industri dan pertanian akan terpuak. Yang lebih buruk lagi, keseimbangan ekologis akan terganggu.

Ini yang menjadi alasan penting mengapa air akan menjadi isu besar menggantikan isu energi (minyak dan gas bumi) ke depan. Tak salah kalau beberapa perusahaan dan keuangan multinasional sangat serius soal ini. Bagi mereka, kelangkaan adalah keuntungan besar. Kemudian, dengan langkah-langkah besar untuk menguasai air maka, ke depan, mereka akan menguasai dan mengontrol air di dunia.

Jadi tak salah kalau mulai



Penjual air bersih dengan menggunakan truk tanki mengalirkan air untuk kebutuhan warga di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Sei Lakam, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (19/5).

yang ingin melakukan privatisasi infrastruktur air di negara-negara yang ada di seluruh dunia. Termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air harus diapresiasi.

MK sudah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak.

“Persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad),” kata Wakil Ketua MK Anwar Usman saat membacakan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam sidang soal UU SDA beberapa waktu lalu.

Sekarang, tinggal rezim Jokowi-JK yang melanjutkan langkah-langkah besar selanjutnya agar sumber daya air milik negara bangsa ini tidak diprivatisasi atau dikontrol oleh perusahaan/swasta.

Kita tunggu, apa yang dilakukan pemerintah kali ini. ■ Andy Abdul Hamid/Zaenal Arifin

beberapa tahun belakangan ini perusahaan keuangan besar mulai membentuk divisi khusus yakni *water targeted investment funds*. Beberapa nama sudah mulai kondang di industri keuangan global seperti Pictet Water Fund, SAM Sustainable Water Fund, Sarasin Sustainable Water Fund, Swisscanto Equity Fund Water atau Tareno Waterfund.

Bahkan beberapa bank multinasional sudah menawarkan beberapa *structured water products* untuk air seperti ABN Amro Water Stocks Index Certificate, BKB Water Basket, ZKB Sustainable Basket Water, Wagelin Water Shares Certificate, UBS Water Strategy Certificate atau Certificate on Vontobel Water Index.

Beberapa bank besar juga sudah mengeluarkan *water index* seperti

Credit Suisse Water Index, HSBC Water, Waste, and Pollution Control Index, Merrill Lynch China Water Index, S&P Global Water Index, First Trust ISE Water Index Fund (FIW) atau International Securities Exchange's ISE-B&S Water Index misalnya.

Peringatan Buat Indonesia

Data yang dimiliki Aktual memperlihatkan bahwa tren privatisasi *water utilities* and *infrastructure global* oleh perusahaan atau individual sampai 2014 kemarin sudah mencapai angka lebih dari 10 persen. Sisanya masih dikuasai negara. Angka ini akan berlipat dua pada 2030 nanti.

Di sisi pembiayaan, beberapa perusahaan multinasional mulai *me-backup* beberapa perusahaan

Kenali Takdir Geopolitik Indonesia dan Aneka Corak Perang Asimetris

Menyusul terjadinya pergeseran geopolitik abadi 21 dari Atlantik ke Asia Pasifik, tak pelak lagi Indonesia bakal menjadi “sasaran arena pertarungan” antara dua kekuatan adidaya, Amerika Serikat dan Tiongkok. Seperti ungkapan Bung Karno pada 1930-an: “Bahwa Asia-Pasifik akan jadi pusat-nya dunia, perang lautan teduh adalah babak pembuka Kemerdekaan Asia Raya. Kelak Eropa hanya jadi benua tua yang sakit-sakitan sementara Asia Pasifik akan tumbuh bak gadis molek yang menghantui setiap pikiran lelaki” di sini Sukarno sudah meletakkan pandangan geopolitiknya yang amat menjangkau masa depan.”

Barang tentu, yang ada dalam benak Bung Karno kala itu, salah satu yang dimaksud sebagai “bak gadis molek yang menghantui pikiran lelaki” adalah Indonesia. Bayangkan.

Pertama, bahwa dalam perspektif politik (kolonialisme) global, Indonesia diletakkan: (1) sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju; (2) sebagai pasar bagi barang-barang jadi yang dihasilkan oleh negara-negara industri maju; dan (3) diposisikan sebagai pasar guna memutar ulang kelebihan kapital yang diakumulasi oleh negara-negara industri maju tersebut. Ketiga hal di atas adalah analisa Bung Karno di dekade 1930-an yang kini jadi nyata adanya.

Kedua, faktor geoposisi silang di antara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia merupakan kawasan yang tidak boleh menjadi ancaman bagi kepentingan-kepentingan asing, sehingga aman dan nyaman bagi keberlangsungan hilir mudik pelayaran lintas negara bahkan benua, kenapa? Sebab 80% perdagangan dunia melalui Indonesia

dimana 50% adalah tanker-tanker minyak dunia.

Dengan kata lain, ini merupakan takdir geopolitik Indonesia yang jarang dipunyai oleh negara-negara lain di dunia. Sebuah letak geografis yang berada antara dua benua (Asia dan Australia) serta di antara dua samudera (Lautan Hindia dan Lautan Pasifik). Maka, ketika ditarik masing-masing garis akan membentuk persilangan di peta Indonesia. Dan sudah bisa dipastikan, posisi yang demikian niscaya memiliki daya tawar tinggi di panggung global.

Dengan begitu, keberadaan dalam pusaran serta lintasan dua samudera di jalur pelayaran (serta penerbangan) internasional, meniscayakan pelabuhan-pelabuhannya baik pelabuhan laut maupun bandara udara menjadi persinggahan atau titik transit strategis bagi hilir-mudik pelayaran dan penerbangan jenis apapun di dunia. Inilah urgensi simpul-simpul transportasi di posisi (geopolitik) silang.

Data menggambarkan, bahwa Indonesia memiliki 39 selat dimana 4 selatnya termasuk *chokepoint shipping* dari 9 selat-selat tersibuk di dunia semacam Selat Hormuz, atau Selat Malaka, dan lain-lain.

Saat ini saja, “Hampir 50 persen perdagangan laut komersial dunia dilakukan melalui perairan Indonesia dan perairan regional kawasan ini. Hampir dipastikan bahwa negara-negara lain sebagai pengguna jalur strategis ini memiliki arti yang sangat vital dan strategis bagi perdagangan internasional”.

Ya, Indonesia punya satu senjata ampuh, yaitu takdir geopolitik yang akan tumbuh sebagai pusat perebutan pengaruh geopolitik para adidaya dan menjadi pusat



Petani menyiram tanaman jagung di persawahan yang telah diapit oleh perumahan di Gampengrejo, Kediri, Jawa Timur, Jumat (12/6).

gravitasi perekonomian global. Luas wilayah yang mendominasi kawasan Asia Tenggara, penduduk terbanyak dan sumberdaya alam (SDA) terkaya di kawasan Asia Tenggara, menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama dan kunci stabilisator keamanan kawasan.



Sasaran Perang Asimetris Asing

Nilai strategis Indonesia secara geopolitik ini barang tentu akan mencegah bumi nusantara ini menjadi sasaran invasi militer negara-negara asing seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang maupun Tiongkok. Jelasnya, Indonesia tidak mungkin akan diserang secara militer sebagaimana serbuan terhadap Afghanistan, Irak, Syria, Libya, dan lain-lain oleh negara maupun pakta-

pakta pertahanan manapun dengan alasan apapun. Artinya, Indonesia tidak akan ditaklukkan melalui Perang Simetris atau Perang dengan mendayagunakan sarana-sarana militer.

Begitupun, Indonesia tetap menjadi sasaran strategis negara-negara adidaya untuk ditaklukkan melalui Perang Asimetris. Maka Indonesia akan menjadi Medan Tempur bagi para adidaya baik Barat

maupun Timur tetapi dilakukan secara asimetris (non militer) dalam rangka memperebutkan hal-hal yang telah diurai di atas tadi.

Apa hakekat Perang Asimetris yang sesungguhnya? Perang asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara nirmiliter (non militer) namun daya hancurnya tidak kalah bahkan dampaknya lebih dahsyat daripada perang militer. Ia memiliki medan atau lapangan

tempur luas meliputi segala aspek kehidupan (astagatra). Pancagatra terdiri dari unsur: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Pertahanan-Keamanan. Sedangkan Trigatra meliputi unsur-unsur: Kependudukan, Sumberdaya Alam dan Geografi.

Adapun sasaran pada perang asimetris ini ada tiga: (1) belokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme, (2) lemahkan ideologi serta ubah pola pikir rakyatnya, dan (3) hancurkan ketahanan pangan dan *energy security* [jaminan pasokan energinya], pasokan energinya, selanjutnya ciptakan ketergantungan negara target atas kedua hal tersebut [*food and energy security*]. Sehingga daulat energi dan pangan kita benar-benar dalam bahaya.

Sedangkan muara ketiga sasaran tadi senantiasa berujung pada kontrol terhadap ekonomi dan penguasaan Sumber Daya Alam sebuah negara, sebagaimana doktrin yang ditebar oleh Henry Kissinger di panggung politik global: “*Control oil and you control nations, control food and you control the people.*” (Kontrol minyak maka anda mengendalikan negara, kendalikan pangan maka anda menguasai rakyat).

Kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti Global Future Institute, ternyata ada dua bentuk atau model dalam peperangan asimetris. Pertama, melalui aksi massa di jalanan dalam rangka menekan target sasaran. Kedua, melalui meja para elit politik dan pengambil kebijakan negara agar setiap kebijakan yang diterbitkan sejalan, selaras, dan senantiasa pro asing guna meraih tiga hal sesuai definisi perang asimetris, yaitu:

Termasuk dalam hal ini adalah “Gerakan Mei 1998” merupakan wujud peperangan nirmiliter di Indonesia via aksi massa. Ia bukanlah murni gerakan moral mahasiswa turun di jalanan, kenapa? Betapa aksi tersebut sudah ditumpangi oleh berbagai kepentingan baik internal dan

eksternal, terutama kepentingan (kolonialisme) asing guna menjatuhkan rezim Orde Baru. Bahkan Karen Brooks, penulis Amerika mengisyaratkan, sesungguhnya Arab Spring itu meniru aksi massa pada Mei 1998 di Jakarta yang bertajuk gerakan reformasi. Itulah jenis dan contoh pertama peperangan asimetris bermodus: “Aksi Massa Jalanan”.

Adapun bentuk kedua perang nirmiliter adalah: “Melalui Kebijakan Negara.” Bagaimana caranya? Seperti kita tahu, di sebuah negara yang jadi sasaran niscaya ditaruh pion-pion kolonialisme (asing) di tempat dan/atau jabatan-jabatan strategis dalam negara/pemerintah, atau bisa juga dengan dibentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu (atas inisiasi asing), lalu di-‘pahlawan’-kan ke publik sebagai LSM kredibel mewakili aspirasi rakyat.

Pemakaian istilah “LSM tertentu” dalam catatan ini, sebenarnya ingin berpesan kepada pembaca bahwa tidak semua LSM terlibat dalam *asymmetric warfare* yang di gelar oleh asing. Masih banyak LSM yang benar-benar pro rakyat dan bernafaskan nasionalisme.

Beredar informasi bahwa terdapat Kementerian, atau institusi negara tertentu dinilai sebagai sasaran “pembinaan dan kaderisasi asing.” Artinya, bahwa sosok yang duduk (dan menjabat) disana merupakan ‘binaan kolonialisme’ untuk setiap terbit kebijakan strategis agar selalu serta senantiasa pro asing.

Hal ini dengan jelas terlihat secara tersurat maupun tersirat melalui berbagai program, pernyataan, bahkan kebijakan-kebijakannya. Sebab, perilaku (kebijakan) jelas merupakan cermin dari motivasi (tujuan tersembunyi)-nya!

Coba saja cermati beberapa kementerian seperti ESDM, BUMN, Luar Negeri, bahkan Pertanian dan Pendidikan Nasional. Apalagi Kementerian Koordinasi Ekonomi dan Keuangan.



M Arief Pranoto

Pola Perang Asimetris

Menurut kajian mendalam dari rekan saya M Arief Pranoto, *research associate* Global Future Institute, ada semacam persamaan pola antara perang konvensional yang mengerahkan kekuatan militer secara terbuka dengan peperangan asimetris yang cenderung non militer (dan non kekerasan) --- sejatinya mereka itu serupa tetapi tidak sama. Serupa pada “pola”-nya, tak sama atau berbeda dalam hal “sifat dan aksi-aksi”-nya.

Pola perang konvensional mungkin telah baku di dunia militer. Tahap pertama: “Bombardir,” entah bombardir melalui pesawat tempur, atau pasukan artileri (udara) jarak jauh, dan sebagainya; Tahap kedua: “Masuknya pasukan kavaleri” berupa tank-tank, atau kendaraan lapis baja lain; dan tahap ketiga: “Pendudukan oleh infanteri.”

Inilah pola lazim dan garis besar pada perang militer secara terbuka. Ternyata tahapan dalam perang asimetris juga persis sama dengan perang konvensional. Isu-isu yang ditebarkan oleh pihak-pihak terkait dan terlibat (LSM dan/atau sosok tertentu). Dalam “Aksi Mei 1998” misalnya, isu yang disebar ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka menggiring opini publik adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tampaknya demikian pula dengan

Arab Spring yang terjadi di Tunisia dan Mesir di Jalur Sutera. Isunya hampir tidak berbeda dengan kejadian di Jakarta karena berkisar tentang kemiskinan, korupsi, demokrasi, pemimpin tirani, dan lain-lain. Itulah isu selaku bahan baku dan/atau taburan awal sebuah *asymmetric warfare* melalui aksi massa.

Sedang “Masuknya Kavaleri” sebagaimana tahapan perang militer di muka, dalam perang asimetris disebut tema atau agenda. Sekali lagi, Arab Spring contohnya, “tema”-nya ialah gerakan massa guna menurunkan rezim penguasa setelah sebelumnya dibombardir oleh isu-isu. Demikian juga dengan tema atau agenda aksi massa di Jakarta pada Mei 1998 dahulu, kendati kejatuhan elit penguasa sesungguhnya hanya pintu pembuka untuk kolonialisme yang lebih luas, masif dan sistematis. Itulah sekilas tentang tema dalam perang non militer.

Tahap akhir dalam pola perang militer adalah “Masuknya Infanteri” guna menduduki wilayah target. Maka analog pola ini dalam perang nirmiliter adalah kendali sistem ekonomi dan kontrol SDA di negara target. Itulah skema penjajahan di muka bumi sebagaimana doktrin kolonialisme yang dihembuskan oleh Henry Kissinger di muka.

Dengan demikian, pola-pola yang sama baik pada perang konvensional maupun perang nirmiliter namun aksi-aksinya berbeda. Bila peperangan militer tahapannya: “Bombardir” --- “Masuknya Kavaleri” --- “Pendudukan oleh Infanteri,” sedang pola peperangan non militer tahapannya ialah: “Isu” --- “Tema” --- “Skema.” Sekali lagi, keduanya sebenarnya serupa tetapi tak sama, berbeda-beda tetapi (tujuan) sama.

Pola lain yang layak dicermati pada *asymmetric warfare* adalah modus *proxy* (boneka, atau perwalian/

pengganti). Dengan kata lain, pada penyebaran “isu” misalnya, ia memiliki orang, LSM. atau lembaga tersendiri, dan seterusnya yang “digaji” karena perannya sebagai pengganti atau ‘boneka’. Demikian pula dalam upaya penggebyaran “tema” --- kaum peremot perang semacam ini juga memiliki orang-orang, atau LSM, punya media massa, media sosial, situs-situs khusus, dan lainnya. Dan uniknya, antara komprador di tahapan isu dan boneka di tahapan tema kerap kali tidak saling mengenal antara satu dengan lainnya.

Sedangkan untuk memuluskan “skema” sebagai tahapan akhir dari pola perang nirmiliter,



lazimnya dipasang orang, atau kelompok yang bermain pada tataran kebijakan negara cq rezim kala itu. Artinya ia atau mereka bisa jadi selaku staf ahli, bahkan sebagai pejabatnya sendiri, dan lain-lain. Inilah yang disebut oleh Bung Karno sebagai kaum komprador, yaitu orang atau kelompok yang justru akan menghancurkan bangsa dan negaranya sendiri dengan berbagai alasan dan pembenaran.

Mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, sudah ditanam sebagai aktor kunci dalam tata kelola Migas sejak menjadi staf ahli di kementerian ESDM. Misinya, agar dalam merumuskan arah kebijakan tata kelola Migas maupun perumusan RUU Migas sesuai dengan skema korporasi-korporasi Migas global di Washington seperti ExxonMobile, Chevron, Connoco Philip, British Petroleum, dan sebagainya, yang muaranya kita tahu dengan disahkannya UU Migas No 22 tahun 2001, menggantikan UU No 8/1971. Yang mana melalui UU tersebut, Pertamina berhasil dilumpuhkan sebagai pemegang otoritas tata kelola Migas dari hulu ke hilir.

Dengan dipecahnya tata kelola Migas menjadi 3 lembaga: SKK Migas untuk menangani sektor hulu Migas, Petral untuk perdagangan dan pengadaan, dan sektor hilir ditangani oleh BPH Migas.

Alhasil, melalui perang asimetris, sejak 2003 kita tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak, melainkan tergantung pada impor dari 16 negara. Inilah daya rusak dari perang asimetris yang berhasil dilancarkan oleh para penyusun skema kapitalisme global di Washington. Sekadar informasi, UU Migas No 22/2001 sudah digodok di Washington sejak 1997.

Maka itu, untuk mengenali agenda tersembunyi di balik perang asimetris yang dilancarkan Amerika dan Uni Eropa, kita harus menyadari bahwa muara dari prinsip ekonomi neoliberal adalah diterapkannya

doktrin SAP (Structural Adjustment Program) atas arahan dari International Monetary Fund(IMF) dimana butiran-butirannya sebagai berikut: (1) perluas kran impor dan adanya aliran uang yang bebas; (2) devaluasi; (3) kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembebasan tarif kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga kebutuhan publik.. (4) Privatisasi BUMN.

SAP inilah sasaran strategis dari dilancarkannya perang asimetris oleh negara-negara barat, terutama AS dan Uni Eropa. SAP merupakan alat IMF untuk mengendalikan negara kreditur, serta tak boleh dielak inilah sumber dari *asymmetric warfare* melalui pintu “Kebijakan Negara.” Inilah bentuk atau model kedua perang asimetris ---selain model pertamanya ialah gerakan massa---sebagaimana diulas di muka.

Masih ingat sewaktu maraknya kasus Flu Burung? Jika kita cermati, “Marak”-nya flu burung misalnya, pada perang nirmiliter hanyalah sekedar isu permulaan, karena tema yang akan diangkat kemudian ialah daging langka/mahal, sedang skemanya adalah memperluas impor daging sebagaimana butiran SAPs-nya IMF.

Atau, isu beras langka, atau beras mahal pun demikian --- itu cuma tebaran isu karena niscaya akan disusul dengan agenda/tema untuk memperluas impor. Dalam konteks ini, perluasan impor bisa jadi cuma sekedar tema, namun boleh jadi merupakan skema gerakan. Tergantung keadaan. Artinya, jika perspektif asimetris memandang perluasan impor hanya sekedar tema, maka skema yang akan dijalankan atau ditancapkan ialah ekspansi korporasi-korporasi pangan milik asing guna menguasai kantong-kantong logistik di sebuah negara.

Akibatnya, seperti sekarang ini, daulat migas dan pangan kita benar-benar dalam bahaya.

Lantas, bagaimana dengan modus perang asimetris yang dilancarkan Tiongkok?



Presiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping (kanan).

Mengurai Modus Perang Asimetris ala Tiongkok

Strategi Tiongkok dalam menanam dan menebar benih kolonialisme gaya baru terhadap Indonesia, jelas patut diwaspadai mengingat Tiongkok memang

jagonya perang asimetris, dengan menggunakan sarana sarana non militer untuk penaklukan sebuah bangsa. Dan mereka punya ahlinya Perang Asimetris, Sun Tzu.

Ada sebuah panduan dari Sun Tzu yang pastinya dihayati betul oleh Presiden Cina Xi Jinping. Berkata Sun Tzu: Mendapatkan seratus kemenangan dari seratus pertempuran bukanlah puncak kecakapan.

Menaklukkan musuh tanpa bertempur adalah sebenarnya puncak kecakapan.

Memang belum ada rujukan yang pasti. Namun jika dilacak dari model kebijakan politik terbaru yang dikembangkan ketika hendak memasuki abad ke 21. Betapa Tiongkok sejak reformasi, menurut Prof. Wang Gung Wu dalam seminar di CSIS, 16 November 1997, mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang melahirkan *One Country and Two System*, yakni sistem negara dengan elaborasi ideologi sosialis/komunis dan kapitalis. Dengan kata lain, model perekonomanian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara cq Partai Komunis Tiongkok.

Poin penting di sini, titik berat konsep ini adalah swasta pada satu sisi, sedang peran negara diperkecil di sisi lain. Artinya, para pengusaha boleh di depan membuka ladang-ladang usaha-usaha di luar negeri, tetapi ada *back up* militer (negara) di belakangnya. Itu titik poin konsepsi *One Country and Two System* yang kini tengah dijalankan oleh Tiongkok di berbagai belahan dunia.

Ciri lain Tiongkok dalam menerapkan reformasi politiknya, jika ke dalam ia gunakan 'pendekatan naga' terhadap rakyatnya. Sangat keras, tegas, bahkan tanpa kompromi demi stabilitas di internal negeri. Kasus di lapangan Tianamen merupakan bukti nyata, betapa Negeri Tirai Bambu tidak terpengaruh oleh angin surga demokrasi, HAM, freedom, dll yang digemborkan oleh Barat. Termasuk dalam hal ini adalah hukuman (tembak) mati bagi para koruptor, dan lain-lain.

Lalu ketika Tiongkok melangkah kaki keluar, tata cara pun diubah, ia menerapkan 'pendekatan panda' (simpatik). Sangat bertolak belakang dengan kebijakan internalnya. Menebar investasi misalnya, ataupun "bantuan dan hibah" dalam wujud pembangunan gedung-gedung, infrastruktur, dan lain-lain sudah

barang tentu dengan persyaratan "tersirat"-nya yang mengikat.

Berdasarkan diskusi terbatas yang dilakukan oleh Global Future Institute terkait soal ini, sedikit banyak terungkap sebuah modus perang asimetris ala Tiongkok yang kiranya perlu diwaspadai oleh para pemangku politik-keamanan kita.

Konsep kunci di sini adalah, *Turnkey Project Management*. Ini merupakan sebuah model investasi asing yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Tiongkok kepada negara peminta dengan "sistem satu paket," artinya mulai dari top manajemen, pendanaan, material dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli) kasarnya di-*dropping* dari Tiongkok.

Modus *Turnkey Project* ini relatif sukses dijalankan di Afrika sehingga warganya migrasi besar-besaran bahkan tak sedikit yang menikah dengan penduduk lokal. Mereka menganggap Afrika kini sebagai tanah airnya kedua. Timor Leste pun tampaknya demikian, betapa bangunan fisik beberapa kantor kementerian bermotif ala Tiongkok yang katanya hibah dari pemerintahan Negeri Tirai Bambu. Makanya Xanana Gusmao ketika menjabat Perdana Menteri sangat *welcome* terhadap militer Tiongkok.

Beberapa investasi Tiongkok di Indonesia, sebenarnya telah menerapkan modus ini. Bukan barang baru memang, karena sejak dulu sudah berjalan. Penelusuran penulis, Sinar Mas (Indah Kiat) ketika membangun pabrik pulp dan paper juga menerapkan *Turnkey Project*. Atau pembangunan pembangkit tenaga listrik di Purwakarta, hampir semua tenaga kerja mulai dari direksi hingga kuli bangunan didatangkan dari negeri Tiongkok.

Demikian juga sewaktu pembangunan Lippo Karawachi dekade 1990-an dikerjakan oleh para pekerja Tiongkok, termasuk di Muara Jawa, Kutai Kertanegara, dan lain-lain.

Maka boleh ditebak, bahwa (rencana) pembangunan Terusan Brito di Nikaragua dan Kanal

Isthmus di Thailand oleh Cina niscaya menerapkan *Turnkey Project Management* pula. Artinya bakal ada migrasi besar-besaran warga Tiongkok ke Nikaragua dan Thailand guna mengerjakan proyek spektakuler tersebut sebagaimana yang akan terjadi di Medan, dimana Tiongkok membawa sekitar 50.000 orang tenaga (warga) kerjanya.

Bila investasinya di Medan saja mendatangkan sekitar 50.000-an orang, lalu berapa warga lagi bakal migrasi melalui investasi Tiongkok pada 24 pelabuhan laut, 14 pelabuhan udara dan sekitar 8000-an kilometer jalur kereta api di Indonesia, selain rencana mempererat hubungan bilateral Tiongkok - Indonesia menargetkan pertukaran sepuluh juta warganya dalam berbagai bidang pada dekade 2020-an nanti?

Menurut Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang, rencana tersebut berpeluang menimbulkan persaingan budaya antara warga Tiongkok dengan pribumi. Bisa terjadi pertarungan untuk mempertahankan siapa lebih dominan, mengingat jumlah 10 juta jiwa itu bukan sedikit.

Dikhawatirkan hal ini merupakan strategi Tiongkok untuk menguasai Indonesia secara non militer. Secara perlahan ia memasukkan warganya ke Indonesia, kemudian mendesak keluar warga pribumi Indonesia pada peran di sektor-sektor strategis di Indonesia diganti warga Tiongkok. Hingga akhirnya, pemilik Indonesia bukanlah orang-orang keturunan nusantara, tetapi adalah orang-orang Tiongkok.

Maka dari itu, seyogyanya sejak dari sekarang dan kedepan, segenap komponen bangsa ini secara bertahap wajib diajarkan tentang geopolitik (geostrategi, geoekonomi), terutama pemahaman tentang perang non militer (*asymmetric warfare*) beserta varian terbarunya seperti hybrid war, proxy war, dsb --- agar anak-anak bangsa ini memahami secara mendalam serta utamanya tidak terseret oleh "skema kolonialisme" yang digelar oleh siapapun adidaya di Bumi Pertiwi. ■ Hendrajit

Meredam Eskalasi Konflik di Laut China Selatan

Langkah asertif China membuat pulau-pulau buatan di Laut China Selatan dan menghadirkan militernya di sana telah meningkatkan ketegangan. Indonesia pun berinisiatif mengusulkan patroli bersama, untuk meredakan ketegangan.



Sengketa wilayah di Laut China Selatan --yang melibatkan Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam—akhir-akhir ini semakin memanas. Tiongkok mereklamasi gugus karang di perairan tersebut, yang dijadikan pulau-pulau buatan dan membangun fasilitas militer di sana. Bahkan pada penghujung Mei 2015, Tiongkok terpantau telah menempatkan sedikitnya dua artileri swagerak di pulau hasil reklamasi tersebut.

Terpaan angin konflik dari Laut China Selatan (LCS) juga sampai ke Indonesia. Mengantisipasi kemungkinan pecahnya konflik militer terbuka, meskipun Indonesia tak punya sengketa wilayah di LCS, Tentara Nasional Indonesia tentu tidak mau kecolongan. Sehingga TNI Angkatan Udara bersiap meningkatkan status Pangkalan Udara (Lanud) Ranai, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Pulau Natuna yang kaya dengan sumberdaya migas ini memang

Konstruksi landasan terbang di Fiery Cross Reef di Laut China Selatan di foto pada 2 April 2015. Sebaran citra satelit tersebut diperoleh Reuters pada 16 April, 2015.

berhadapan langsung dengan LCS.

TNI-AU meningkatkan status Lanud Ranai dari status C menjadi status B, yakni menjadi pangkalan udara yang siap operasi. Lanud Ranai yang berada di bawah kendali Komando Operasi Angkatan Udara I ini menjadi salah satu lanud yang berbatasan langsung dengan LCS dan berada di wilayah terdepan Indonesia. Dengan potensi konflik yang meningkat di LCS, Natuna praktis menjadi wilayah rentan sekaligus strategis sebagai basis pertahanan.

Kenaikan status lanud ini diharapkan bisa mendukung operasi-operasi udara dan latihan, bagi pengamanan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan status ini akan diikuti dengan penambahan alat utama sistem persenjataan. Di antaranya: penambahan satu skadron pesawat

tempur, infrastruktur pendukung, seperti memperpanjang landasan pacu. Kemudian, akan ada penempatan Pasukan Khas (Paskhas) TNI-AU.

Selama hampir satu setengah tahun terakhir, suasana konflik di kawasan LCS --yang kaya sumberdaya minyak dan gas ini—memang semakin tegang. Berdasarkan citra hasil pantauan satelit dan pengamatan pesawat pengintai P-8A Poseidon milik Amerika, Tiongkok terlihat membangun landasan udara dan sistem keamanan di pulau-pulau hasil reklamasi. Muncul spekulasi bahwa Tiongkok akan menetapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di sekitar wilayah sengketa.

Mengancam Kebebasan Navigasi

Implementasi ADIZ akan mewajibkan semua pesawat atau kapal yang melintasi zona itu untuk menginformasikan keberadaan mereka pada pihak berwenang Tiongkok. Pemberlakuan ADIZ, yang ditentang keras oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekitar LCS, itu akan membuat Tiongkok semakin kuat dalam mempertahankan klaimnya atas wilayah maritim di LCS. AS telah memperingatkan, tindakan Tiongkok itu akan mengancam kebebasan navigasi dan keamanan wilayah Asia Pasifik.

Berbagai masalah ini diangkat dalam acara tahunan Shangri-La Dialogue 2015 di Singapura, yang diselenggarakan oleh IISS (International Institute for Strategic Studies). Dalam forum yang dihadiri para menteri pertahanan dari berbagai negara Asia, plus Amerika Serikat dan Australia itu, banyak negara mengancam Tiongkok karena perilaku asertif “membangun pulau-pulau palsu” di LCS. Tiongkok telah mengklaim sekitar 95 persen wilayah maritim LCS sebagai wilayah teritorialnya, berdasarkan “bukti-bukti legal dan warisan sejarah.”

Presiden AS Barack Obama di Washington pada 1 Juni 2015 menyebut, proyek reklamasi Tiongkok di LCS sangat kontraproduktif dengan pencapaian

mereka saat ini. Obama menyerukan agar Tiongkok menghentikan aksi agresifnya. Sedangkan Menteri Pertahanan AS Ashton Carter pada 30 Mei 2015 meminta Tiongkok menghentikan proyek konstruksinya di pulau-pulau buatan, karena akan meningkatkan risiko konflik di wilayah itu.

Tetapi permintaan Carter ditolak oleh Wakil Kepala Staf Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) Laksamana Sun Jianguo. Sun menegaskan, tindakan Tiongkok bersifat damai dan memiliki legitimasi. Menurutnya, tindakan reklamasi adalah wujud kebebasan kedaulatan Tiongkok dan bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab internasional.

“Tiongkok selalu lebih memperhatikan kepentingan yang lebih besar terkait keamanan maritim. Saya harap negara-negara terkait dapat bekerjasama menuju tujuan yang sama, untuk membangun Laut China Selatan yang damai, bersahabat, dan kooperatif,” ujarnya. Sebaliknya, Sun menyerukan pada negara-negara lain untuk berhenti menabur perselisihan.

Menurut Sun, tujuan reklamasi adalah untuk meningkatkan fungsi pulau dan terumbu karang, termasuk kondisi personel yang ditempatkan di sana. “Hal ini demi memenuhi tanggung jawab Tiongkok dalam upaya pencarian dan penyelamatan maritim, pencegahan bencana, penelitian ilmu pengetahuan, observasi meteorologi, perlindungan lingkungan, keamanan navigasi, produksi perikanan, dan pelayanan,” katanya.

Usulan Menhan Ryamizard

Tiongkok balik menuduh bahwa AS-lah yang melakukan provokasi di wilayah yang bukan wilayah kekuasaannya. Duta Besar Tiongkok untuk AS, Cui Tiankai, mengatakan, justru tindakan AS dengan segala retorikanya yang membuat wilayah LCS tidak stabil. Pengintaian oleh pesawat P-8A Poseidon milik AS beberapa waktu lalu disebut sebagai tindakan yang memprovokasi dan



Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu memberikan sambutannya dengan topik "New Forms of Security Collaboration in Asia" dalam acara Shangri-la Dialogue, di Singapura, pada Juni 2015 lalu.

meningkatkan ketegangan.

Di tengah pertentangan pandangan yang tajam antara Tiongkok di satu sisi dengan AS dan negara-negara lain di sisi berbeda, Indonesia mencoba memprakarsai upaya peredaaan ketegangan. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, dalam forum Shangri-La Dialogue, mengajukan gagasan agar semua negara mengklaim, termasuk Tiongkok, menggelar patroli damai bersama di perairan LCS. Ide seperti itu pernah dimunculkan AS, meski hanya bagi negara Asia Tenggara dan tidak melibatkan Tiongkok. Pada forum itu, AS mengajukan usul Inisiatif Keamanan Maritim Asia Tenggara dengan dukungan dana 425 juta dollar AS.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, Ryamizard menjelaskan, patroli bersama itu bertujuan memberi pesan bahwa tidak boleh ada satu negara pun yang “membangun kekuatannya untuk mengancam negara lain di kawasan itu.” Indonesia selama ini menyebut diri sebagai pihak netral dalam perselisihan wilayah di LCS, walau perairan Kepulauan

Natuna tampak bersinggungan dengan klaim Sembilan Garis Putus-putus Tiongkok di LCS.

Ketika ditanya, apakah Tiongkok telah melakukan langkah tertentu di wilayah yang bersinggungan dengan perairan Natuna, Ryamizard mengatakan “belum.” Ditambahkannya, “Tetapi Tiongkok tak punya hak karena kami (Indonesia) punya sejarah di sana.”

Usulan Indonesia tentang “patroli damai bersama yang melibatkan Tiongkok” ditanggapi positif oleh Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein, yang menyebut hal itu “bukan kemustahilan.” Kata Hishammuddin, “Tiongkok pasti punya lebih banyak yang dipertaruhkan jika kawasan itu tidak stabil. Patroli bersama oleh banyak negara terbukti bisa sangat efektif di sejumlah perairan, misalnya, dalam menghadapi perompakan di Selat Malaka.”

Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta berkomentar, operasi pengerahan kekuatan militer bukanlah pilihan yang baik bagi pihak mana pun. Pihak Kementerian Luar Negeri RI tampaknya lebih suka mendukung opsi lain yang lebih aman, seperti yang diutarakan Malaysia.

Dalam pidatonya di Shangri-La Dialogue, Hishammuddin mendesak negara-negara Asia Tenggara agar secepatnya bersepakat mengenai *code of conduct* atau tata perilaku bersama di perairan LCS yang dipersengketakan. “Bila kita tak hati-hati melangkah dalam soal ini, akan memicu eskalasi yang melahirkan konflik paling berbahaya,” kata Hishammuddin.

Indonesia sendiri sudah menyerukan agar kawasan sengketa LCS jangan sampai menjadi zona perang. Menhan Ryamizard mengaku telah membahas masalah ini bersama para menteri pertahanan di kawasan ASEAN. “Untuk negara-negara yang berkonflik di sana, jangan sampai menggunakan senjata. Jangan jadikan kawasan itu sebagai zona perang terbuka,” tegas Ryamizard.  Satrio Arismunandar

Menampung pengungsi Muslim Rohingya hanya mengobati gejala, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Komunitas internasional harus mendesak rezim Myanmar, agar mengakui etnis minoritas Rohingya sebagai warga negara yang sah dengan segala hak-haknya.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, pada penghujung Mei 2015 jadi super sibuk. Retno berkeliling ke negara-negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Selain menjalin kemitraan strategis antara Indonesia dan negara-negara Arab anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) itu, Retno juga mengangkat masalah pengungsi etnis Muslim Rohingya, yang sudah menjadi isu kawasan di Asia Tenggara.

Ribuan pengungsi Rohingya yang kabur dengan perahu-perahu, untuk menghindari penindasan rezim Myanmar itu, kini sebagian besar ditampung di Indonesia dan Malaysia atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen menampung pengungsi Rohingya selama setahun, sambil menunggu proses pemulangan (*repatriasi*) atau penempatan kembali ke negara ketiga (*resettlement*).

Tapi tak urung, kehadiran ribuan pengungsi itu untuk waktu lama cepat atau lambat akan menjadi beban keuangan bagi Indonesia. Untunglah, hampir semua negara Arab Teluk menyatakan siap dan berkomitmen membantu Indonesia, termasuk dengan memberikan dana. Komitmen itu antara lain dari Qatar senilai USD50 juta (setara Rp 660 miliar), dan Arab Saudi sekitar USD10-20 juta (setara Rp



Sejumlah anak pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar bermain di tempat penampungan bantuan logistik di pengungsian sementara Kuala Cangkoj, Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh, Senin (1/6).

Rohingya dan Soal



Reuters

Menekan Myanmar

132-264 miliar). Kuwait dan UEA siap membantu, tetapi meminta data tentang apa saja yang dibutuhkan.

Menurut Thomas Varga dari Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), hingga 3 Juni 2015 ada sekitar 3.000 pengungsi yang masih terombang-ambing di laut. Sekitar 3.000 pengungsi Rohingya dan imigran Banglades lain telah ditampung di Malaysia dan Indonesia dalam sebulan terakhir. Dari jumlah itu, ada 350 anak di bawah umur yang tanpa didampingi orangtua. Bahkan ada yang mengakui kehilangan orangtuanya saat terombang-ambing di laut.

Menurut data UNHCR, pengungsi Rohingya di Indonesia ditempatkan di lima wilayah di Aceh dan Sumatera Utara. Tercatat ada 1.000 pengungsi Rohingya di Indonesia, sedangkan 800 lainnya adalah warga Banglades yang ingin kembali pulang ke negaranya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sejak awal, pemerintah Indonesia sudah menyadari bahwa sekadar penampungan pengungsi atas dasar kemanusiaan tidak akan menyelesaikan masalah Rohingya secara tuntas. Inti masalah adalah perilaku rezim Myanmar, yang tidak mengakui etnis minoritas Rohingya sebagai warga negara. Sejalan dengan itu, berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan, dan penindasan juga diderita oleh sekitar 1,3 juta etnis Rohingya. Itulah sebabnya, mereka terpaksa mengungsi dan menempuh perjalanan laut yang berbahaya, dengan bekal seadanya, demi kehidupan yang lebih baik.

Persoalan lainnya, tidak mudah “membujuk” Myanmar agar mengubah kebijakannya yang sangat merugikan etnis Rohingya. Di antara sesama negara ASEAN, ada prinsip untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara tetangga, walaupun faktanya masalah Rohingya sebetulnya sudah bukan lagi semata-mata urusan dalam negeri Myanmar, yang mayoritas



Menlu Retno Marsudi (kiri) berdiskusi dengan Asisten Menlu Urusan Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi Amerika Serikat Anne C. Richard (kanan) saat kunjungannya di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (3/6).

penduduknya beragama Buddha itu. Isu Rohingya sudah menjadi masalah regional, akibat arus ribuan pengungsi yang merepotkan Thailand dan kini “membebani” Malaysia dan Indonesia.

Pemerintah Myanmar perlu ditekan agar mengubah kebijakan diskriminatifnya terhadap etnis Muslim Rohingya. Tak kurang dari Din Syamsuddin, Presiden Konferensi Agama dan Perdamaian Asia (ACRP), yang pada 3 Juni 2015, meminta ASEAN menekan Myanmar agar mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara. Menurut Din, pihak Rohingya dan pemerintah Myanmar dapat dipertemukan dengan pendekatan keagamaan.

Dalam pertemuan ACRP yang direncanakan berlangsung di Bandung, akan hadir juga tokoh Muslim dan Buddha dari Myanmar. “Kehadiran tokoh-tokoh itu diharapkan bisa menjembatani penyelesaian permasalahan etnis Rohingya,” ujar Ketua PP Muhammadiyah itu.

Syukurlah, dalam upaya menekan Myanmar, Indonesia tidak sendirian.

Presiden AS Barack Obama di Washington, pada 12 Juni 2015, meminta pemerintah Myanmar menghentikan kebijakan dan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya. “Penghentian kebijakan itu harus dilakukan, jika Myanmar ingin sukses dalam proses transisi demokrasi,” kata Obama.

Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi, Anne C. Richard pada 3 Juni 2015 menyatakan, AS akan terus mengupayakan langkah diplomasi dalam bentuk apa pun, guna memastikan Myanmar bersedia menyelesaikan akar masalah krisis kemanusiaan, terkait kelompok etnis minoritas Rohingya. Langkah diplomasi itu termasuk kemungkinan menjatuhkan sanksi baru terhadap Myanmar, walaupun usulan sanksi itu hingga saat ini belum dimunculkan.

“Warga Rohingya perlu diperlakukan sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Mereka membutuhkan kartu identitas dan paspor, yang memperjelas status mereka sebagai warga negara seperti warga lain,” kata Richard.

Pertemuan Khusus di Bangkok

Dalam upaya mencari solusi menyeluruh, atas inisiatif Thailand,



Letnan Jenderal Manas Kongpan (kanan), jenderal bintang tiga Thailand dituduh terkait dengan perdagangan manusia, tiba di Markas Besar Kepolisian Nasional saat ia menyerahkan diri ke pihak berwajib di Bangkok, Rabu (3/6).

sudah diadakan pertemuan khusus di Bangkok, pada 29 Mei 2015. Pertemuan itu dihadiri perwakilan 17 negara, UNHCR, Organisasi Migrasi Internasional (IOM), organisasi PBB yang mengurus masalah obat terlarang dan kejahatan (UNODC), serta wakil dari tiga negara pemantau.

Pertemuan itu menghasilkan 13 butir kesepakatan plus 17 butir rekomendasi, yang antara lain

menggarisbawahi pentingnya keterlibatan dunia internasional dalam penanganan bentuk migrasi tak beraturan melalui jalur laut, seperti perdagangan dan penyelundupan manusia. Perumusan hasil kesepakatan dilakukan dengan ekstra hati-hati, agar tidak memicu kemarahan Myanmar yang hingga kini masih menolak tuduhan sebagai sumber masalah.

Rencana pertemuan ini juga sempat ditentang Myanmar, yang menolak hadir jika pertemuan semata-mata hanya membahas isu Rohingya. Bahkan Myanmar menolak penggunaan istilah “Rohingya” dalam pertemuan itu. “Anda tak

dapat menyalahkan Myanmar sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab. Terkait lonjakan migrasi ini, Myanmar bukanlah satu-satunya,” ujar Htein Lin, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Malaysia sepakat memberi bantuan kemanusiaan serta menampung sedikitnya 7.000 pengungsi asal Banglades dan Myanmar untuk sementara waktu. Setelah satu tahun, UNHCR akan mengatur masalah pemulangan atau penempatan kembali para pengungsi ke negara ketiga.

Komitmen pendanaan untuk membantu menangani krisis yang terjadi juga muncul dalam pertemuan. Komitmen terutama muncul dari dua negara pemantau yang hadir, yaitu AS dan Jepang, serta negara peserta Australia.

Aspek lain yang terkait dengan isu pengungsi Rohingya memang adalah praktik perdagangan manusia, yang melibatkan aparat keamanan yang membekinginya. Sejumlah perwira militer Thailand diduga terlibat dalam kejahatan itu. Salah satunya adalah Letnan Jenderal Manas Kongpan (58), yang menyerahkan diri pada 2 Juni 2015, setelah pengadilan mengeluarkan surat penangkapan atas dirinya.

Pengadilan provinsi Na Thawi di Provinsi Songkhla, Thailand Selatan, mengeluarkan surat penangkapan terhadap Manas pada 31 Mei 2015. Sebanyak 84 surat penangkapan sejenis telah dikeluarkan pengadilan Thailand, namun dari jumlah itu polisi baru melakukan 51 kali penangkapan.

Kawasan Thailand Selatan yang berbatasan dengan Malaysia memang sering menjadi tujuan perdagangan manusia. Aparat Thailand dan Malaysia telah menemukan lokasi kamp-kamp penampungan korban perdagangan manusia dan juga kompleks pemukiman di wilayah masing-masing. Sebagian besar dari korban tersebut adalah etnis Rohingya asal kawasan barat Myanmar, dari Negara Bagian Rakhine. ■ Satrio Anismunandar

Salah Ketik, Jaksa Panggil Nenek Renta Hadapi Kasus Narkoba



Terdakwa kasus penganiayaan, Habibah, menyalahkan sikap Kejaksaan Negeri Pare-Pare Sulawesi Selatan yang disebutnya melakukan kesalahan fatal. Habibah didakwa menganiaya tetangganya, Herlin, namun surat pemanggilan yang dilayangkan dinyatakan untuk kasus narkoba.

"Ini merupakan ketidaktepatan jaksa. Hal ini akan kami pertanyakan dan akan memikirkan menuntut balik sang jaksa," tegasnya di Pengadilan Negeri Kota Parepare, Selasa pekan lalu.

"Kami sekeluarga *shock*. Kami berharap kepada Kejagung, agar jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, ditindak terkait penerbitan surat yang salah ini," tambah suami Habibah, Zainal Abidin.

Dalam surat dengan nomor B 848/r.4.11/ft tertanggal 1 Juni 2015, panggilan ditandatangani Jaksa Lili Mangiri dan stempel Kejaksaan Negeri Kota Parepare.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare Rizal mengakui adanya kesalahan pengetikan dalam surat pemanggilan nenek Habibah.

"Saya akui ada kesalahan pengetikan, mestinya Jaksa Lili Mangiri teliti dulu sebelum surat dilayangkan," katanya. /Ant-M Vinda Wirawan

Prostitusi Online Makasar, Kirim Foto Baru Transaksi

Polda Sulselbar berhasil membongkar jaringan prostitusi online di Makassar. Bisnis terlarang itu dibongkar setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat.

"Kami memancing tersangka bertransaksi dan menyuruh datang ke sebuah hotel di Jalan Pelita Raya. Di situ ditemukan 6 orang PSK yang dijajakan tersangka," terang Kasubdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrim) Polda Sulselbar, Kopol Gany Alamsyah, Selasa pekan lalu.

Azis alias Azizah alias Cizza, warga Jalan Pendidikan Raya, Makassar, selanjutnya ditangkap petugas ditepi pantai Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba.

Disampaikan, bisnis prostitusi

online yang dilakukan Cizza dilakukan melalui BBM, Facebook dan jejaring sosial lainnya. Sebelum ada *deal*, pelaku mengirimkan sejumlah foto gadis yang diperdagangkan.

"Kalau sepakat uangnya ditransfer. Tarif sekali pakai pun beragam yakni Rp 1,5 sampai 3 juta. Pembagian hasilnya lebih banyak didapatkan tersangka, yakni di atas 50 persen," jelas Gany.

"Dari penangkapan kali ini, polisi menyita uang tunai Rp 1,5 juta, sebuah alat kontrasepsi dan dua unit telepon seluler," tambahnya. /Ant-M Vinda Wirawan



Ratusan Pekerja Kebut Pembangunan Rumah Pengungsi Rohingya



Sekitar 130 tukang yang diawasi oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) bekerja siang dan malam untuk mengebut penyelesaian pembangunan rumah untuk ratusan warga Rohingnya di Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara.

Mereka bekerja membuat pintu,

membuat taman, sebagian lainnya membuat taman dan menata halaman. Kompleks itu sangat rapi. Targetnya, seluruh bangunan yang dibutuhkan rampung 100 persen sebelum memasuki bulan puasa. Diharapkan, mereka bisa melaksanakan puasa dengan nyaman.

"Barak atau rumah ini sudah memadai standar internasional. Mengingat, mereka, kami perhitungkan lebih setahun akan tinggal di sana. Untuk pola penanganannya sama dengan di Kuala Cangkoi. Misalnya, persiapan makan sepenuhnya ditanggung IOM," ujar Kepala Humas Pemkab Aceh Utara, Amir Hamzah, Senin pekan lalu.

Untuk pengamanan di Blang Adoe sambung Amir akan dilakukan pihak Polres Lhokseumawe karena sudah masuk wilayah Polres Lhokseumawe.

/Masriadi Sambo

Pemda Sumut Bangun Parkir Motor Senilai 5,8 Miliar

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun lokasi parkir sepeda motor dengan biaya senilai lebih dari Rp5,8 miliar. Bangunan parkir tercatat berukuran sepanjang 100 meter dan lebar 8 meter.

Kasubbag Perawatan Gedung, Mess dan Kantor Perlengkapan dan Aset, Syahril menerangkan, tempat parkir tersebut akan dibangun tiga lantai dari sebelumnya hanya satu lantai. Pembangunan tiga lantai parkir itu akan mampu menampung 700 unit sepeda motor.

Dalam proses tender, pembangunan di pagu APBD senilai Rp6.140.000.000.000. Dimana PT Hari Jadi Sukses akhirnya



memenangkan tender dengan harga penawaran Rp 5.894.110.000.

"Pembangunan parkir dilakukan selama 180 hari oleh PT Hari Jadi Sukses. Adapun nilai Pagu proyek itu sebesar Rp 6.140.000.000 yang bersumber dari APBD TA 2015," terang Syahril.

Besaran anggaran untuk pembangunan parkir, menurutnya sudah sesuai dengan perhitungan dan kebutuhan. /Damsai Oktavianus Mendrofa

Warga Aceh Galang Koin Pembangunan Jalan ExxonMobil



Masyarakat Aceh menggalang koin pembangunan jalan ExxonMobil di kawasan Desa Paya Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Aksi dilakukan karena Jalan Exxon dari kawasan Simpang Ceubrek, Kec Syamtalira Aron hingga Kecamatan Pirak Timu, rusak parah.

"Tujuan kami pada hari ini adalah mengadakan pertemuan Pemkab dengan Exxon dan juga DPRK Aceh Utara untuk membahas siapa yang bertanggungjawab terhadap jalan ini," tegas Koordinator Aliansi Rakyat, Muhammad Jafar, Senin pekan lalu.

"Koin kami galang di sejumlah titik, antara lain *cluster* IV dan Kawasan Parang Sikureung Kecamatan Matangkuli. Hasil koin yang terkumpul nanti akan kami serahkan saat pertemuan dengan DPRK, Pemkab dan Exxon, yang kami rencanakan di Gedung Dewan Aceh Utara," tambahnya.

Menurutnya, selama ini sudah banyak warga menjadi korban akibat rusaknya jalan di sepanjang Jalan Exxon. Suatu waktu memang sudah pernah ada perbaikan, namun hanya menutup bagian yang sudah berlubang sehingga tidak tahan lama.

Kami berharap jalan itu diaspal kembali," tutup Jafar. /Masriadi Sambo

Minim Bantuan Pemerintah, Pengungsi Sinabung Nekat Masuk Zona Merah



Sejak ditingkatkan statusnya dari Siaga (III) menjadi Awas (IV), Gunung sinabung seakan tak berhenti menyemburkan awan panas dengan jarak luncur secara variatif.

Meski berstatus paling tinggi dan berbahaya, tak menyurutkan para pengungsi maupun warga sekitar Sinabung untuk mengais nafkah di daerah-daerah yang merupakan zona merah. Baik di ladang-ladang perkebunan maupun mencari batu sisa erupsi.

Menyikapi hal itu, Ketua Program Aksi Cepat Tanggap (ACT) Medan, Susanto Ginting mengatakan, sikap nekat itu didorong kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi jika hanya

mengharapkan bantuan dari pemerintah.

"Pemerintah hanya membantu mereka untuk makan dan minum saja, sementara untuk kebutuhan sehari-hari anak mereka ke sekolah tidak ditanggung," ujar Susanto, Jumat (19/6).

Menurutnya, seharusnya pemenuhan kebutuhan tidak hanya sebatas logistik makanan dan minuman para pengungsi, tetapi juga harus didasarkan pada faktor sosial pada masyarakat Karo.

"Warga Karo itu setiap pagi selalu ke kedai kopi. Disitu mereka berinteraksi sosial dengan yang lainnya. Kalau mereka tak punya uang bagaimana mereka ke kedai meski sekedar minum teh saja. Ini hal kecil tapi menjadi salah satu faktor yang membuat mereka nekad pulang ke ladang untuk memetik buah kopi mereka," imbuhnya.

Persoalan-persoalan kecil seperti itu, lanjutnya sudah menjadi keluhan bagi para pengungsi sejak lama.

"Apa dengan makan dan minum di tenda pengungsian itu cukup? Tidak. Para pengungsi juga butuh biaya untuk kebutuhan sekolah anak mereka," tandasnya. /Karel Stefanus Ratulangi

رمضان كريم

Segenap Keluarga Besar

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Mengucapkan

Selamat Menjalankan

Ibadah Puasa

Ramadhan Mubarak 1436 H

Come and indulge yourself with 38 days of fabulous shopping and entertainment... only at **Jakarta Fair Kemayoran 2015.**

Enjoy great bargains on just about everything you need... Traditional Indonesian handicraft, gemstones, home appliances, electric and electronic gadgets, lifestyle equipment and many many more... Don't give a miss to our non - stop music concerts for 38 days!!

48



**JAKARTA
FAIR**

KEMAYORAN

2015



Arena
JIExpo
29th May
to
5th July
2015

The Biggest, The Longest, and The Most Complete Fair



Information: 021 - 26645000, 26645131

www.jakartafair.co.id | [f](https://www.facebook.com/JakartaFair) Jakarta Fair | [@JIExpo](https://twitter.com/JIExpo) | [@JakartaFairID](https://twitter.com/JakartaFairID) | [@jakartafairid](https://www.instagram.com/jakartafairid)

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



aktual.co telah menjadi aktual.com



Perubahan hanya pada URL
Isi dan konten tetap sama